

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 1 TAHUN 2026

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan industri merupakan bagian integral dari tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang pelaksanaannya diwujudkan melalui strategi pembangunan berkelanjutan dan demokrasi ekonomi yang menjamin keadilan sosial, efisiensi sumber daya, dan peningkatan daya saing nasional;
 - b. bahwa pembangunan dan pengembangan industri akan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan perekonomian seiring dengan peningkatan jumlah industri unggulan yang berdampak terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penciptaan struktur ekonomi yang mandiri;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan industri Kabupaten sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2022);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 71);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
8. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang belum ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yang memiliki potensi untuk menghasilkan produk unggulan daerah.
9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10. Program Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral yang diperlukan dalam pembangunan Industri Kabupaten Cirebon.
11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai produksi dalam suatu wilayah pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 2

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah.

Pasal 3

- (1) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Industri makanan dan minuman;
 - b. Industri kayu, barang dari kayu dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya dan Industri furnitur; dan
 - c. Industri tekstil dan Industri pakaian jadi.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

BAB III RPIK TAHUN 2025–2045

Pasal 4

- (1) RPIK Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. potensi sumber daya Industri Kabupaten Cirebon;
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - f. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri.
- (2) Sistematika RPIK Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten;

d. Bab IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten;

e. Bab V : Penutup

- (3) Ketentuan mengenai RPIK Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RPIK Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Penggunaan sumber daya manusia Industri oleh perusahaan Industri memprioritaskan pekerja lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong produk Industri Unggulan Daerah menjadi produk identitas Daerah yang mampu menjadi ciri khas Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK Tahun 2025–2045.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah;

- b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perizinan berusaha sektor Industri;
 - b. pelaporan data Industri atau kawasan Industri; dan
 - c. kelestarian lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2025–2045 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri.
- (3) Selain pertumbuhan industri, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2024-2045 meliputi permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2025–2045 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Februari 2026
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

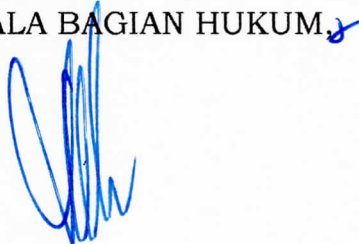
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HENDRA NIRMALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA
BARAT : (1/2/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SETIA BUDI HARTONO, S.H., M.H
NIP. 19780409 200212 1 004

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Februari 2026
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HENDRA NIRMALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA
BARAT : (1/2/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SETIA BUDI HARTONO, S.H., M.H
NIP. 19780409 200212 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana.

Pembangunan sektor Industri di Daerah mengacu pada visi pembangunan Industri nasional yaitu “Indonesia menjadi negara Industri tangguh”, visi pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2038 yaitu “Jawa Barat menjadi provinsi Industri termaju di Indonesia” dan visi pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 yaitu “Kabupaten Cirebon berdaya saing, maju dan berkelanjutan”. Dengan mengacu seluruh visi pembangunan tersebut, rencana pembangunan dan pengembangan sektor Industri harus selalu diarahkan selaras dengan misi pembangunan Daerah yaitu “meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi”.

Penyusunan RPIK Tahun 2025–2045 selain dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan Industri sebagai bagian integral dari tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum, juga diarahkan guna menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto Daerah;
- b. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- c. menumbuhkembangkan Industri hilir dan Industri antara berbasis sumber daya alam;
- d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- e. meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang Industri yang mudah dan cepat;
- f. mempercepat penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh wilayah Daerah;
- g. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; dan

h. mengembangkan Industri hijau melalui regulasi produk ramah lingkungan dan pemakaian energi terbarukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Klasifikasi jenis Industri Unggulan Daerah berdasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Tahun 2020.

Ayat (2)

Industri potensial merupakan Industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi Industri Unggulan Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025–2045

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025–2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Untuk mewujudkan pembangunan sektor industri yang berkelanjutan, Pemerintah pusat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035.

Provinsi Jawa Barat selama ini telah mengukuhkan diri sebagai provinsi industri yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Pada saat ini, industri di Jawa Barat masih terkonsentrasi di kawasan-kawasan industri di wilayah Jawa Barat bagian barat-utara serta sekitar metropolitan Bandung. Di masa mendatang, berbagai faktor seperti Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), lahan, regulasi, dan sebagainya membuat daya tarik industri di kawasan-kawasan tersebut menurun. Sementara itu, wilayah Jawa Barat timur-utara termasuk Kabupaten Cirebon akan muncul menjadi kekuatan industri baru yang menarik dengan faktor sumber daya industri yang atraktif serta pembangunan infrastruktur industri yang terus dilakukan. Untuk menghadapi peluang tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon perlu menyiapkan perencanaan pembangunan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK sebagai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2045.

Penyusunan RPIK didasarkan pada 3 (tiga) alasan. *Pertama*, adanya alasan yuridis dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang mengamanatkan setiap tingkat pemerintahan untuk merancang rencana pembangunan industri. Dimana, pada level nasional disebut RIPIN, pada level provinsi disebut RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi), dan pada level kabupaten/kota disebut RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota). Sebagai konsekuensinya, RPIK diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi tiap Perangkat Daerah yang tentunya telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Kedua, RPIK disusun untuk memaksimalkan potensi industri dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Cirebon. Dimana, potensi industri dapat dirujuk pada kondisi geografis, demografis, dan ekonomi. Dalam hal ini, posisi geografis Kabupaten Cirebon menunjukkan adanya peluang besar pengembangan sektor industri yang disertai regulasi ketat terkait pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penyusunan RPIK menjadi penting, terutama

untuk menyelaraskan industrialisasi dengan peningkatan fungsi lingkungan di Kabupaten Cirebon. Selain itu, posisi Kabupaten Cirebon yang terletak pada jalur utama konektor dan pintu gerbang menuju Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur memungkinkan untuk percepatan industrialisasi daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 mencapai 2.360.441 jiwa dengan 70,11% berada pada usia produktif. Berdasarkan data tersebut secara demografis Kabupaten Cirebon berada pada kondisi bonus demografis yang baik terutama dampaknya terhadap penyediaan tenaga kerja. Selanjutnya pada aspek ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 mengalami kontraksi menjadi 4,85%, setelah di tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif di angka 1,08%. Variabel ekonomi lainnya yang cukup berpengaruh terhadap struktur perekonomian Kabupaten Cirebon adalah nilai inflasi yang tetap dijaga pada kisaran 4,85% (*years-on-years*) dan berada di bawah tingkat inflasi Provinsi Jawa Barat yakni 6,04% dan inflasi nasional berada pada angka 5,51%.

Ketiga, penyusunan RPIK Kabupaten Cirebon diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari pembangunan industri yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Pencemaran dari limbah industri berdampak langsung terhadap penurunan kualitas air sungai yang selanjutnya berpengaruh terhadap penurunan produksi pertanian. Selain limbah industri, alih fungsi lahan pertanian untuk industri menjadi persoalan strategis dalam pembangunan Kabupaten Cirebon. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2023 menyebutkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan produksi pertanian yaitu alih fungsi lahan. Lahan Baku Sawah (LBS) Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 seluas 52.579 ha dan tahun 2025 seluas 49.690,63 ha, berdasarkan uraian tersebut setidaknya terdapat tiga permasalahan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan industri, yaitu (i) hadirnya konflik pemanfaatan sumberdaya; (ii) resistensi sosial akibat ketidaksiapan transformasi struktural; dan (iii) penurunan kualitas lingkungan.

Permasalahan konflik pemanfaatan sumberdaya yang terjadi di Kabupaten Cirebon terkait perlindungan Hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Cirebon masih belum berjalan maksimal. Alih fungsi lahan belum mengindahkan aturan yang ada dan sanksi terhadap pelanggaran belum diterapkan secara maksimal. Dampaknya adalah sangat dimungkinkan terjadi konflik sosial yang terjadi antara petani dengan pengusaha yang mendapatkan perizinan dari pemerintah untuk membangun perusahaan di lahan pertanian.

Permasalahan lain dalam pembangunan Industri Kabupaten Cirebon adalah upaya untuk mengatasi resistensi sosial akibat ketidaksiapan transformasi struktural, yaitu perihal daya saing tenaga kerja lokal. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan industri di Kabupaten Cirebon adalah bagaimana tenaga kerja lokal mampu bersaing dan mengisi posisi-posisi yang ada pada perusahaan. Kondisi di lapangan banyak ditemukan bahwa perusahaan belum optimal memberdayakan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah mendorong perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja yang berdomisili Kabupaten Cirebon sampai 60% dari total kebutuhan tenaga kerja yang ada sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

Isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Cirebon saat ini adalah bagaimana pembangunan industri tidak bertentangan dengan pelestarian

lingkungan. Keberadaan industri telah berdampak besar terhadap aspek lingkungan yang ditandai dengan penurunan daya dukung lingkungan, karena tingginya pencemaran lingkungan. Untuk itu, perlu dikembangkan perencanaan dan langkah dalam mengembangkan industri hijau di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dibutuhkan panduan/pedoman pembangunan Industri Kabupaten Cirebon yang memperhatikan seluruh aspek. Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Cirebon menjadi penting, terutama untuk memaksimalkan peran industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIK Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 188 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2024-2044;

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPIK Kabupaten Cirebon 2025-2045 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum dan sistematika penyajian:

- a. Latar Belakang: Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Kabupaten Cirebon;
- b. Dasar Hukum: Menguraikan dasar hukum dalam penyusunan RPIK Kabupaten Cirebon
- c. Sistematika Penulisan: Menguraikan sistematika penyusunan RPIK Kabupaten Cirebon.

2. BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berisi tentang deskripsi:

- a. Kondisi Daerah: Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir).
- b. Sumber Daya Industri: Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang, serta pembiayaan industri.
- c. Sarana dan Prasarana: Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.
- d. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah: Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

3. BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang:

- a. Visi dan Misi Pembangunan Daerah: mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon 2025-2045;
- b. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten: menguraikan tentang visi dan misi RPIK Kabupaten Cirebon pada periode 20 (dua puluh) tahun mendatang yang mengacu pula pada RIPIN dan RPIP Jawa Barat;
- c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten: menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan industri yang merupakan turunan dari visi yang ditetapkan pada bagian sebelumnya.

4. BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

- a. Strategi Pembangunan Industri: Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.
- b. Program Pembangunan Industri: Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten/Kota. Penentuan industri unggulan kabupaten/kota berdasarkan pendekatan kompetensi inti Industri Kabupaten Cirebon dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan kabupaten.

- c. Pengembangan Perwilayahan Industri: Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, serta Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.
- d. Pembangunan Sumber Daya Industri: Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.
- e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri: Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, dan infrastruktur penunjang standardisasi industri.
- f. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM): Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

5. BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I sampai dengan Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri kabupaten selama 20 tahun ke depan.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis (*geostrategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Cirebon telah ditetapkan menjadi pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Metropolitan Cirebon Raya (MCR).
2. Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini berpotensi terjadi interaksi sumber daya dari dua provinsi dan berpeluang untuk pengembangan Kabupaten Cirebon.
3. Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Cikopo-Palimanan (Cipali), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci Pejagan.
4. Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon- Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon- Yogyakarta-Surabaya).
5. Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

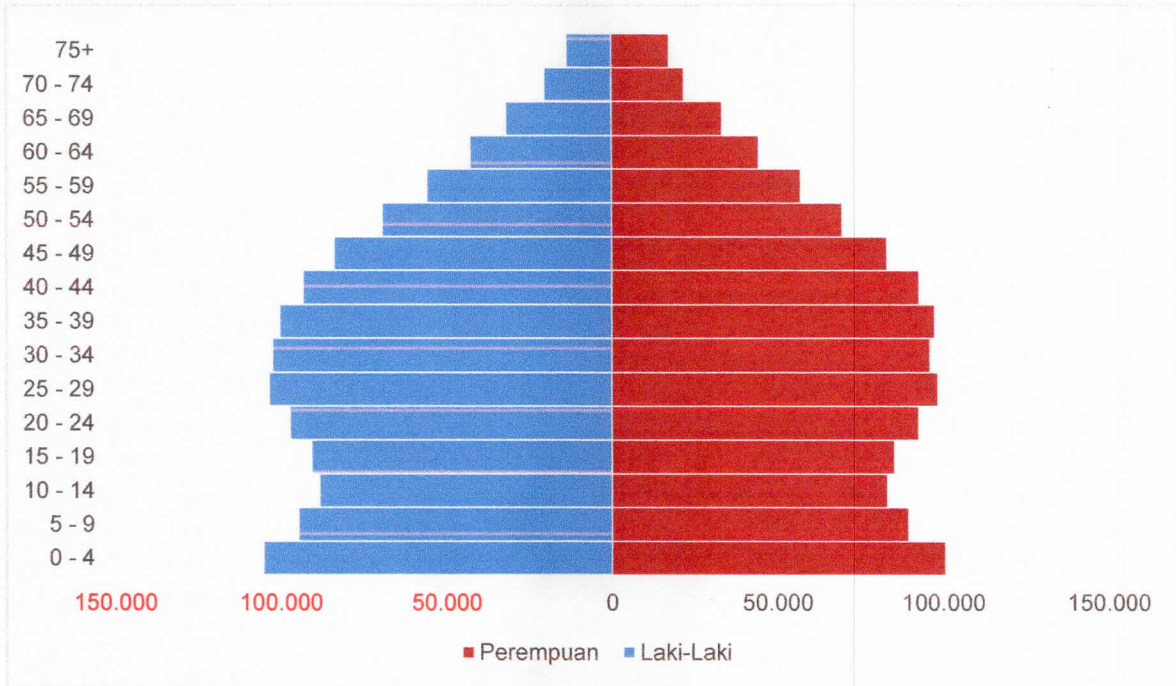
2.1.2 Kondisi Demografis

Paparan kondisi demografis Kabupaten Cirebon dibagi menjadi dua uraian yaitu mengenai kondisi penduduk dan tingkat Pendidikan.

1. Gambaran Penduduk

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi negara/daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan).

Penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan hasil proyeksi Interim tahun 2023 sebanyak 2,360,441 jiwa yang terdiri atas 1,195,535 jiwa penduduk laki-laki dan 1,164,906 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2023 sebesar 1,94 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103. Kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon tahun 2022 mencapai 2.205 jiwa/km².



Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon 2023
 Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024)

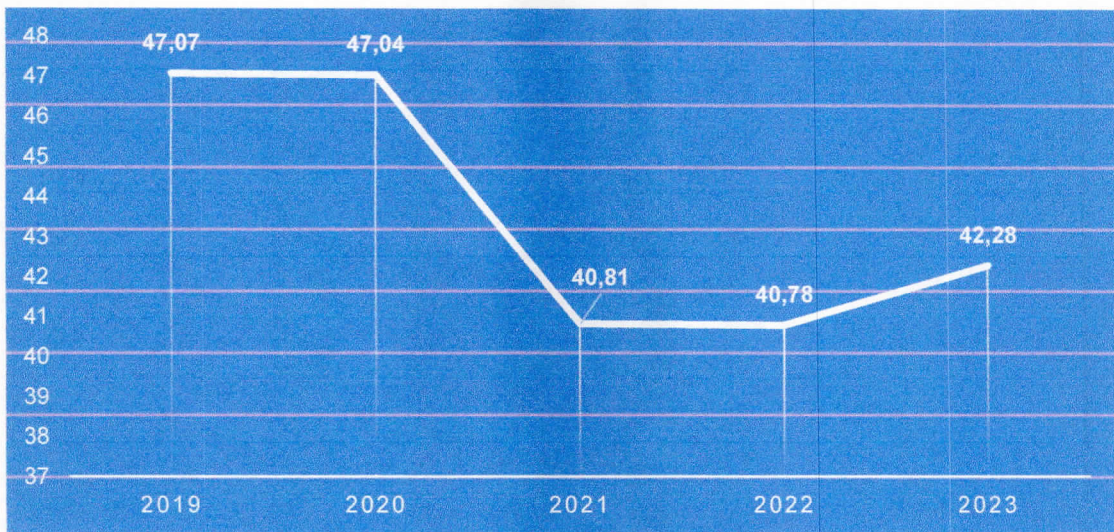
Pada tahun 2023, piramida penduduk Kabupaten Cirebon menunjukkan komposisi usia produktif mendominasi demografi di Kabupaten Cirebon. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Cirebon didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hal ini merupakan salah satu bonus demografi yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Cirebon. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon 2021-2023

Kelompok Umur	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
0 - 4	102,176	102,624	105,497	96,625	97,062	100,703
5 - 9	88,462	88,491	94,825	83,371	83,344	89,657
10 - 14	88,877	87,694	88,474	83,698	82,827	83,202
15 - 19	93,482	93,367	90,869	88,029	87,819	85,425
20 - 24	103,726	103,669	97,375	99,212	98,791	92,743
25 - 29	103,287	103,884	103,689	96,104	96,405	98,535
30 - 34	103,809	104,365	102,726	98,456	98,697	96,142
35 - 39	96,614	97,556	100,436	95,489	96,272	97,658
40 - 44	90,545	91,336	93,308	89,277	89,872	92,915
45 - 49	77,499	79,055	84,003	76,937	78,565	83,266
50 - 54	64,445	65,980	69,486	65,122	66,907	69,764
55 - 59	50,993	52,568	55,851	52,316	54,189	57,269
60 - 64	40,206	41,872	42,887	41,415	43,521	44,626
65 - 69	29,298	30,696	31,999	30,107	31,719	33,528
70 - 74	16,874	18,277	20,362	18,242	19,774	21,984
75+	11,572	12,437	13,748	14,702	15,782	17,489
Total	1,161,865	1,173,871	1,195,535	1,129,102	1,141,546	1,164,906

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024)

Temuan di atas dikonfirmasi oleh rasio ketergantungan di Kabupaten Cirebon. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 adalah sebesar 42,28%, itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



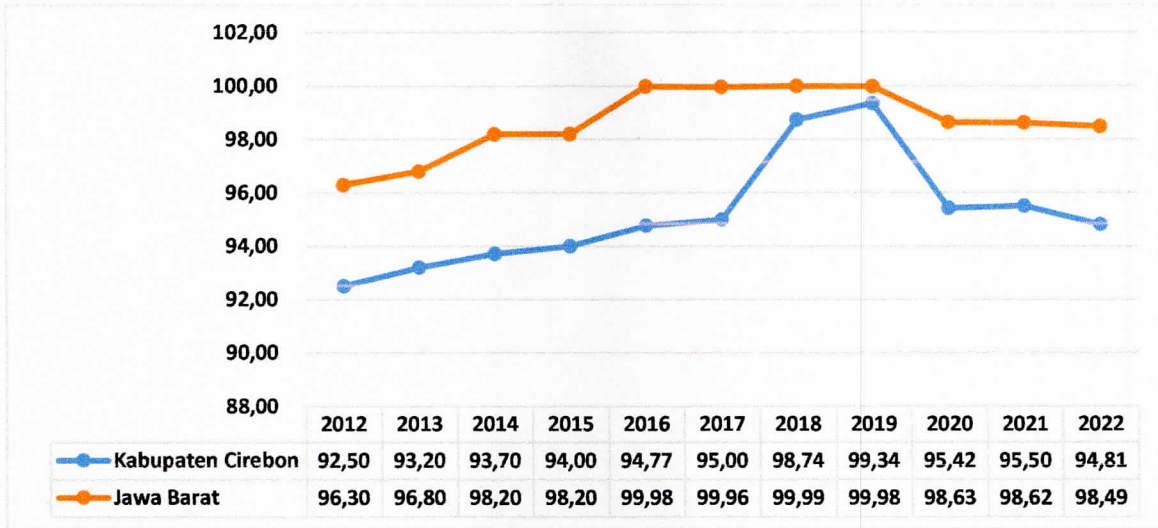
Gambar 2.3 Angka Ketergantungan Kabupaten Cirebon
Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024 diolah)

Dilihat dari data diatas, angka ketergantungan Kabupaten Cirebon pada 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang positif. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Cirebon mempunyai bonus demografi yang bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon melalui pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia terutama pada usia produktif dan menciptakan lapangan kerja baru.

2. Tingkat Pendidikan

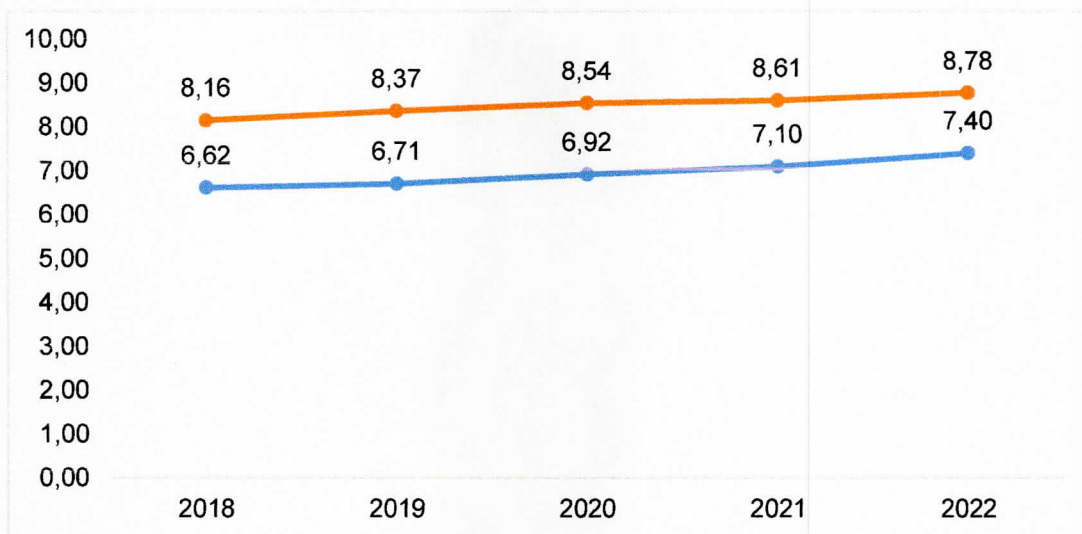
Indikator kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian pendidikan atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Merujuk pada indikator IPM, bidang pendidikan memiliki dua indikator utama yaitu Angka Melek Huruf (AMH) atau tingkat literasi dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Indikator AMH menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar dalam mewujudkan kapasitas sumber daya manusia berkualitas. Berdasarkan data BPS pada kurun waktu tahun 2012-2022, capaian AMH masyarakat Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan.

Pada tahun 2012, capaian AMH sebesar 92,50% dan pada tahun 2022 angkanya mencapai 94,81%. Hal ini berarti masih menyisakan 5,19% penduduk usia 15 tahun keatas yang masih berstatus buta huruf. Peningkatan capaian AMH menjadi hasil dari dukung berbagai program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat yang mengarah pada upaya pemberantasan buta huruf. Namun demikian, capaian AMH Kabupaten Cirebon masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2.4 Capaian AMH Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat (2012-2022)
 Sumber: BPS Jawa Barat diolah (2023)

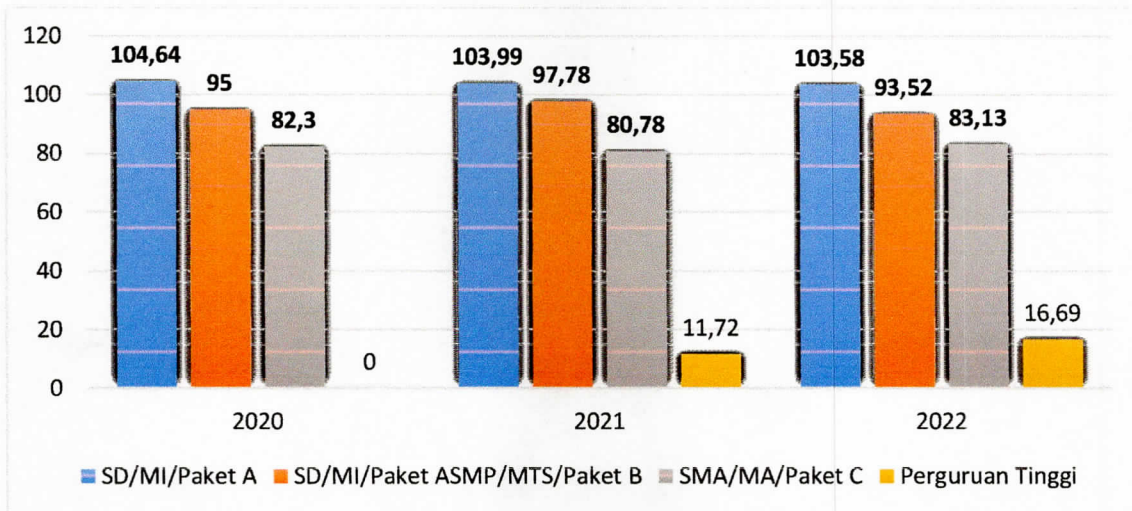
Sementara, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah durasi rata-rata tahun penduduk mencapai jenjang pendidikan formal tertinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan, kualitas sumber daya manusia semakin baik. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018-2022 capaian RLS mengalami kenaikan dari 6,62 tahun pada 2018 menjadi 7,40 tahun pada 2022 atau setara dengan jenjang pendidikan SMP kelas VII. Meskipun demikian, capaiannya masih di bawah capaian RLS Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa program wajib belajar sembilan tahun berdampak positif bagi peningkatan pendidikan penduduk Kabupaten Cirebon.



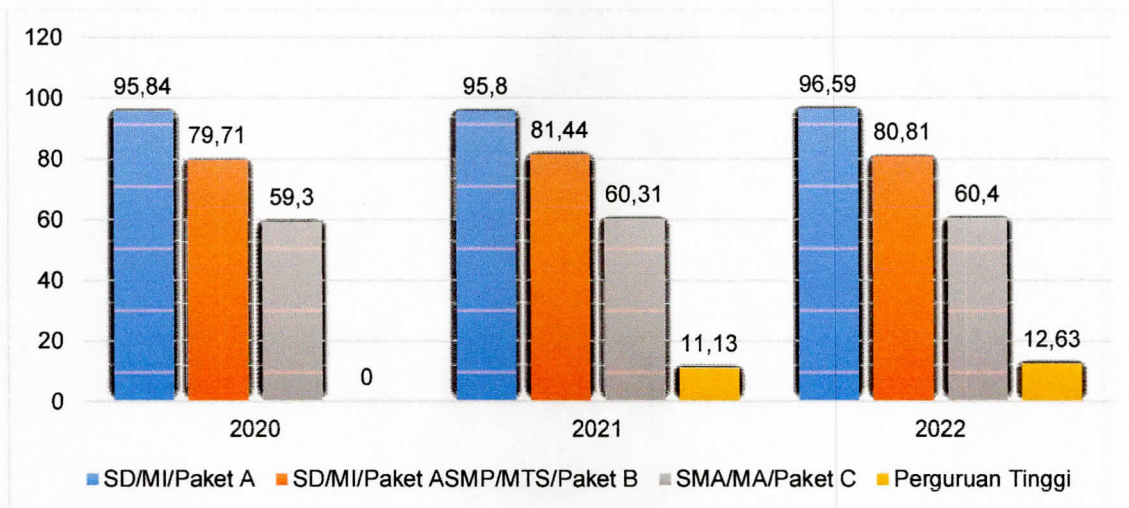
Gambar 2.5 Capaian Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat (2018-2022)
 Sumber: BPS Jawa Barat diolah (2023)

Namun demikian, hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah bahwa keberlangsungan pendidikan tidak hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga perlu adanya komitmen dan dukungan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ketika kebijakan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD dan

menyelenggarakan pendidikan gratis, tetapi aspek sosial dan budaya di lingkungan masyarakat tidak mendukung penyelenggaraan pendidikan, maka peningkatan jenjang pendidikan masyarakat kurang optimal. Kendala yang sering terjadi dan berkembang di masyarakat antara lain bahwa anak lebih difungsikan untuk mencari nafkah dan membantu ekonomi keluarga. Akibatnya, anak tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan. Konsekuensinya, angka partisipasi murni semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.



Gambar 2.6 Capaian APK Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2022
Sumber: BPS Jawa Barat diolah (2023)



Gambar 2.7 Capaian APM Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2022
Sumber: BPS Jawa Barat diolah (2023)

Berdasarkan data BPS, APM pada setiap jenjang pendidikan berfluktuasi. Pada tahun 2020, APM jenjang SD sebesar 95,84% menjadi 96,59% pada tahun 2022. Pada tahun 2020, APM jenjang SMP sebesar 79,81% meningkat menjadi 80,81% pada tahun 2022. Pada 2020, APM jenjang SMA sebesar 59,3% meningkat menjadi 60,4% pada tahun 2022.

Adapun rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 angkanya berfluktuatif, penurunan kualitas rasio sekolah terdapat pada jenjang SMA yang pada tahun 2017 angkanya semakin kecil menjadi 4,89 sekolah per 10.000

penduduk usia sekolah SMA. Untuk tingkat SD, rasio sekolah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 45,41 menjadi 48,56 sekolah per 10.000 penduduk usia SD.

Adapun rasio guru terhadap siswa pada tahun 2022/2023 pada tingkat SD adalah 1:24, tingkat SMP 1:18, tingkat SMA dan SMK 1:19. Rasio rombongan belajar terhadap siswa adalah untuk tingkat SD perbandingannya adalah 1:28, untuk tingkat SMP 1:30 sedangkan pada tingkat SMA dan SMK masing-masing memiliki rasio 1:32 dan 1:30.

GURU : SISWA

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1 : 24	1 : 18	1 : 19	1 : 19	1 : 8

GURU PNS : SISWA

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1 : 60	1 : 58	1 : 51	1 : 197	1 : 49

ROMBEL : SISWA

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1 : 28	1 : 30	1 : 32	1 : 30	1 : 7

RUANG KELAS : ROMBEL

SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1 : 1,07	1 : 0,91	1 : 1,01	1 : 0,92	1 : 1,73

Gambar 2.8 Data Rasio Pendidikan di Kabupaten Cirebon Tahun 2022/2023
Sumber: npd.kemdikbud.go.id

2.1.3 Kondisi Ekonomi

1. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian di Kabupaten Cirebon menunjukkan pola hubungan yang saling berkaitan antara lapangan usaha yang memiliki peranan dominan. Lapangan usaha industri membutuhkan dukungan dari aktivitas Perdagangan dan pertanian serta bergantung pada kondisi bidang transportasi dan pergudangan untuk memenuhi kebutuhan barang. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Cirebon didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; serta Jasa Pendidikan. Secara serentak keenam kategori tersebut memiliki peranan sebesar 76,13 persen terhadap total PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2023.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Cirebon pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha sektor industri pengolahan yaitu Rp12,452 Triliun (20,3%). Selanjutnya secara berturut-turut dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp9,161 Triliun (14,9%); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp8,333 Triliun (13,6%); Konstruksi sebesar Rp6,551 (10,7%); Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp6,257 Triliun (10,2%); serta Jasa Pendidikan sebesar Rp3,920 Triliun (6,4%). Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing berada di bawah 5 (lima) persen.

Perkembangan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (miliar rupiah), 2019–2023

Lapangan Usaha	2019 (Miliar Rp)	%	2020 (Miliar Rp)	%	2021 (Miliar Rp)	%	2022 (Miliar Rp)	%	2023 (Miliar Rp)	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,592.36	15,45	7,893.61	15,93	7,952.74	15,20	8,822.41	15,57	9,161.96	14,94
Pertambangan dan Penggalian	520.61	1,06	526.24	1,06	587.31	1,12	609.1	1,08	624.99	1,02
Industri Pengolahan	10,072.01	20,50	10,186.65	20,55	10,811.65	20,67	11,665.49	20,59	12,452.54	20,31
Pengadaan Listrik dan Gas	101.55	0,21	95.23	0,19	108.67	0,21	110.76	0,20	116.17	0,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.93	0,10	55.23	0,11	60.57	0,12	63.69	0,11	75.68	0,12
Konstruksi	5,632.73	11,46	5,413.44	10,92	5,955.52	11,39	6,328.78	11,17	6,551.08	10,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,578.65	15,42	7,175.42	14,48	7,735.18	14,79	8,047.95	14,21	8,333.98	13,59
Transportasi dan Pergudangan	4,163.19	8,47	4,110.76	8,29	4,256.39	8,14	4,992.66	8,81	6,257.44	10,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,711.14	3,48	1,567.29	3,16	1,600.25	3,06	1,841.55	3,25	2,078.30	3,39
Informasi dan Komunikasi	1,122.90	2,29	1,465.53	2,96	1,446.34	2,76	1,512.01	2,67	1,596.12	2,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,865.09	3,80	1,934.56	3,90	2,130.03	4,07	2,353.65	4,15	2,590.38	4,23
Real Estat	1,130.75	2,30	1,184.60	2,39	1,298.40	2,48	1,381.20	2,44	1,458.60	2,38
Jasa Perusahaan	444.92	0,91	415.16	0,84	451.74	0,86	516.88	0,91	586.82	0,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,502.24	3,06	1,491.69	3,01	1,610.24	3,08	1,552.18	2,74	1,667.37	2,72
Jasa Pendidikan	2,847.31	5,79	3,215.27	6,49	3,352.61	6,41	3,513.59	6,20	3,920.73	6,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	998.6	2,03	1,020.92	2,06	1,120.75	2,14	1,179.98	2,08	1,280.93	2,09
Jasa lainnya	1,804.83	3,67	1,809.98	3,65	1,831.56	3,5	2,161.76	3,82	2,556.68	4,17
Total	49,135.81	100,00	49,561.56	100,00	52,309.94	100,00	56,653.64	100,00	61,309.76	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2025)

Mengutip dari publikasi BPS Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024 besaran PDRB Perkapita Kabupaten Cirebon ditampilkan pada di bawah ini. PDRB per kapita menunjukkan tren pertumbuhan selama periode 2019 hingga 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp22.506.000, namun

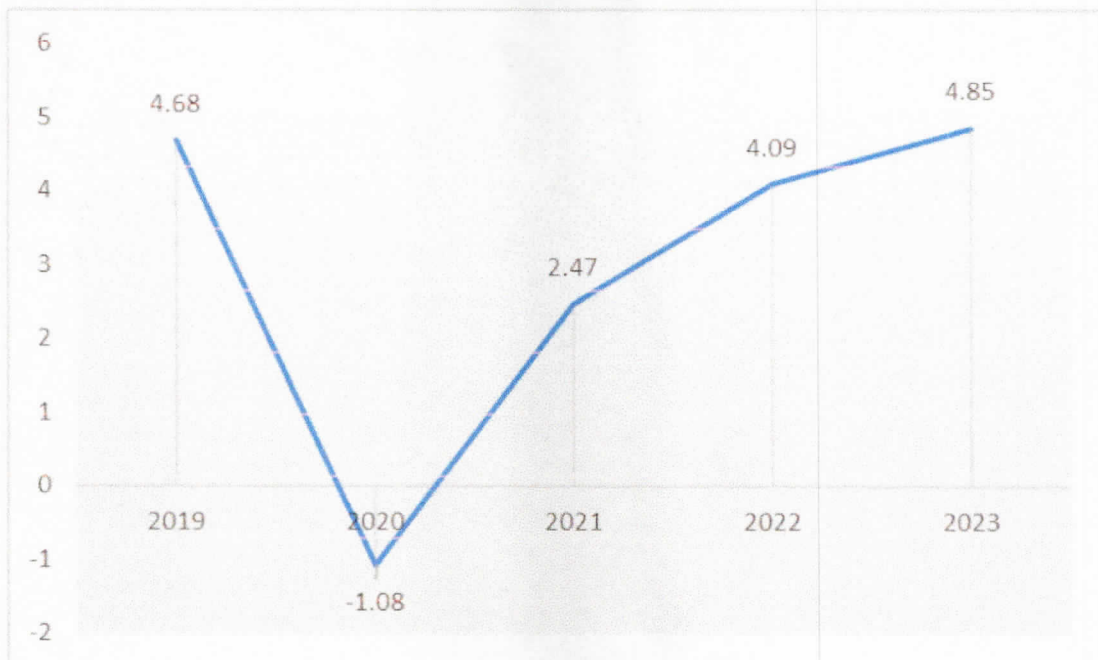
pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp21.869.000, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada 2021 dengan peningkatan PDRB per kapita menjadi Rp22.730.000. Tren positif ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya, mencapai Rp24.301.000 pada 2022 dan Rp25.974.000 pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan pertumbuhan aktivitas produktif masyarakat, yang berkontribusi terhadap kenaikan kesejahteraan dan daya beli secara keseluruhan.

Tabel 2.3 PDRB Perkapita Kabupaten Cirebon

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB Perkapita (Rp)	22.506.000	21.869.000	22.730.000	24.301.000	25.974.000

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon diolah (2020-2024)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Cirebon menunjukkan dinamika signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, LPE mencapai 4,68%, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi, tercermin dari LPE yang turun drastis ke -1,08%. Setelah melewati masa krisis, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2021 dengan LPE naik menjadi 2,47%. Pemulihan ini terus berlanjut di tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 4,09%, mendekati kondisi sebelum pandemi. Pada tahun 2023, LPE berhasil meningkat lebih tinggi lagi menjadi 4,85%, menandakan perekonomian Kabupaten Cirebon tidak hanya pulih tetapi juga tumbuh lebih kuat. Tren ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pemulihan ekonomi dan kebangkitan sektor-sektor produktif di wilayah tersebut.



Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon 2019–2023

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024)

Dari sisi pengeluaran, produk yang dikonsumsi di wilayah Kabupaten Cirebon masih didominasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (lebih dari 85 persen). Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga

mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi mendekati 30 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah 7 persen. Pengeluaran konsumsi LNPRT memiliki peran yang relatif kecil sekitar 1 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Tabel 2.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cirebon (Persen), 2019-2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	89,90	89,16	88,99	87,58	90,03
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,97	1,91	1,87	1,85	2,01
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,15	7,12	7,11	6,59	6,33
Pembentukan Modal Tetap	32,72	29,67	29,69	29,00	27,94
Perubahan Inventori	3,50	1,67	-0,91	0,21	0,16
Net Ekspor Impor Antar Daerah	-35,25	-29,53	-26,74	-25,23	26,47

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024)

2. Ekspor Non Migas Daerah

Data realisasi ekspor per komoditi Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini. Total ekspor non migas daerah selama tahun 2022 sebesar USD 267,7 juta dolar. Dari jumlah tersebut disumbang oleh 3 (tiga) komoditas besar, yaitu furnitur rotan sebesar USD 66,6 juta dolar (24,9%), arang briket sebesar USD 63,6 juta dolar (23,7%), dan benang sebesar USD 36,7 juta dolar (13,7%). Sedangkan sisanya dari komoditas lain seperti furnitur aluminium, sepatu, ubi jalar, dan komoditas lainnya.

Tabel 2.5 Realisasi Ekspor Kabupaten Cirebon tahun 2022

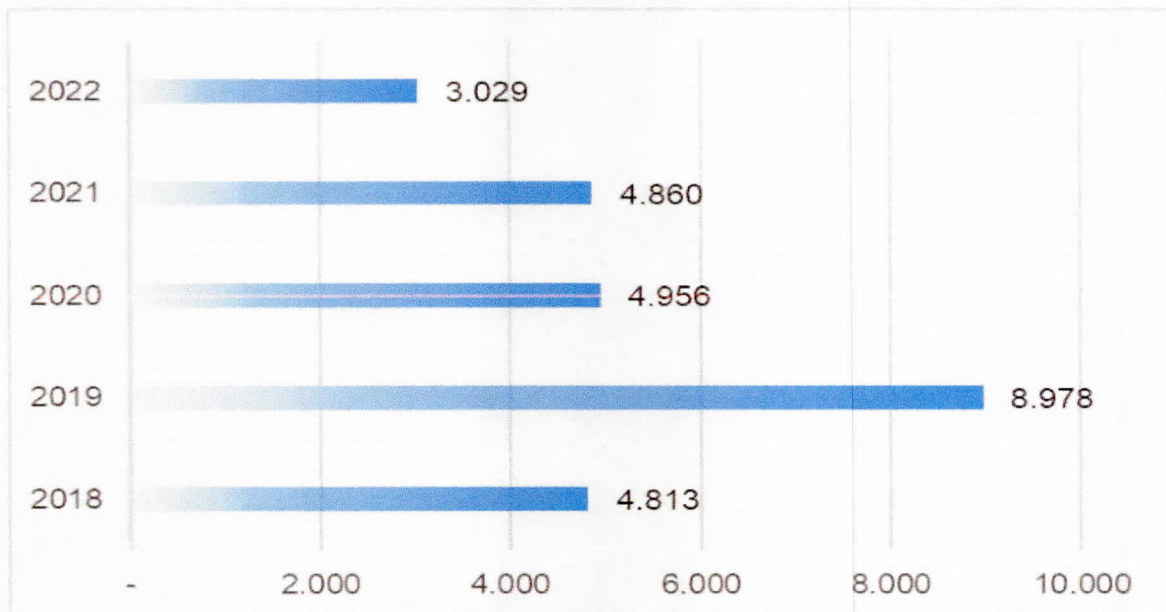
No.	Komoditi	Volume Container	Nilai Ekspor (USD)	Tujuan Ekspor
1.	Furnitur Rotan	2.532	66,569,793.49	Amerika Serikat, UEA, Brasil, Inggris, Kanada, Australia, Afrika Selatan dan Jepang
2.	Briket arang	966	63,571,330.30	Irak, Afrika Selatan, Arab Saudi dan Turki
3.	Benang	-	36,674,476.05	Filipina, Thailand, Jepang, Malaysia dan Brasil
4.	Komoditas lainnya	279	100,916,119.65	Inggris, Australia, Amerika Serikat, Korea, Thailand, Filipina, Jepang, Kanada, dll
Total			267,731,719.49	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon diolah (2023)

Data impor Kabupaten Cirebon untuk saat ini belum tersedia. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan pelaporan, proses pengumpulan data yang masih berlangsung, atau kebijakan terkait publikasi data perdagangan di tingkat kabupaten. Data impor umumnya dikelola di tingkat provinsi atau nasional, sehingga ketersediaannya di tingkat kabupaten bisa saja lebih terbatas atau belum terintegrasi secara penuh.

3. Penanaman Modal

Salah satu indikator ekonomi yang dapat menjadi indikator untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari nilai penanaman modal yang masuk pada suatu wilayah. Nilai penanaman modal Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir seperti disajikan pada tabel berikut ini. Persentase penanaman modal didominasi oleh investasi PMA yang mencapai rata-rata sebesar 85 persen. Realisasi penanaman modal pada tahun 2019 menjadi tertinggi dengan nilai investasi sebesar Rp8,98 triliun. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2022 dengan nilai investasi sebesar Rp3,03 triliun. Berikut disajikan nilai realisasi investasi di Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.10 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Cirebon Tahun 2018–2022 (dalam miliar rupiah)

Sedangkan nilai investasi industri pada komoditi unggulan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir seperti disajikan pada tabel berikut ini. Rata-rata terjadi peningkatan nilai investasi sektor industri sebesar 2,3% setiap tahunnya. Investasi pada komoditi meuble/kerajinan rotan menempati urutan teratas sebesar 63% dari total investasi di sektor industri unggulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komoditi tersebut dianggap menguntungkan. Investasi terendah ditemukan komoditi emping melinjo dengan investasi sekitar Rp885 juta rupiah dan cenderung stagnan pada setiap tahunnya.

Tabel 2.6 Nilai Investasi Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon (ribu rupiah), 2019-2023

Komoditi Unggulan	2019	2020	2021	2022	2023
Mebel/ Kerajinan Rotan	332.041.634	333.301.634	338.301.159	343.375.676	348.526.311
Mebel Kayu	65.829.200	72.599.200	73.688.188	74.793.511	75.541.446
Emping Melinjo	881.963	881.963	883.727	885.494	886.380
Roti dan Makanan Ringan	24.916.427	27.141.427	27.548.548	32.782.773	37.372.361
Batu Alam	11.921.404	11.921.404	11.421.404	11.421.404	11.444.247
Sandal Karet	2.232.719	2.232.719	2.232.719	2.232.719	2.234.952
Batik	39.003.094	39.203.094	39.281.500	39.360.063	39.556.864
Konveksi	40.936.975	48.461.975	49.188.905	50.123.494	52.078.310
Kerajinan Kulit Kerang	1.363.250	1.363.250	1.363.250	1.363.250	1.367.340
Total	519.126.666	537.106.666	543.909.400	556.338.384	569.008.209

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024)

4. Kondisi Sektor Industri Kabupaten Cirebon

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Sektor industri memiliki potensi yang besar dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung stabil. Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Cirebon yang menempati urutan pertama sebagai sektor yang berkontribusi besar dalam perekonomian daerah. Jumlah IKM pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,6%. Jumlah IKM pada tahun 2022 menjadi yang tertinggi yaitu sebanyak 15.467 unit. Sedangkan jumlah industri besar ada di Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir yaitu sebanyak 141 unit.

Tabel 2.7 Jumlah Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kabupaten Cirebon

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Unit	14.526	14.844	15.014	15.239	15.467
2.	Jumlah Industri Besar	Unit	141	141	141	141	141

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon (2018–2022)

Jumlah perusahaan industri berdasarkan komoditi unggulan di Kabupaten Cirebon selama lima tahun terus mengalami peningkatan walau tidak signifikan. Jumlah perusahaan berdasarkan komoditi unggulan daerah pada tahun 2023 mencapai 5.960 unit. Untuk jenis industri di wilayah Kabupaten Cirebon memiliki 9 jenis komoditi unggulan, diantaranya kerajinan rotan, mebel kayu, emping melinjo, makanan ringan, batu alam,

sandal karet, batik, konveksi dan kerajinan kulit kerang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2023

No.	Komoditi Unggulan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mebel/Kerajinan Rotan	1.478	1.480	1.502	1.525	1.520
2.	Mebel Kayu	1.384	1.407	1.428	1.450	1.441
3.	Emping Melinjo	166	166	167	167	167
4.	Roti dan Makanan Ringan	878	886	899	1.070	1.245
5.	Batu Alam	347	347	271	271	271
6.	Sandal Karet	23	23	23	23	19
7.	Batik	594	595	597	597	597
8.	Konveksi	659	678	688	701	691
9.	Kerajinan Kulit Kerang	8	8	8	8	8
Total		5.537	5.590	5.583	5.812	5.960

Sumber: data sekunder BPS Kabupaten Cirebon diolah (2024)

Pada ruang lingkup industri di Kabupaten Cirebon, sektor industri rotan menjadi sektor yang paling besar memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi di Kabupaten Cirebon selain industri kreatif lainnya. Hal ini perlu terus dijaga dan dikembangkan agar industri rotan di Kabupaten Cirebon bisa meningkat dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembentukan PDRB Kabupaten Cirebon di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.9 Nilai Produksi Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon (ribu rupiah), 2019-2023

Komoditi Unggulan	2019	2020	2021	2022	2023
Mebel/ Kerajinan Rotan	2.299.374.990	2.314.593.630	2.349.312.534	2.384.552.222	2.420.320.506
Mebel Kayu	386.770.869	393.207.251	394.386.873	395.570.033	396.756.743
Emping Melinjo	23.122.114	23.122.114	23.468.946	23.820.980	24.178.295
Roti dan Makanan Ringan	405.375.736	408.751.343	414.882.613	493.710.310	552.955.547
Batu Alam	182.015715	182.813.030	172.513.020	172.513.020	172.858.046
Sandal Karet	4.654.510	4.455.850	4.455.850	172.513.020	4.460.306
Batik	83.897.693	84.039.409	85.300.000	86.579.500	87.445.295
Konveksi	41.536.737	42.234.864	42.361.569	43.124.077	43.900.310
Kerajinan Kulit Kerang	12.855.000	12.855.000	12.855.000	43.124.077	12.867.855
Total	3.439.603.364	3.466.072.491	3.499.536.405	3.617.180.992	3.715.742.903

Sumber: BPS Kab. Cirebon (2024)

2.2 Sumber Daya Industri

Pengaturan sumber daya industri mengikuti ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Dalam ruang lingkup pengaturan di Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk kedalam pembangunan sumber daya industri, meliputi (a) pembangunan Tenaga Kerja Industri dan penggunaan konsultan Industri; (b) pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam; dan (c) pengadaan dan pemanfaatan Teknologi Industri.

2.2.1 Sumber Daya Alam

1. Sumber Daya Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian dan perkebunan yang menghasilkan tanaman pangan merupakan salah satu sumber daya kompetitif yang ada di Kabupaten Cirebon. Menurut data BPS tahun 2024, sektor pertanian dan perkebunan berkontribusi 14,94% terhadap PDRB Kabupaten Cirebon. Sumber daya pertanian dan perkebunan meliputi tanaman bahan makanan (padi-padian, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan), sayuran dan buah-buahan. Komoditas padi di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu penyumbang terbesar produksi padi di Jawa Barat, yang merupakan provinsi produsen padi terbesar ketiga skala nasional. Adapun komoditas pertanian dan perkebunan Kabupaten Cirebon lainnya seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Komoditas Unggulan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Cirebon

Komoditas	Potensi Luas Tanam (Ha)			Produksi Tahunan (Ton)			Kecamatan
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Padi	92.539	91.382	92.777	703.044	701.059	705.316	Gegesik, Kapetakan, Susukan, Klangeran, Arjawinangun, Sumber, Ciwaringin, Dukupuntang, Palimanan, Suranenggala, Susukan, Panguragan dan Kaliwedi
Kacang Hijau	1.860	2.057	2.050	1.955	1.541	1.787	Waled, Ciwaringin, Babakan, Susukan, Arjawinangun, Gempol, Palimanan dan Pasaleman
Bawang Merah	3.384	3.761	3.121	334.636	400.244	343.019	Waled, Pabuaran, Babakan, Gebang, Pabedilan, Pangenan, Losari dan Ciledug
Cabe Besar	631	675	373	56.439	58.828	28.845	Waled, Losari, Subang, Pangenan, Gempol, Susukan, Pasaleman, Ciledug dan Pabedilan
Mangga	-	-	-	494.262	433.515	430.997	Sedong, Beber, Greged, Susukan Lebak, Lemahabang, Dukupuntang, dan Sumber
Jambu Biji	-	-	-	28.024	17.681	12.208	Panguragan, Ciwaringin, Gegesik, Klangeran dan Suranenggala
Tebu	3.671	4.167	3.450,75	15.266	20.556	16.421,92	Sumber, Dukupuntang, Palimanan, Susukan, Jamblang Plumbon, Klangeran dan Gempol

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon diolah (2024)

Selain komoditas pertanian berupa padi, produk perkebunan dari Kabupaten Cirebon seperti mangga dan tebu juga menjadi komoditas yang paling besar berkontribusi terhadap peningkatan produksi sektor perkebunan.

2. Sumber Daya Peternakan

Selain sumber daya pertanian dan perkebunan, sumber daya peternakan juga dapat menjadi salah satu sektor yang dapat dikembangkan pada skala industri di Kabupaten Cirebon. Terdapat dua jenis komoditas utama sektor peternakan Kabupaten Cirebon: hewan ruminansia berupa sapi, domba, kerbau, dan hewan unggas berupa itik dan ayam. Ringkasan produksi komoditas peternakan ruminansia dan unggas di Kabupaten Cirebon disajikan pada dua tabel berikut:

Tabel 2.11 Komoditas Unggulan Sektor Peternakan (Ruminansia)

Komoditas	Populasi (Ekor)				Kecamatan
	2020	2021	2022	2023	
Sapi	4.785	5.293	4.444	4.273	Gunungjati, Mundu, Babakan, Gegesik, Waled, Karangsembung, Losari, Beber,
Kambing	18.451	21.028	19.701	21.672	Ciwaringin, Gempol, Dukupuntang, Plumbon, Klangean, Arjawinangun
Domba	297.031	307.537	309.584	309.868	Talun, Gempol, Sumber, Klangean, Sedong, Dukupuntang, Pabedilan, Ciwaringin,
Kerbau	3.237	3.169	2.465	1.819	Depok, Plumbon, Ciledug, Gebang, Karangwareng, Plered, Arjawinangun, Beber, Kapetakan

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon diolah (2024)

Populasi domba mendominasi peternakan ruminansia dengan jumlah sebanyak 309.868 ekor pada tahun 2023. Disusun oleh kambing dan sapi dengan jumlah sebanyak 21.672 dan 4.273 ekor. Sedangkan pada hewan unggas didominasi oleh ayam pedaging dengan populasi mencapai 3.316.846 ekor, disusul oleh ayam buras dengan jumlah 1.385.888 di tahun 2023.

Tabel 2.12 Komoditas Unggulan Hewan Unggas di Kabupaten Cirebon

Komoditas	Populasi (Ekor)		Produksi Daging (kg)		Produksi Telor (kg)		Kecamatan
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Itik	926.094	888.539	672.873	654.891	5.599.282	4.230.065	Kapetakan, Gebang, Losari
Ayam Pedaging	3.196.000	3.316.846	25.139.736	25.097.787	-	1.187.869	Panguragan, Gunungjati, dan Susukan
Ayam Petelur	74.000	77.100	81.165	71.800	996.681	881.684	Dukupuntang, Ciledug, Talun
Ayam Buras	1.382.023	1.385.888	1.416.513	1.423.220	2.958.434	2.972.441	-

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon diolah (2024)

3. Sumber Daya Perikanan

Secara topografi Kabupaten Cirebon berada pada ketinggian 0-130 m dan berada sepanjang Pantai Utara Jawa yang memiliki potensi kelautan yang menghasilkan sumber daya ikan cukup besar. Subsektor perikanan termasuk dalam salah satu lapangan usaha yang berkontribusi besar bagi struktur perekonomian Cirebon, selain subsektor pertanian dan industri pengolahan.

Potensi perikanan memberikan peluang untuk masyarakat sekitar pesisir mengelola hasil laut dan digunakan sebagai mata pencaharian penduduk sekitar. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Cirebon, produksi sektor perikanan tangkap kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi antara 2019 hingga 2023. Setelah sedikit meningkat pada 2020, produksi melonjak pada 2021, mencapai angka tertinggi 42.251 ribu ton. Namun, pada 2022 terjadi penurunan menjadi 38.983 ribu ton, dan pada 2023 terjadi penurunan drastis menjadi hanya 10.149,4 ribu ton. Penurunan yang tajam pada 2023 menunjukkan adanya tantangan besar dalam sektor ini, yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim, overfishing, atau masalah manajemen perikanan.

Tabel 2.13 Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Cirebon

No.	Produksi	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perikanan Tangkap	36,031	36,113	42,251	38,983	10.149,40
2.	Perikanan Budidaya	48,410	41,158	38,284	17,715	42.878,15
3.	Produksi Garam	135,965	2,671	1,204	908	73.424,15

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka 2024

Selain menghasilkan perikanan tangkap dan budidaya, Kabupaten Cirebon juga dikenal sebagai produsen garam di Jawa Barat. Total luas kawasan garam di Kabupaten Cirebon hingga tahun 2023 mencapai 1.242 hektar dengan jumlah petambak garam sebanyak 924 orang. Dari jumlah tersebut produksi garam cenderung mengalami penurunan yang sangat signifikan yang pada tahun 2022 hanya sebesar 73.424,15 ton.

4. Sumber Daya Pertambangan

Kabupaten Cirebon, memiliki potensi bahan galian berupa Andesit di Ciwaringin; Batugamping di Gunung Kromong, Palimanan; dan Lempung di Gunung Kromong, Palimanan. Saat ini pemanfaatan sumber daya pertambangan di Kabupaten Cirebon didominasi oleh industri pertambangan non-logam. Hal ini dikarenakan banyaknya pengrajin dan industri batu alam dengan skala UKM.

Seiring kenaikan pertumbuhan industri properti di Indonesia, industri batu alam di wilayah Cirebon pun diprediksi ikut tumbuh. Banyaknya sumber bahan baku industri batu alam yang berasal dari wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya turut meningkatkan daya saing sektor industri tersebut. Beberapa varian batu alam yang menjadi komoditas utama industri ini adalah batu andesit, batu palimanan, batu templek, dan batu candi. Adapun data sumber daya terkait industri batu alam adalah sebagai berikut:

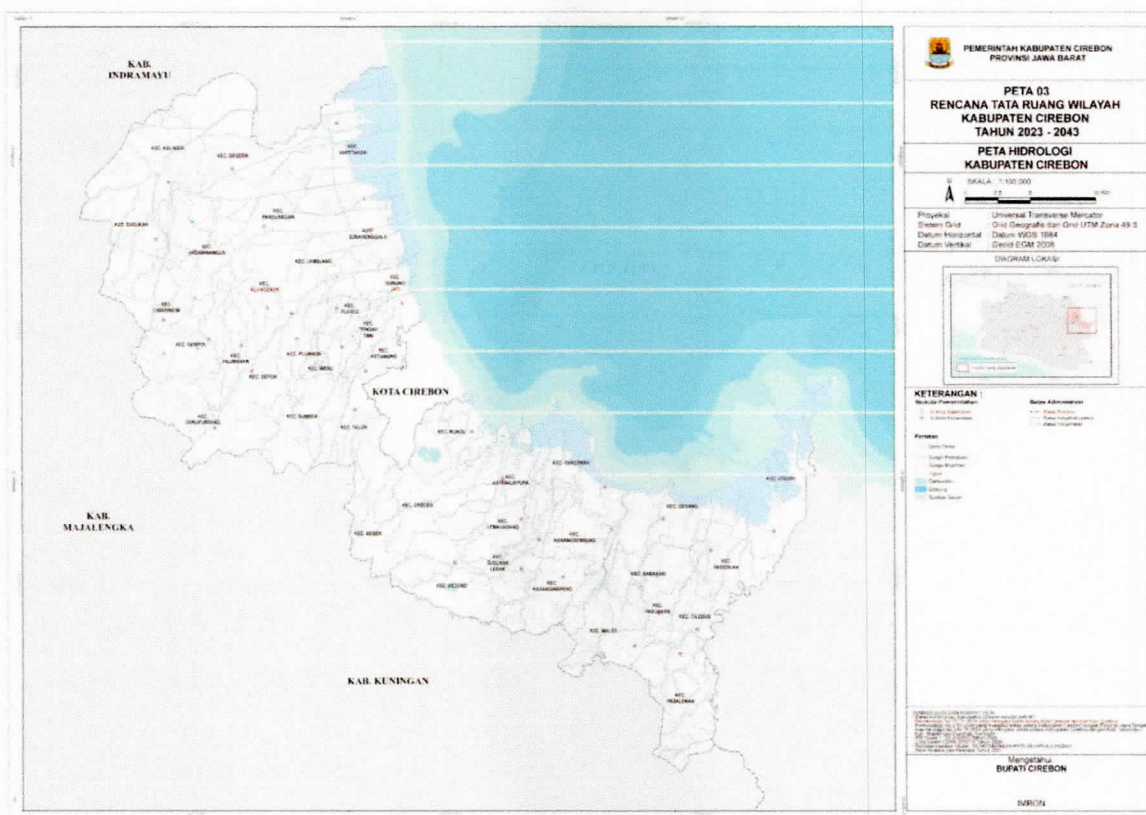
Tabel 2.14 Data Industri Pertambangan Non-Logam di Kabupaten Cirebon

Aspek Sumber Daya	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Tenaga Kerja	2.051	2.072	2.072
Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	11,2	11,3	11,3
Kapasitas Produksi (Ribuan Ton)	5,1	5,2	5,2
Nilai Produksi (Milyar Rupiah)	181	182,8	182,8

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka 2024

5. Sumber Daya Air

Sumber-sumber daya air yang ada di Kabupaten Cirebon berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Sumber air permukaan berasal dari beberapa sungai besar seperti Sungai Cisanggarung, Sungai Ciwaringin, Sungai Cimanis, Sungai Cipager, Sungai Kumpul Kuista dan Sungai Jamblang. Selain itu terdapat sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari sungai-sungai besar yang berhulu di bagian selatan. Sungai-sungai besar yang ada membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Cisanggarung dan DAS Cimanuk Hilir. Dalam menganalisa sumber daya air, kondisi air tanah seperti salinitas, ketersediaan, dan kedalaman, pun perlu diperhitungkan. Gambar 2.6 menunjukkan peta DAS dan kondisi air tanah di Kabupaten Cirebon.

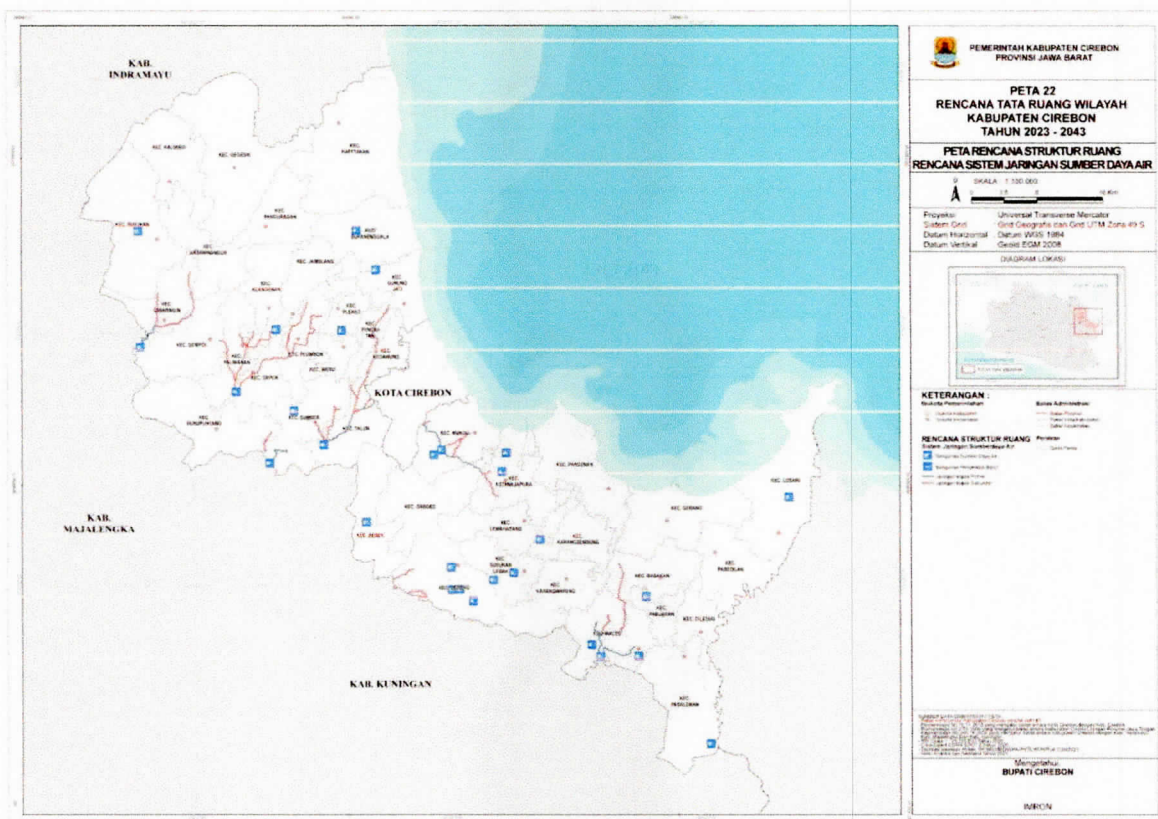


Gambar 2.11 Peta Hidrologi Wilayah Kabupaten Cirebon
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon

Sumber daya air disalurkan kepada warga dan pengguna melalui dua cara, yaitu PDAM dan irigasi. Pengguna PDAM adalah jenis pelanggan rumah tangga dengan persentasenya mencapai 96,37% atau sebanyak 32.254

rumah tangga. Pelanggan kedua terbanyak berjenis sosial yang mencapai 1,45% atau sebanyak 484 pelanggan. Adapun pelanggan yang paling sedikit adalah dari jenis industri dengan persentase sebesar 0,01% atau sebanyak 2 pelanggan.

Pengaliran air melalui irigasi di Kabupaten Cirebon dibagi menjadi 2 jenis: teknis dan non- teknis (Sederhana). Jalur irigasi teknis, baik primer maupun sekunder, yang berada dalam kondisi baik adalah sepanjang 70 kilometer, sedangkan yang dalam kondisi rusak ringan/berat adalah sepanjang 11 kilometer. Untuk jalur non-teknis, saluran irigasi dalam kondisi baik ada sepanjang 29 kilometer, sedangkan yang berada dalam kondisi rusak ringan/berat sepanjang 7 kilometer. Jalur irigasi di Kabupaten Cirebon diatur oleh 85 unit bangunan irigasi dan menyokong operasional sawah seluas 10.103 Hektar. Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Cirebon seperti disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.12 Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Cirebon
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon sedang menyusun rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibagi menjadi 3 zonasi: Mundu, Arjawinangun, dan Plumbon. Perhitungan alokasi kebutuhan air per kecamatan (dibagi per tiap zonasi), diambil dari Kajian SPAM Regional Metropolitan Cirebon Raya, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15 Alokasi Kebutuhan Air per Zonasi Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Zonasi	Proyeksi Kebutuhan Air s/d 2034 (l/detik)	Alokasi Kebutuhan Air	Total Kebutuhan per Zona
1.	Mundu	Mundu	153	135	
2.	Pangenan	Mundu	89	80	320
3.	Astanajapura	Mundu	122	105	
4.	Plumbon	Plumbon	120	105	
5.	Weru	Plumbon	111	95	
6.	Plered	Plumbon	86	75	435
7.	Tengahatani	Plumbon	62	55	
8.	Kedawung	Plumbon	118	105	
9.	Arjawinangun	Arjawinangun	n.a	n.a	
10.	Ciwaringin	Arjawinangun	n.a	n.a	
11.	Gegesik	Arjawinangun	n.a	n.a	n.a
12.	Kaliwedi	Arjawinangun	n.a	n.a	
13.	Susukan	Arjawinangun	n.a	n.a	

Berdasarkan tabel alokasi kebutuhan air dan data air curah yang tersedia, jelas bahwa pada kondisi sekarang hanya sekitar 30% kebutuhan air yang mampu dipenuhi di Kabupaten Cirebon. Untuk mengatasi isu tersebut, sedang dilakukan studi kelayakan untuk menyuplai sisa kebutuhan air dari Bendungan Jatigede, dengan debit sebesar 900 liter/detik yang akan sepenuhnya beroperasi pada tahun 2030. Kajian pemenuhan kebutuhan air dari Bendungan Jatigede ini diperlukan karena kondisi air tanah Kabupaten Cirebon sendiri dinilai kurang layak untuk konsumsi harian. Berdasarkan data Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, air tanah di Kabupaten Cirebon masih bersifat payau sampai dengan kedalaman 150 meter. Maka dari itu, perancangan SPAM Jatigede ini diharapkan mampu menyelesaikan isu tersebut.

2.2.2 Sumber Daya Manusia Industri

Secara umum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang menunjukkan proporsi penduduk di Kabupaten Cirebon yang tergolong angkatan kerja, mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Data menunjukkan bahwa TPAK melonjak menjadi 65,53% dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya diangka 58,51%. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di bawah TPAK Provinsi Jawa Barat 2022 yang mencapai 66,15%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cirebon menunjukkan tren penurunan, dari 9,21% pada tahun 2019 menjadi 7,65% pada tahun 2023. Meskipun demikian, angka tersebut masih tinggi dibandingkan TPT provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,31%, apalagi TPT nasional yang mencapai 5,86%. Tingkat pengangguran yang tinggi ikut menyumbang tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.16 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon 2019–2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	58,45	61,25	64,49	65,53	66,16
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,21	9,61	10,38	8,11	7,65
Bekerja (jiwa)	832.719	880.807	970.262	1.020.411	1.101.094

Sumber: BPS Kab. Cirebon, diolah (2024)

Analisis terhadap TPT di Kabupaten Cirebon juga menunjukkan bahwa lulusan SMA/SMK menjadi penyumbang terbesar dalam struktur pengangguran dengan kontribusi mencapai 58%. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara keterampilan lulusan sekolah menengah atas dan kebutuhan pasar kerja. Di sisi lain, sebanyak 38% pengangguran berasal dari lulusan pendidikan SMP ke bawah, yang mencerminkan keterbatasan keterampilan dan kualifikasi yang mempersulit mereka untuk bersaing di dunia kerja. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi hanya menyumbang 4% dari total pengangguran, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik. Data ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon.

Salah satu variabel penting dalam penyerapan tenaga kerja industri yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Besaran UMK berpengaruh terhadap keputusan dalam berinvestasi di sektor industri. Berdasarkan tabel 2.6 di bawah ini dirinci besaran UMK Kab/Kota di Jawa Barat pada tahun 2023. Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi merupakan 3 (tiga) daerah di Jawa Barat yang memiliki UMK tertinggi lebih dari Rp5 juta per bulan. Sementara itu, Kota Banjar menjadi daerah dengan UMK terendah di Jawa Barat yaitu sebesar Rp1,9 juta per bulan. Kabupaten Cirebon sendiri menempati urutan ke-21 dari dua puluh tujuh Kab/Kota di Jawa Barat dengan besaran UMK yaitu Rp2,4 juta per bulan.

Tabel 2.17 Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	UMK (Rp)	No.	Kabupaten/Kota	UMK (Rp)
1.	Kab. Karawang	5.176.179,07	15.	Kab. Cianjur	2.893.229,10
2.	Kota Bekasi	5.158.248,20	16.	Kota Sukabumi	2.747.774,86
3.	Kab. Bekasi	5.137.575,44	17.	Kab. Indramayu	2.541.996,72
4.	Kota Depok	4.694.493,70	18.	Kota Tasikmalaya	2.533.341,02
5.	Kota Bogor	4.639.429,39	19.	Kab. Tasikmalaya	2.499.954,13
6.	Kab. Bogor	4.520.212,25	20.	Kota Cirebon	2.456.516,60
7.	Kab. Purwakarta	4.464.675,02	21.	Kab. Cirebon	2.430.780,83
8.	Kota Bandung	4.048.462,69	22.	Kab. Majalengka	2.180.602,90
9.	Kota Cimahi	3.514.093,25	23.	Kab. Garut	2.117.318,31
10.	Kab. Bandung	3.492.465,99	24.	Kab. Kuningan	2.101.734,30
11.	Kab. Bandung Barat	3.480.795,40	25.	Kab. Ciamis	2.021.657,42

No.	Kabupaten/Kota	UMK (Rp)	No.	Kabupaten/Kota	UMK (Rp)
12.	Kab. Sumedang	3.471.134,10	26.	Kab. Pangandaran	2.018.389,00
13.	Kab. Sukabumi	3.351.883,19	27.	Kota Banjar	1.998.119,05
14.	Kab. Subang	3.273.810,60			

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2023

Biaya tenaga kerja yang tinggi akan meningkatkan arus modal keluar (*Foreign Direct Investment*/FDI outflow) dan menurunkan masuknya investasi (FDI). Artinya, biaya tenaga kerja atau upah memiliki hubungan negatif dengan FDI. Penelitian Lai dan Sarkar (2011) juga menemukan hal yang senada dimana upah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap FDI.

Selanjutnya pada aspek penyerapan sumber daya manusia industri di Kabupaten Cirebon dapat dibagi menjadi sembilan bidang yaitu mebel/kerajinan rotan, mebel kayu, emping melinjo, roti dan makanan ringan, batu alam, sandal karet, batik, konveksi, dan kerajinan kulit kerang. Jumlah tenaga kerja industri menurut jenis komoditi unggulan pada tahun 2023 mencapai 14.260 jiwa atau meningkat 4.136 jiwa atau 3,61 persen dibandingkan tahun 2022 sebanyak 114.637 jiwa. Sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja adalah industri sektor komoditi industri mebel/kerajinan rotan dengan jumlah tenaga kerja 65.696 jiwa. Disusul industri roti dan makanan ringan dan industri konveksi dengan masing-masing menyerap tenaga kerja sebanyak 17.370 jiwa dan 14.260 jiwa.

Tabel 2.18 Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2023

No.	Komoditi Unggulan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mebel/Kerajinan Rotan	62.575	62.826	63.768	64.725	65.696
2.	Mebel Kayu	11.481	11.809	11.986	12.166	12.348
3.	Emping Melinjo	1.374	1.374	1.377	1.380	1.382
4.	Roti dan Makanan Ringan	11.975	12.085	12.266	14.597	17.370
5.	Batu Alam	2.072	2.072	1.982	1.982	1.982
6.	Sandal Karet	315	315	315	315	316
7.	Batik	4.629	4.679	4.688	4.698	4.707
8.	Konveksi	13.411	1.353	13.733	13.994	14.260
9.	Kerajinan Kulit Kerang	780	780	780	780	712
Jumlah		108.612	97.293	110.895	114.637	118.773

Sumber: BPS Kab. Cirebon (2024)

2.2.3 Teknologi

Penggunaan teknologi di bidang industri sudah menjadi elemen penting untuk segera dikembangkan. Era globalisasi yang menuntut kecepatan dan pembaruan digital mendorong para pelaku industri untuk memanfaatkan teknologi terbaru untuk menunjang aktivitas mereka. Hal ini bertujuan untuk menjangkau target audiensi yang potensial hingga meningkatkan daya saing di pasaran. Untuk mendukung kebutuhan industri maka pengembangan Kawasan sains dan teknologi di Kabupaten Cirebon perlu diimplementasikan. Saat ini, belum berdasarkan analisis terhadap beberapa dokumen perencanaan belum ada kebijakan ataupun program pengembangan Kawasan

ini. Kedepan pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat perlu untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan Kawasan sains dan teknologi.

Penguatan sumber daya teknologi dalam kaitannya dengan pembangunan industri di Kabupaten Cirebon dapat dikorelasikan dengan keberadaan sekolah (jenjang SMK), perguruan tinggi, dan Balai Litbang. Berdasarkan penelusuran data jumlah SMK di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 yaitu sebanyak 109 unit sekolah dengan jumlah peserta didik sebanyak 59.823. Berdasarkan informasi yang dirangkum dari website sekolah diperoleh informasi bahwa beberapa SMK di Kabupaten Cirebon telah melakukan kerjasama dengan dunia industri dan membuka program kejuruan yang sesuai dengan Industri Kabupaten Cirebon. Bentuk apresiasi dari peserta yang mengikuti program magang yaitu bagi lulusan terbaik berhak mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada perusahaan tersebut.

Sedangkan pada level pendidikan tinggi (PT), kebutuhan sumber daya teknologi di Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari keragaman PT yang ada di Kabupaten Cirebon seperti disajikan pada tabel berikut. Jika dilihat dari sebaran rumpun keilmuan, misalnya rumpun teknologi/Teknik hanya ada di ITB Kampus Cirebon, rumpun humaniora/ekonomi ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'Had Aly dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Ishlah Cirebon, rumpun Kesehatan antara lain Sekolah Tinggi YPIB Cirebon, Politeknik Kesehatan Yakesbi, Akademi Analisis Kesehatan An-Nasher, dan Akademi Keperawatan Buntet Pesantren, serta rumpun Teknik kemaritiman ada di Akademi Maritim Cirebon dan Akademi Maritim Suaka Bahari.

Tabel 2.19 Perguruan Tinggi di Kabupaten dan Kota Cirebon

No.	Nama Perguruan Tinggi	Status	Rumpun Keilmuan
1.	Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Cirebon	PTN	Teknik
2.	Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC)	PTS	Teknik dan Humaniora
3.	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'Had Aly	PTS	Humaniora
4.	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Ishlah Cirebon	PTS	Humaniora
5.	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Invada	PTS	Bahasa
6.	Sekolah Tinggi YPIB Cirebon	PTS	Kesehatan
7.	Politeknik Kesehatan Yakesbi	PTS	Kesehatan
8.	Akademi Analisis Kesehatan An-Nasher	PTS	Kesehatan
9.	Akademi Keperawatan Buntet Pesantren	PTS	Kesehatan
10.	Akademi Maritim Cirebon	PTS	Teknik Kelautan
11.	Akademi Maritim Suaka Bahari	PTS	Teknik Kelautan

Di masa akan datang dalam pengusulan/pembentukan program studi perlu diperhatikan keselarasan dan kesesuaian dengan industri yang berkembang di daerah, khususnya mendirikan PT ataupun program studi Teknik yang dapat. Selanjutnya pada sisi daya dukung keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan yang dimiliki pemerintah perlu juga diperhatikan sebaran dan urgensinya dalam pembangunan dan pengembangan industri di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, rencana Pembangunan Gedung Creative Center di Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan perlu segera diwujudkan. Gedung ini dirancang sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif yang akan menjadi wadah bagi para pelaku industri kreatif lokal untuk berinovasi, berkolaborasi, dan meningkatkan daya saing.

Pembangunan Gedung Creative Center diharapkan dapat mendukung berbagai subsektor ekonomi kreatif seperti seni pertunjukan, desain, kerajinan tangan, kuliner, dan teknologi digital. Selain itu, fasilitas ini akan dilengkapi dengan ruang kerja bersama (*co-working space*), studio kreatif, galeri pameran, serta ruang pelatihan dan workshop. Pembangunan ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor kreatif yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah. Dengan adanya Gedung Creative Center, diharapkan Kabupaten Cirebon dapat menjadi salah satu pusat ekonomi kreatif di kawasan Rebana, mendukung inovasi lokal, dan memperkuat identitas budaya daerah.

2.2.4 Akses Pembiayaan

Akses pembiayaan adalah sumber dana yang didapat oleh pelaku usaha selama menjalankan usahanya, untuk membiayai kegiatan industrinya. Jumlah lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Cirebon terdiri dari 5 (lima) bank milik pemerintah dan 1 (satu) pemerintah daerah, dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) unit lainnya berupa bank swasta dan BPR. Menurut data BPS Kabupaten Cirebon tahun 2022 dilaporkan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan pada pelaku usaha di Kabupaten Cirebon sebesar Rp2,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 7% dibandingkan pembiayaan pada tahun 2021.

Untuk memfasilitasi pelaku usaha di Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah membentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Kabupaten Cirebon yang merupakan hasil penggabungan 12 (dua belas) Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon¹. Jumlah jaringan kantor Perumda BPR Kabupaten Cirebon sampai tahun 2023 berjumlah 1 (satu) Kantor Pusat, 12 (dua belas) Kantor Cabang, 2 (dua) Kantor KAS². Berdasarkan laporan keuangan Perumda BPR Kabupaten Cirebon tahun 2020, jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat berjumlah Rp 307,9 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp281,2 miliar.

Selain akses pembiayaan, industri di Kabupaten Cirebon juga mendapat dukungan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah (BI-KPW) Cirebon dalam bentuk memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pembiayaan melalui program *Business Matching* guna pengembangan produk³.

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan di Kabupaten Cirebon dan Rapat Kuasa Pemilik Modal Luar Biasa KPMLB tanggal 7 Oktober 2019 serta Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP156/D.03/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger)

² <https://www.bankbkc.co.id/profile>

³ <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s40son457/bi-pertemuan-umkm-di-cirebon-dengan-lembaga-pembiayaan>

2.3 Sarana dan Prasarana Industri

2.3.1 Jalan

Keberadaan sarana penghubung di Kabupaten Cirebon relatif cukup baik dilihat dari kondisi jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan negara. Tingkat pengelolaan jalan untuk kategori jalan kabupaten tahun 2022 membentang sepanjang $\pm 1.240,3$ Km yang terdiri atas 564 ruas jalan. Secara umum jalan yang ada di Kabupaten Cirebon berkualitas baik dengan panjang jalan yang berkondisi baik sekitar $\pm 690,96$ km (tahun 2022). Adapun jalan-jalan yang berkondisi sedang sekitar $\pm 352,34$ km, kondisi rusak $\pm 96,14$ km, dan $\pm 100,86$ km berkondisi rusak berat. Untuk kondisi jalan yang diaspal sepanjang 1139,44 km, dibeton 17,52 km, dan kondisi tanah sepanjang 2,18 km. Jumlah jembatan dengan kondisi baik 433 unit, kondisi rusak ringan 13 unit dan jembatan rusak berat 2 unit. Gambar 2.13 menunjukkan Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Cirebon.

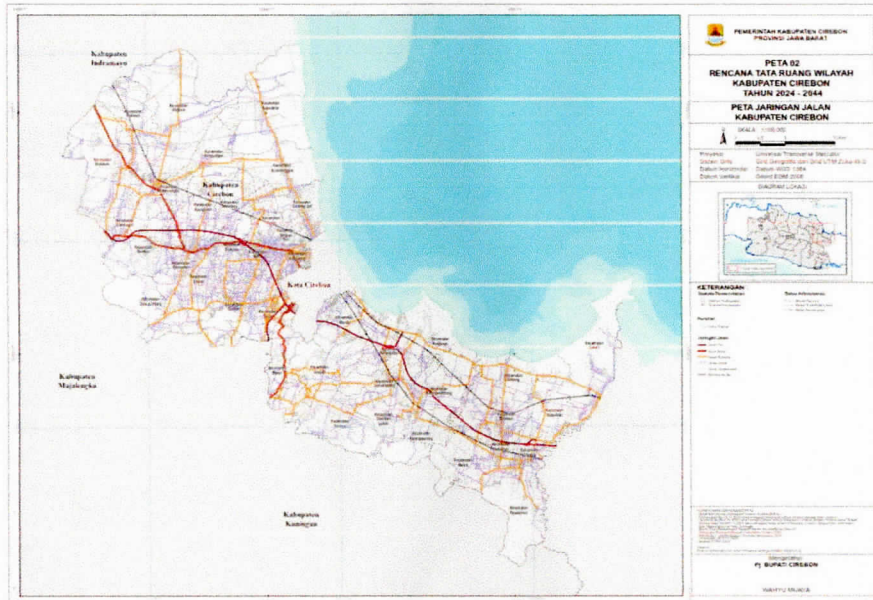
Tabel 2.20 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Tahun 2018–2022

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kondisi Baik	120,95	221,55	694,21	645,68	690,96
2.	Kondisi Sedang	115,22	323,76	339,18	392,81	352,34
3.	Kondisi Rusak Ringan	221,88	60,74	137,51	99,37	96,14
4.	Kondisi Rusak Berat	189,51	41,51	69,40	102,45	100,86

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Cirebon

Selain Jalan Kabupaten, berdasarkan data Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon (tahun 2022) dalam wilayah Kabupaten Cirebon terdapat juga jalan yang dikelola oleh provinsi (Jalan Provinsi) yaitu 16 ruas jalan sepanjang 72,37 km dan jalan yang dikelola oleh negara (Jalan Negara) yaitu 11 ruas jalan sepanjang 97,54 km.

Kabupaten Cirebon sudah merencanakan untuk membangun dan memperkuat jaringan jalan dan jembatan sebagai salah satu infrastruktur utama untuk mempercepat pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat. Peta jaringan jalan di Kabupaten Cirebon seperti disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.13 Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Cirebon
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon

Dalam RTRW Kabupaten Cirebon terbaru disebutkan bahwa upaya untuk perwujudan badan jalan⁴ meliputi operasi dan pemeliharaan badan jalan dan prasarana badan jalan; dan pengelolaan sistem jaringan jalan. Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar wilayah salah satunya melalui:

1. pengembangan jaringan jalan nasional berupa Jalan Tol baru, pengembangan jaringan jalan nasional bukan Jalan Tol yang sudah ada; dan
2. mengembangkan sistem jaringan Jalan Kolektor Primer serta mengintegrasikan pusat kegiatan regional dan pusat-pusat pertumbuhan.

2.3.2 Rel Kereta Api

Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur kereta api Cirebon- Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon – Semarang – Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon – Yogyakarta – Surabaya). Pada saat ini Kementerian Perhubungan sedang melakukan pembangunan jalur ganda (*double track*) di Pulau Jawa yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024⁵.

Dalam RTRW Kabupaten Cirebon terbaru disebutkan bahwa sistem jaringan kereta api di Kabupaten Cirebon terdiri atas jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api. Jaringan jalur kereta api terdiri atas jaringan jalur kereta api antar kota dan jaringan jalur kereta api khusus. Jaringan jalur kereta api antar kota meliputi:

- a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubungkan Arjawinangun – Kadipaten
- b. Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota menghubungkan Cirebon – Kadipaten
- c. Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota menghubungkan Cikampek – Cirebon
- d. Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota menghubungkan Cirebon – Kroya

⁴ bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan

⁵ https://mediaindonesia.com/ekonomi/371268/jalur-ganda-kereta-api-cirebon-surabaya-rampung-2024#google_vignette

- e. Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota menghubungkan Cirebon – Prupuk
- f. Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota menghubungkan Cirebon – Semarang

Sedangkan jaringan jalur kereta api khusus berupa kereta api kecepatan tinggi Pulau Jawa menghubungkan Jakarta – Surabaya. Adapun stasiun-stasiun kereta api dari Daop III CN yang terletak di wilayah Kabupaten Cirebon sendiri diantaranya adalah:

- a. Stasiun Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun;
- b. Stasiun Babakan berada di Kecamatan Babakan;
- c. Stasiun Bangoduwa berada di Kecamatan Klangeran;
- d. Stasiun Cangkring berada di Kecamatan Weru.
- e. Stasiun Ciledug berada di Kecamatan Ciledug;
- f. Stasiun Gunung Giwur berada di Kecamatan Dukupuntang;
- g. Stasiun Kaliwedi berada di Kecamatan Kaliwedi;
- h. Stasiun Karangsuwung berada di Kecamatan Panguragan;
- i. Stasiun Losari berada di Kecamatan Losari;
- j. Stasiun Luwung berada di Kecamatan Mundu;
- k. Stasiun Sindanglaut berada di Kecamatan Lemahabang; dan
- l. Stasiun Waruduwur berada di Kecamatan Astanajapura.

2.3.3 Pelabuhan

Arus keluar masuk barang melalui laut yang utama bagi Kabupaten Cirebon adalah melalui Pelabuhan Cirebon yang dioperasikan oleh PT Pelindo II. Pelabuhan Cirebon terletak di Kota Cirebon, di pantai utara Jawa Barat, kurang lebih 250 km dari Jakarta ke arah timur. Posisi geografis terletak pada koordinat: 060 42' 55,6" Lintang Selatan; 1080 34' 13,89" Bujur Timur. Pelabuhan Cirebon didukung oleh kedalaman kolam sampai -6,5 m LWS. Sedangkan kapal yang memiliki draft lebih dapat dilayani di daerah lego jangkar kurang lebih 5 - 10 km lepas pantai. Dengan luas 51 ha Daerah Lingkungan Kerja dan 25 ha Daerah Lingkungan Kepentingan, serta perairan Pelabuhan seluas 8.410,91 ha, Pelabuhan Cirebon diharapkan bisa menampung segala kebutuhan dalam mendukung kegiatan bongkar muat barang. Tabel 2.21 hingga Tabel 2.23 menunjukkan fasilitas dermaga dan fasilitas penumpukan yang ada di Pelabuhan Cirebon.

Tabel 2. 21 Fasilitas Pelabuhan Cirebon
Fasilitas : Alur Pelabuhan Laut

No.	Lokasi	Spesifikasi Teknis			Kedalaman (mLWS)
		Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	
Fasilitas : Alur Pelabuhan Laut					
1.	Alur Pelabuhan Cirebon	2.500,00	70,00	175.000,00	- 6,00
Fasilitas : Kolam Pelabuhan					
1.	Kolam Muarajati				
	D. Muarajati I – III	335,00	30,00	10.650,00	-6,00
2.	Kolam Pelabuhan I				
	S. Sumantri I – V	67,50	15,00	1.012,50	-3,50
3.	Kolam Pelabuhan II				
	a. Muarajati II	248,00	20,00	4.960,00	-6,00
	b. Linggarjati I	131,00	20,00	2.620,00	-6,00
	c. Linggarjati II	40,00	10,00	400,00	-6,00

No.	Lokasi	Spesifikasi Teknis			Kedalaman
		Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	(mLWS)
	d. Pelita I	30,00	20,00	600,00	-5,50
	e. Pelita II	38,00	20,00	760,00	-5,50
	f. Pelita III	30,00	20,00	600,00	-5,50
Kolam Khusus Pelra					
1.	Dermaga Pelra	150,00	10,00	1.500,00	-3,00
Fasilitas : Breakwater					
1.	Pelabuhan Cirebon	1.406,00			

Tabel 2.22 Fasilitas Dermaga Pelabuhan Cirebon

No.	Dermaga	Jenis	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Kedalaman	
						Aktual	Desain
1.	Dermaga Samadikun	Deck On Pile	67,00	10,00	670,00	-5,00	-4,00
2.	Dermaga Pemiagaan I	Deck On Pile	11,00	5,00	55,00	-5,00	-3,00
3.	Dermaga Pemiagaan II	Deck On Pile	11,00	6,00	66,00	-5,00	-3,00
4.	Dermaga Pemiagaan III	Deck On Pile	11,00	5,00	55,00	-5,00	-3,00
5.	Dermaga Pemiagaan IV	Deck On Pile	11,00	5,00	55,00	-5,00	-3,00
6.	Dermaga S. Sumantri I	Deck On Pile	11,00	5,00	55,00	-5,00	-3,50
7.	Dermaga S. Sumantri II	Deck On Pile	11,00	5,00	55,00	-5,00	-3,50
8.	Dermaga S. Sumantri III	Deck On Pile	24,00	6,00	144,00	-5,00	-3,50
9.	Dermaga S. Sumantri IV	Deck On Pile	11,00	6,00	66,00	-5,00	-3,50
10.	Dermaga S. Sumantri V	Deck On Pile	11,00	6,00	66,00	-5,00	-3,50
11.	Dermaga Muara Jati I	Deck On Pile	275,00	14,00	3.850,00	-6,50	-6,00
12.	Dermaga Muara Jati II	Sheet Pile	248,00	12,00	2.976,00	-6,00	-6,00
13.	Dermaga Muara Jati III	Deck On Pile	80,00	15,00	1.200,00	-6,50	-6,00
14.	Dermaga Linggar Jati I	Sheet Pile	131,00	15,00	1.965,00	-6,00	-6,00
15.	Dermaga Linggar Jati II	Sheet Pile	40,00	3,00	120,00	-6,00	-6,00
16.	Dermaga Pelita I	Deck On Pile	30,00	12,00	360,00	-5,50	-5,50
17.	Dermaga Pelita II	Deck On Pile	38,00	12,00	456,00	-5,50	-5,50
18.	Dermaga Pelita III	Deck On Pile	30,00	12,00	360,00	-5,50	-5,50

Pelabuhan Cirebon juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas tambahan terdedikasi, seperti terminal curah kering (daya tampung sekitar 60.000 ton), terminal minyak sawit (12 unit tangki dengan kapasitas sekitar 21.000 ton), terminal aspal curah (9 unit tangki), dan terminal petikemas konvensional (luas 4000 m²). Data hingga tahun 2014 menunjukkan bahwa pelabuhan tersebut menerima batu bara sebagai jumlah komoditi terbesar yang dibongkar dan mengirimkan barang proyek / mesin sebagai komoditi terbesar yang dimuat. Data yang sama menunjukkan bahwa hingga tahun 2019 pelabuhan tersebut belum dipakai untuk kegiatan ekspor namun sudah dipakai untuk kegiatan impor.

Tabel 2.23 Fasilitas Penumpukan Pelabuhan Cirebon

No.	Lokasi Gudang	Spesifikasi Teknis				Konstruksi
		Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Kapasitas (Ton)	
Fasilitas : Gudang						
1.	Gudang Lini I					
	a. Gudang Muarajati	100,00	40,00	4.000	4.800	Baja
	b. Gudang 101	42,50	42,50	1.806	1.932	Baja
	c. Gudang 102	60,00	25,00	1.500	1.640	Baja
	d. Gudang 103	17,50	17,50	306	416	Baja
	e. Gudang 104	70,00	15,00	1.050	1.224	Baja
2.	Gudang Lini II					
	Gudang Terbuka Pelra	60,00	20,00	1.200	1.440	Baja
Fasilitas : Lapangan Terminal Konvensional						
1.	Lapangan Muarajati (Curah Kering)	112, 00	40,00	4.480	5.400	Conblock
2.	Lapangan Pelita (Curah Kering)	326,00	30,00	9.780	13.000	Tanah Padat
3.	Lapangan Surya Sumantri (Curah Kering)	173,44	46,40	8.048	20.400	Tanah Padat
4.	Lapangan Linggarjati (Multi Purpose)	140,00	40,00	5.600	11.200	Conblock
Fasilitas : Lapangan Peti Kemas						
1.	Multi Purpose	90,00	60,00	5.400	-	Conblock

Sedangkan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Cirebon telah ada Pelabuhan perikanan yang meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pelabuhan Perikanan Pantai berupa PPP Bondet berada di Kecamatan Gunungjati. Sedangkan PPI meliputi:

- a. Pangkalan Pendaratan Ikan Ambulu berada di Kecamatan Losari;
- b. Pangkalan Pendaratan Ikan Bandengan berada di Kecamatan Mundu;
- c. Pangkalan Pendaratan Ikan Bungko berada di Kecamatan Kapetakan;
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan Bungko Lor berada di Kecamatan Kapetakan;
- e. Pangkalan Pendaratan Ikan Citemu berada di Kecamatan Mundu;
- f. Pangkalan Pendaratan Ikan Erder berada di Kecamatan Pangenan;
- g. Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar berada di Kecamatan Gebang;
- h. Pangkalan Pendaratan Ikan Karangreja berada di Kecamatan Suranenggala; dan
- i. Pangkalan Pendaratan Ikan Waruduwur berada di Kecamatan Astanajapura.

2.3.4 Pembangkit dan Jaringan Listrik

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Cirebon terdiri dari, *Pertama*, infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Astanajapura, Mundu, dan Pangenan.

Pada saat ini Kabupaten Cirebon sudah memiliki satu unit PLTU yang terletak di Kanci Kulon, Astanajapura. PLTU yang sudah beroperasi tersebut diresmikan pada tahun 2012 dan menghasilkan tenaga maksimal sebesar 660 MW. PLTU ini telah menggunakan teknologi supercritical sehingga dapat mengurangi jumlah konsumsi batubara untuk menghasilkan energi yang sama dengan teknologi lainnya. PLTU ini mengkonsumsi bahan bakar sekitar 7.000 – 8.000 ton batu bara per hari.

Selanjutnya, telah dibangun ekspansi PLTU unit II Cirebon pada lahan seluas 200 hektar yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 1.000 MW. PLTU Cirebon Unit II Expansion menggunakan teknologi ultra supercritical, sehingga mampu menekan konsumsi batu bara hingga 3 persen. Teknologi ini dirancang untuk mengonsumsi 3,2 juta ton batu bara per tahun dengan kalori 4.500 kkal per kilogram (kg).

Kedua, jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem dan gardu listrik. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem terdiri atas Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Secara garis besar Kabupaten Cirebon sudah dapat mensuplai energi listrik dengan beban puncak 306,06 MVA dan kapasitas tersedia sebesar 173,94 MVA. Pada tahun 2020 PLN Kabupaten Cirebon tercatat memiliki daya terpasang sebesar 151.073 KW dan berhasil menjual listrik sebanyak 24.410.572 KWh. Energi listrik tersebut disuplai melalui 5 Gardu Induk yang terletak di seluruh daerah Kabupaten Cirebon.

2.3.5 Gas Alam

Di Kabupaten Cirebon terdapat juga fasilitas pengolahan gas alam yang terletak di Kecamatan Mundu. Fasilitas kilang pengolahan gas ini dikelola oleh PT Pertamina Gas (Pertagas). Kebutuhan gas untuk fasilitas pengolahan tersebut dipasok oleh anak perusahaan Pertamina lainnya, yakni PT Pertamina EP Asset III Jatibarang dan PT Pertamina Hulu Energi *Offshore North West Java* (PHE ONWJ). Salah satunya dari Lapangan GG milik PHE ONWJ yang mulai *onstream* dengan kapasitas produksi harian 31 juta kaki meter kubik (MMSCFD) dan 150 barel kondensat per hari.

Kilang LPG Mundu sendiri didesain untuk mampu memproduksi LPG sebesar 100 ton per hari. Selain itu produk lainnya yang bisa dihasilkan dari fasilitas yang dibangun sejak tahun 1977 tersebut adalah condensate Naphta/Minasol-M sebesar 120 ton per hari, dan lean gas sekitar 720.000 Normal m³ (Nm³) per hari. LPG dan Minasol yang diproduksi Kilang LPG Mundu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sementara lean gas kembali dimanfaatkan Pertamina EP dan untuk digunakan sendiri sebagai bahan bakar *compressor*, *furnace*, dan generator. Sebagian lean gas digunakan juga oleh pabrik semen, pupuk, PT Krakatau Steel, gas kota, dan PT PLN (Persero).

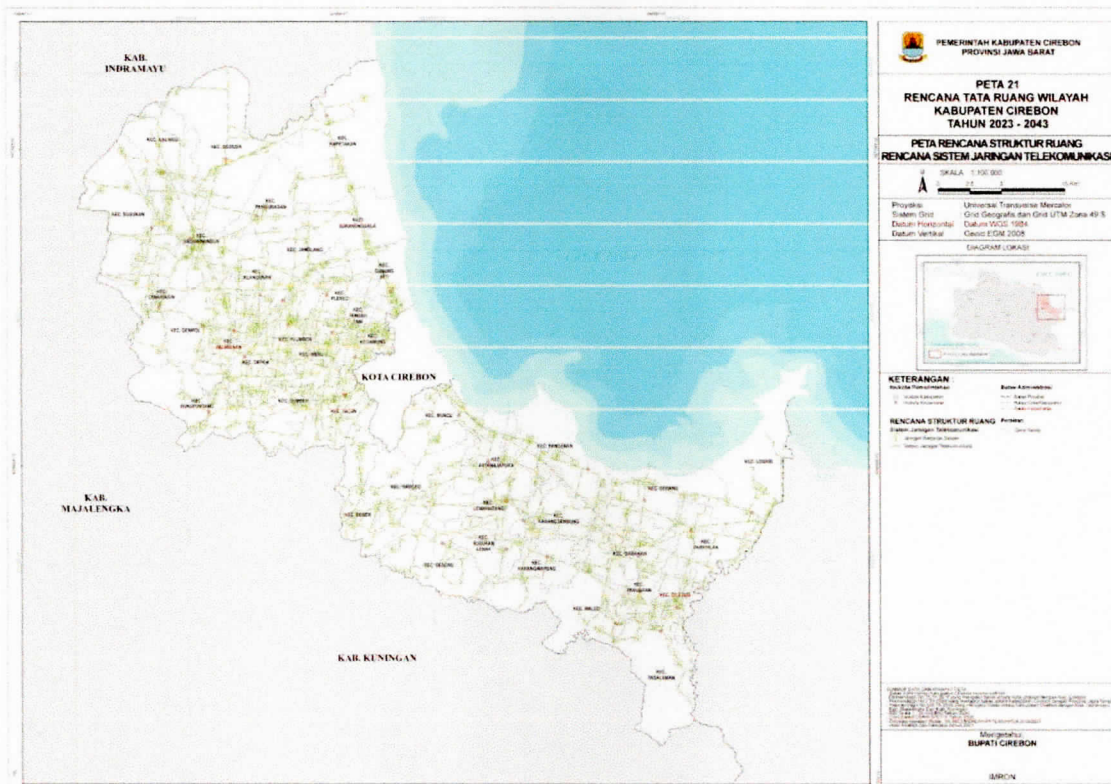
Pemanfaatan hasil olahan gas alam oleh berbagai industri di Kabupaten Cirebon dilakukan melalui jaringan pipa gas dengan fasilitas Stasiun Kompresor Gas (SKG) Mundu sebagai pusatnya. Saat ini, SKG yang diresmikan pada 1978 ini memiliki peralatan utama berupa kompresor gas turbin dengan kapasitas masing-masing 40 MMSCFD sebanyak dua buah, air fan cooler dua buah dan tiga instrument air compressor. Terdapat juga lima

ruas pipa yang dikelola yakni ruas Cilamaya-KHT (Kandanghaur Timur), KHT-Cilamaya, KHT Balongan, Balongan-Mundu, dan Mundu-Sunyaragi.

Selanjutnya gas alam pada konteks lokal Kabupaten Cirebon, pasokan energi berupa gas untuk industri akan teratasi dengan adanya proyek transisi pipa gas bumi Cirebon-Semarang.⁶ Pembangunan pipa gas Cisem tahap I akan sesuai dengan rencana dan Agustus 2023, dimana kebutuhan gas untuk industri akan dimulai pada November atau Desember 2023.⁷ Setelah menuntaskan proyek Cisem tahap I, pemerintah berencana melanjutkan proyek Cisem tahap II yang ditargetkan dapat memenuhi permintaan bagi industri di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes dan Pemalang dengan volume sekitar 5,8-12 MMSCFD. Selain itu, proyek Cisem tahap II juga akan mengalirkan gas kepada konsumen komersial seperti hotel, restoran dan jaringan gas untuk rumah tangga.⁸

2.3.6 Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Cirebon berupa Jaringan Tetap. Jaringan Tetap tersebar berada di seluruh kecamatan. Jaringan telekomunikasi yang ada berupa cakupan wilayah penyedia internet dan jaringan telepon seluler, terutama dari pihak penyedia jaringan swasta. Wilayah Cirebon termasuk ke dalam salah satu wilayah dengan jumlah pengguna internet tertinggi di Jawa Barat, bersama dengan Bandung dan Karawang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Cirebon sudah mendapatkan jaringan telepon 4G. Berikut disajikan rencana sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Cirebon berdasarkan dokumen RTRW terbaru.



Gambar 2.13 Sistem Jaringan Telekomunikasi Di Kabupaten Cirebon
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Cirebon

⁶ <https://industri.kontan.co.id/news/proyek-cirebon-semarang-cisem-tahap-i-mulai-alirkan-gas-bulan-depan>

⁷ ibid

⁸ <https://migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-lanjutkan-pembangunan-pipa-cisem>

2.3.7 Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 disebutkan bahwa KPI di Kabupaten Cirebon direncanakan seluas kurang lebih 4.988 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan meliputi Kecamatan Arjawinangun, Astanajapura, Babakan, Ciledug, Ciwaringin, Depok, Gebang, Gempol, Jamblang, Kedawung, Lemahabang, Losari, Mundu, Pabedilan, Pabuaran, Palimanan, Pangenan, Plered, Plumbon, Susukan, Talun, dan Weru.

Strategi untuk kebijakan penataan ruang pada kawasan peruntukan industri di Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan daya saing kawasan, meliputi:

1. Mendorong penyediaan Kawasan industri secara terpadu dan terintegrasi yang didukung logistik.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri;
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
4. Pengembangan industri secara tematik berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia;
5. Menyediakan sistem transportasi regional yang mendukung Kawasan Peruntukan Industri yang handal dan aksesibilitas baik untuk menekan biaya logistik;
6. Penetapan lokasi kegiatan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri untuk meningkatkan minat investasi dan daya saing industri;
7. Mengembangkan dan menata sentra industri kecil dan menengah melalui pemberian infrastruktur dan distribusi pemasaran yang memadai sesuai dengan rencana Pola Ruang yang dikembangkan;
8. Mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan mengganggu Kawasan resapan air; dan
9. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Sedangkan perwujudan KPI dilakukan dengan:

1. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. pengelolaan lingkungan pada Kawasan Peruntukan Industri;
3. pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung;
4. pengembangan industri strategis dan industri hijau;
5. pengembangan Kawasan industri;
6. pengembangan sumber daya industri, sarana prasarana industri, inovasi, riset, dan teknologi industri; dan
7. penyelenggaraan data dan sistem informasi industri.

Pengembangan KPI di Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan mendapatkan arahan pengembangan satu titik kawasan industri berbasis *eco-industry*. Kawasan ini diarahkan untuk pembangunan kawasan industri berwawasan lingkungan atau *eco-industrial park* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Berikut disajikan arah fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 untuk pengembangan KPI Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.24 Arah Fungsi Kawasan

Kawasan	Jenis Kawasan	Kecamatan	Pusat Pelayanan
KPI Cirebon	KPI	Ciledug	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
		Lemahabang	
		Mundu	
		Greged	
		Astanajapura	
		Karangsembung	
		Gebang	
		Babakan	
		Losari	
		Pabedilan	
Mertasinga	SIKM	Gunggungjati	SIKM
Trusmi Kulon		Plered	
Tegalbugubug		Arjawinangun	
Rawaurip		Pangenan	
Tegalwangi		Weru	
Gempol		Gempol	
Bobos		Dukupuntang	
Sumber	Kawasan Perkotaan	Sumber	
Arjawinangun		Arjawinangun	
Palimanan		Palimanan	

Spesialisasi investasi yang diarahkan pada KPI Cirebon difokuskan penanaman modal untuk industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, bahan galian non logam, bahan bangunan, pengolahan garam konsumsi, dan pengolahan *hotmix* dan beton.

Salah satu investasi yang perlu didukung dan dikembangkan di Kabupaten Cirebon, yaitu industri pengolahan garam. Pengembangan sektor industri garam di Kabupaten Cirebon menjadi salah satu prioritas investasi yang strategis, sejalan dengan potensi daerah sebagai penghasil garam berkualitas. Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon 2024-2044 disebutkan bahwa luas kawasan pergaraman kurang lebih 2.974 ha. Wilayah potensi kawasan pergaraman seperti Kecamatan Astanajapura, Gebang, Gunungjati, Kapetakan, Mundu, Pangenan, dan Suranenggala memiliki lahan tambak garam yang luas dan telah lama menjadi pusat produksi garam rakyat. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu mengembangkan kawasan sentra industri garam sebagai bagian dari upaya industrialisasi sektor kelautan.

Sentra industri garam ini diarahkan untuk tidak hanya berfokus pada produksi garam konsumsi, tetapi juga pengolahan garam industri yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Pembangunan fasilitas pengolahan, gudang penyimpanan, dan sistem distribusi yang modern menjadi bagian integral dari pengembangan ini. Selain itu, penerapan teknologi pengolahan garam untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi akan didorong, sehingga produk garam dari Cirebon mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Untuk mendukung pengembangan KPI Kabupaten Cirebon dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 disebutkan rencana aksi pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur di Kabupaten Cirebon, yaitu:

1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan, yaitu pembangunan jalan lingkaran Sumber – Talun – Cisaat;
2. Rencana sistem jaringan transportasi darat, yaitu pembangunan Terminal Tipe B Ciledug;
3. Sarana dan prasarana persampahan, yaitu pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Cirebon Raya;
4. Sarana dan prasarana permukiman, yaitu Rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede Tahap I dan Tahap II);
5. Pembangunan waduk/bendungan, yaitu pembangunan Waduk Cipanundan;
6. Sarana dan prasarana pengendalian banjir, yaitu (a) pengendalian banjir Sungai DAS Cisanggarung, Citaal, Cijangkelok, Cibatu, dan Cipanundan, dan (b) pembangunan Embung Winduhaji, Waled Asem, Suranenggala, Bungko Lor, dan Cikeusal;
7. Infrastruktur irigasi, yaitu rehabilitasi tuntas DI Cikeusik dan DI Seuseupan;
8. Sumber daya manusia, yaitu pengembangan ITB Kampus Cirebon; dan
9. Daya saing Kawasan, yaitu (a) pembangunan gedung creative center dan (b) pengadaan sarana penangkapan ikan dan pengembangan desa digital di Kabupaten Cirebon.

Wilayah di Kabupaten Cirebon juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu KSP Mundu – Losari yang meliputi Kecamatan Mundu, Pangenan, Gebang, Babakan, Pabedilan, Astanajapura, dan Losari. **Pengembangan KSP Mundu-Losari** di arahkan untuk memperkuat sektor industri, pariwisata, dan perikanan yang menjadi potensi utama di wilayah pesisir tersebut. KSP Mundu-Losari memiliki posisi strategis di jalur pantura, yang merupakan jalur logistik utama, serta berbatasan langsung dengan kawasan industri dan pelabuhan perikanan, menjadikannya area potensial untuk pengembangan kawasan industri perikanan dan ekonomi pesisir. Pengembangan kawasan ini perlu berfokus pada optimalisasi sumber daya lokal, seperti industri garam, perikanan tangkap dan budidaya, serta pariwisata bahari dan budaya. Selain itu, KSP Mundu-Losari diintegrasikan dengan pengembangan sektor agrowisata dan UMKM untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekitar.

2.3.8 Jaringan Air

Berdasarkan data dari PDAM Cirebon (2022) maka pada saat ini PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon memiliki total kapasitas terpasang sebesar 683 l/detik (388 l/detik dari sumber mata air, 280 l/detik dari sumber air permukaan dan 15 l/detik dari sumber air sumur dalam). Sementara secara total PDAM Tirta Jati memiliki kapasitas produksi total sebesar 13.522.235 m³, dengan volume distribusi sebesar 8.643.410 m³, dan volume air terjual adalah sebesar 6.379.738 m³.

Jumlah persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih PDAM di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun 2018-2022. PerHsentasinya naik dari ±5,17% Kepala Keluarga (KK) tahun 2018 menjadi ±7,14% KK tahun 2022. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya jumlah rumah

tangga yang mendapatkan pasokan air bersih dari 639.771 KK pada tahun 2018 menjadi 610.593 KK pada tahun 2022.

Tabel 2.25 Jumlah Pelanggan Air Bersih PDAM di Kabupaten Cirebon Tahun 2018–2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Total jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih	29.759	29.759	40.110	40.417	43.603
2.	Jumlah rumah tangga	575.302	579.714	583.038	604.271	610.593
3.	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	5,17	5,13	6,88	6,69	7,14

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka 2023

Untuk pengguna PDAM yang tercatat selama 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat. Penyaluran air bersih yang disalurkan berdasarkan pelanggan menunjukkan bahwa pelanggan non niaga menjadi konsumen yang paling besar yaitu sebanyak 5.993.501 m³ pada tahun 2021 dan 5.841.258 m³ di tahun 2022. Disusul oleh pelanggan khusus yaitu sebanyak 502.994 m³ pada tahun 2021 dan 627.545 m³ di tahun 2022.

Tabel 2.26 Volume Air Bersih yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Cirebon, 2021 dan 2022

No.	Jenis Pelanggan	Tahun (m ³)	
		2021	2022
1.	Sosial	585.943	307.700
2.	Non Niaga	5.993.501	5.841.258
3.	Niaga dan Industri	273.897	358.379
4.	Khusus	502.994	627.545
Jumlah		7.356.335	7.134.882

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam angka 2023

Berdasarkan data terbaru pada tahun 2022, PDAM saat ini mengelola 43.603 unit sambungan. Keseluruhan sambungan tersebut tersebar pada 148 desa di 30 Kecamatan. Sambungan tersebut dapat memberikan cakupan pelayanan di daerah terlayani sebesar 32.51% dan cakupan pelayanan di wilayah administratif sebesar 12.83%.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mengharapkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede segera beroperasi karena kebutuhan air bersih di Kabupaten Cirebon sangat tinggi. Sebagian masyarakat Kabupaten Cirebon saat ini mengandalkan suplai air bersih dari beberapa mata air yang ada di wilayah hulu Kabupaten Kuningan⁹. SPAM Jatigede merupakan proyek penyediaan air minum yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kapasitas penyediaan air bersih untuk memenuhi

⁹ <https://bandung.bisnis.com/read/20220824/550/1570118/jelajah-investasi-jabar-spam-jatigede-dinantikan-warga-kabupaten-cirebon>

kebutuhan air bersih di Jawa Barat khususnya di 5 kabupaten/kota di wilayah Cirebon raya yaitu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu. Air baku berasal dari Sungai Cimanuk dengan kapasitas suplai air 1.500 liter/detik¹⁰. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keberadaan SPAM Jatigede juga amat vital dalam mendukung pembangunan industri di Kabupaten Cirebon.

2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Sentra IKM di Kabupaten Cirebon ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor 530/Kep/.404-Disperdagin/2020 tentang Penetapan Sentra Produk Unggulan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa jenis IKM yang memiliki potensi untuk dikembangkan di masa akan datang sebanyak 7 (tujuh) jenis seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama masyarakat sedang mengupayakan adanya sentra- sentra usaha berdasarkan komoditas yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Ada beberapa sentra usaha seperti pindang, kerupuk, emping melinjo, rotan, batik, gerabah, kulit, batu alam, sandal, mebel, konveksi, dan usaha lainnya. Adapun komoditi unggulan yang mempunyai sentra di Kabupaten Cirebon adalah kerajinan rotan, batik, pakaian jadi, mebel kayu, batu alam, sandal karet, makanan ringan, emping melinjo dan kerajinan kulit kerang. Sentra dari masing-masing komoditi tertera pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Sentra IKM Kabupaten Cirebon

Komoditas	Lokasi Sentra	Komoditas	Lokasi Sentra
Kerajinan Rotan	Kec. Weru	Sandal Karet	Kec. Plumbon
	Kec. Plumbon		Kec. Plered
	Kec. Depok	Makanan Ringan	Kec. Weru
	Kec. Plered		Kec. Kedawung
	Kec. Palimanan		Kec. Tengah Tani
Mebel Kayu	Kec. Plered	Emping Melinjo	Kec. Plumbon
	Kec. Weru		Kec. Kedawung
	Kec. Depok		Kec. Ciwaringin
	Kec. Dukupuntang		Kec. Gunung Jati
Batu Alam	Kec. Palimanan	Kerajinan Kulit Kerang	Kec. Tengah Tani
	Kec. Depok		Kec. Weru
	Kec. Gempol	Pakaian Jadi	Kec. Arjawinangun
	Kec. Dukupuntang		Kec. Sumber
Batik	Kec. Plered		Kec. Weru
	Kec. Tengah Tani		Kec. Susukan
	Kec. Ciwaringin		

Data sentra IKM di Kabupaten Cirebon berdasarkan lampiran SK Bupati Cirebon Nomor 530/Kep/.404-Disperdagin/2020 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

¹⁰ <https://kpbu.jabarprov.go.id/post/spam-jatigede>

Tabel 2.28 Daftar Nama dan Lokasi Produk Unggulan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon

No.	Jenis Industri	Lokasi
1.	Kajian Rotan	a. Desa Tegalsari Kecamatan Weru b. Desa Tegalsari Kecamatan Plered c. Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang
2.	Mebel Kayu	a. Desa Kaliwulu Kecamatan Plered b. Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered c. Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang d. Desa Cikeduk Kecamatan Depok
3.	Emping Melinjo	a. Desa Kertawangun Kecamatan Kedawung b. Desa Tuk Kecamatan Kedawung c. Desa Astana Kecamatan Gunugjati
4.	Roti dan Makanan Ringan	a. Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug b. Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak c. Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak d. Desa Ciawigajah Kecamatan Beber
5.	Batu Alam	Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang
6.	Sandal Karet	Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon
7.	Batik	a. Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin b. Desa Kalitengah Kecamatan Tengahtani c. Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered d. Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered e. Desa Kaliwulu Kecamatan Tengahtani f. Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani g. Desa Kalitengah Kecamatan Tengahtani h. Desa Wotgali Kecamatan Plered
8.	Konveksi	Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan
9.	Kerajinan Kulit Keraneg	a. Desa Astapada Kecamatan Tengahtani b. Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan
10.	Produksi Garam	a. Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan b. Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan c. Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala d. Desa Playangan Kecamatan Gebang e. Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang f. Desa Waruduwur Kecamatan Mundu g. Desa Bendungan Kecamatan Pangenan
11.	Anyaman Bambu	a. Desa Gembongan Kecamatan Babakan b. Desa Halimpu Kecamatan Beber c. Desa Cipinang Kecamatan Beber d. Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug e. Desa Warujaya Kecamatan Depok f. Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang g. Desa Greged Kecamatan Greged h. Desa Nanggela Kecamatan Greged
12.	Ikan Pindang	a. Desa Orimalang Kecamatan Jamblang b. Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang c. Desa Jemas Lor Kecamatan Klangeran d. Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon e. Desa Gunungsari Kecamatan Waled f. Desa Mekarsari Kecamatan Waled

No.	Jenis Industri	Lokasi
13.	Tahu dan Tempe	a. Desa Kesugengan Lor Kecamatan Depok b. Desa Waruroyom Kecamatan Depok c. Desa Kesugengan Kidul Kecamatan Depok d. Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang e. Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran f. Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang g. Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang h. Desa Sindang Laut Kecamatan Lemahabang i. Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran j. Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran k. Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber l. Kelurahan Gegunung Kecamatan Sumber m. Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun
14.	Kerupuk Aci	Desa Slangit Kecamatan Klangeran
15.	Kue Gapit	Desa Battebat Kecamatan Tengah tani
16.	Sohun	Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug
17.	Telur Asin	a. Desa Matangaji Kecamatan Sumber b. Desa Melakasari Kecamatan Gebang c. Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik
18.	Ikan Asin	a. Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati b. Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan
19.	Keset	Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin
20.	Mainan Anak	Desa Bojongkulon Kecamatan Susukan
21.	Bata Merah	Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran
22.	Gerabah	a. Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun b. Desa Kedongdong Kecamatan Susukan c. Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang

Selain sentra IKM di atas, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon juga mengembangkan industri halal. Kategori industri halal yang ada di Kabupaten Cirebon terbagi menjadi tiga jenis, yaitu industri makanan, industri minuman, dan industri barang gunaan yang tersebar di 40 (empat puluh) kecamatan di Kabupaten Cirebon seperti yang disajikan pada tabel berikut ini. Total IKM Bersertifikat halal di Kabupaten Cirebon tahun 2023 sebanyak 9.399 unit. Sebanyak 7.026 atau 75 persen merupakan industri makanan olahan, sedangkan sisanya 264 unit (3%) industri minuman dan sebanyak 2109 unit (22%) adalah industri barang gunaan.

Tabel 2.29 Jumlah IKM Bersertifikat Halal di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No.	Kecamatan	Industri (unit)			No.	Kecamatan	Industri (unit)		
		Makanan Olahan	Minuman	Barang Gunaan			Makanan Olahan	Minuman	Barang Gunaan
1.	Panguragan	723	29	720	21.	Pabedilan	61	6	35
2.	Plered	691	38	65	22.	Susukan	104	4	30
3.	Plumbon	387	1	103	23.	Talun	135	10	24
4.	Dukupuntang	458	19	70	24.	Jamblang	108	12	27
5.	Klangenan	236	17	31	25.	Losari	118	1	22
6.	Weru	463	10	125	26.	Gempol	91	1	1
7.	Depok	163	8	7	27.	Waled	53	2	58
8.	Mundu	436	32	53	28.	Palimanan	125	5	28
9.	Tengahatani	283	11	33	29.	Karangwareng	105	3	18
10.	Gunung Jati	254	3	58	30.	Greged	67	3	53
11.	Astanajapura	153	12	114	31.	Kaliwedi	38	0	71
12.	Gegesik	179	2	19	32.	Ciwaringin	31	2	6
13.	Arjawinangun	173	2	86	33.	Lemahabang	132	2	16
14.	Kedawung	179	7	20	34.	Pangenan	61	1	3
15.	Kapetakan	68	0	42	35.	Beber	43	0	12
16.	Sumber	161	7	24	36.	Pabuaran	38	1	3
17.	Pasaleman	181	0	39	37.	Ciledug	36	0	32
18.	Gebang	193	1	12	38.	Sedong	34	3	5
19.	Susukanlebak	83	4	24	39.	Karangsembung	19	0	7
20.	Babakan	146	4	9	40.	Suranenggala	17	1	4
Jumlah							7.026	264	2.109
Total							9.399		

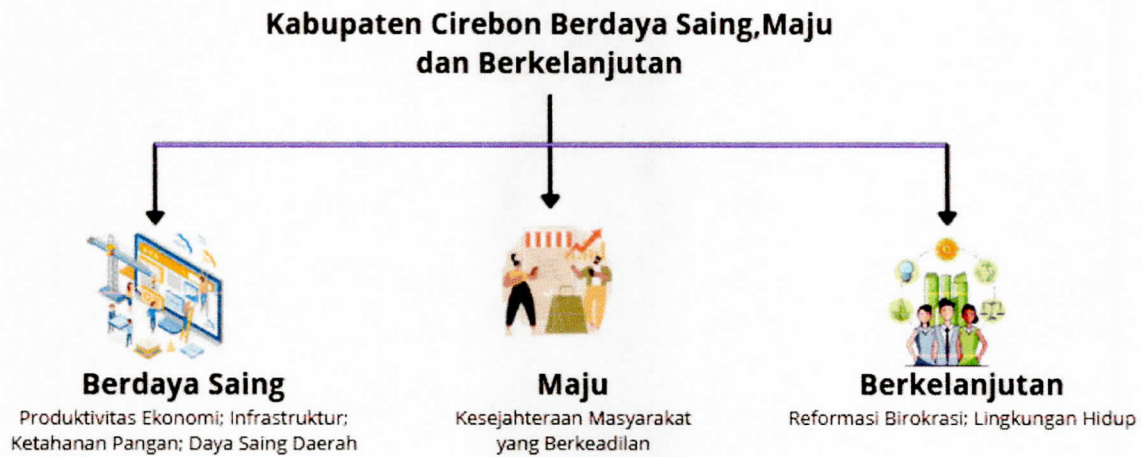
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon (2023)

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIREBON

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon 2025-2045 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025–2045, yang menyebutkan pernyataan visi Kabupaten Cirebon, yaitu: “Kabupaten Cirebon Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan”.



Gambar 3.1 Visi Kabupaten Cirebon 2025–2045

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024

Pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon di atas memiliki makna:

1. *Berdaya Saing*. Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan, tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan siap berkompetisi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis pada pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi perdesaan melalui pengembangan Agrobisnis, industri, Perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, serta mandiri secara berkelanjutan.
2. *Maju*. Pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik yang didukung dengan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi, profesional serta berwawasan luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi yang dimiliki namun tetap mengedepankan pentingnya Kerjasama dan sinergitas. Salah satu indikator tercapainya kondisi maju adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. *Berkelanjutan*. Menjamin kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan ekosistem Kabupaten Cirebon dalam konteks lokal dan global serta kesejahteraan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Sasaran pencapaian visi pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025–2045 dimaksudkan untuk:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita
Daerah dengan tingkat kepadatan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi dilandaskan pada sektor unggulan.
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
Representasi kondisi yang pertama adalah terwujudnya tingkat kemiskinan yang rendah, serta pemerataan ekonomi kepada masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu representasi kesejahteraan masyarakat dari perspektif pendapatan dan konsumsi masyarakat sehingga perlu kiranya untuk terus ditekan. Sedangkan aspek ketimpangan rendah dipilih sebagai salah satu indikator bahwa masyarakat dapat turut berperan aktif dalam aktivitas ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang layak.
3. Kerjasama Daerah Skala Regional dan dengan Dunia Internasional Meningkat
Kabupaten Cirebon memiliki daya saing atau nilai kompetitif yang lebih tinggi terhadap daerah lain pada tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih berkembang.
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Terwujudnya daya saing manusia yang unggul, meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Daya saing yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai peluang menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission
Pembangunan berjalan selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berikut ditampilkan sasaran visi RPJPD Kabupaten Cirebon 2025–2045 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Cirebon 2025–2045

No.	Sasaran Visi	Indikator	Baseline (2025)	Target (2045)
1.	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Perkapita (Rp Juta)	27,75 – 28,11	56,11 – 109,19
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	20,39	20,47
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,20 – 10,16	0,14 – 0,93
		Rasio gini (Indeks)	0,348 – 0,355	0,321 – 0,344
		Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota (%)	2,32	2,36
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,82 – 5,32	4,92 – 6,12
3.	Kerjasama Daerah skala regional dan dengan dunia internasional meningkat	Jumlah Kerjasama Regional dan Internasional	2	10
4.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,57	78,36
5.	Penurunan Emisi GRK menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar)	5,37	12,73
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,08	68,12

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah akan dicapai melalui delapan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon Tahun 2005–2025 sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia berilmu dan berketerampilan;
2. Meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kondusifitas daerah;
5. Mewujudkan toleransi beragama dan ketahanan sosial budaya;
6. Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan inklusif;
7. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan
8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Pembangunan industri Kabupaten Cirebon berkaitan dengan misi ke-2 yaitu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi. Pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon selama 20 (dua puluh) tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi, seperti halnya pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa perubahan tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, serta pergeseran geoekonomi dan geopolitik. Untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi daerah diperlukan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Upaya untuk Mendukung Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Berdasarkan RPJPD Kabupaten Cirebon 2025–2045

Tahap I: Pembentukan dan penataan sentra-sentra produksi dan pusat perekonomian berbasis potensi dan komoditas unggulan	Tahap II: Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa, serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Tahap III: Penguatan iklim investasi melalui sinergitas antar sektor investasi dan industri
<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang <i>modern</i> terintegrasi); Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan <i>dry port</i> KA Pelabuhan Patimban, serta <i>dry port</i> KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon; 2. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri; 3. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Kertajati Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, serta rintisan <i>green industry</i>); 2. Pengembangan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan; 3. Peningkatan produktivitas dan kualitas potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi melalui pembentukan klaster 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Kertajati Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, serta rintisan <i>green industry</i>); 2. Pengembangan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan; 3. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI

Tahap I: Pembentukan dan penataan sentra-sentra produksi dan pusat perekonomian berbasis potensi dan komoditas unggulan	Tahap II: Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa, serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Tahap III: Penguatan iklim investasi melalui sinergitas antar sektor investasi dan industri
<p>tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);</p> <p>4. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> nasional yang berdaya saing di tataran global;</p> <p>5. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru, hijau dan ekonomi oranye, serta energi baru dan terbarukan;</p> <p>6. Penguatan SDM, sarana dan prasarana <i>smart green economy</i>, <i>smart blue economy</i> dan <i>smart orange economy</i></p>	<p>pertanian, perikanan dan kelautan basis komoditas;</p> <p>4. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global;</p> <p>5. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;</p> <p>6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>; Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di DUDI dan <i>green job</i>, pelayanan kesehatan, dan pendidikan tenaga kerja bersertifikasi;</p> <p>7. Akselerasi peningkatan kapasitas SDM, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sarana dan prasarana serta tata kelola <i>smart green economy</i>, <i>smart blue economy</i> dan <i>smart orange economy</i></p>	<p>nasional yang berdaya saing di tataran global;</p> <p>4. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;</p> <p>5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>; Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan di DUDI dan <i>green job</i>, pelayanan kesehatan, dan pendidikan tenaga kerja bersertifikasi;</p> <p>6. Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;</p> <p>7. Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi oranye;</p> <p>8. Akselerasi peningkatan kapasitas SDM, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sarana dan prasarana serta tata kelola <i>smart green economy</i>, <i>smart blue economy</i> dan <i>smart orange economy</i>.</p>

3.2 Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon

Dalam penyusunan visi dan misi pembangunan industri di Kabupaten Cirebon memperhatikan dan menyelaraskan pada dokumen perencanaan baik pada tingkatan nasional, provinsi maupun daerah. Pernyataan visi pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Sedangkan visi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Barat 2018-2038 yaitu “Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia”.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan industri nasional, provinsi Jawa Barat, dan RPJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045 maka visi pembangunan industri Kabupaten Cirebon 2025-2045 adalah “Industri Tangguh Menuju Kabupaten Cirebon Sejahtera”. Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Cirebon akan mengembangkan industri yang tangguh, dengan ciri:

- Daya saing yang tinggi, sehingga mampu bersaing, tidak saja dengan industri-industri di sekitarnya, tetapi juga dengan industri nasional dan global;
- Struktur industri yang kuat, sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap dinamika eksternal yang semakin cepat dan sulit diprediksi;
- Ditunjang oleh inovasi dan teknologi serta sumber daya manusia yang unggul;
- Berkelanjutan, dengan memperhatikan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial dan ekologis.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Cirebon 2025-2045 mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi industri Kabupaten Cirebon sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. Meningkatkan daya saing industri yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan peran industri dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan melalui perluasan kesempatan kerja
4. Menjamin kepastian, kemudahan berusaha dan persaingan yang sehat.

Berikut disajikan matriks persandingan visi dan misi RIPIN, RPIP Provinsi Jawa Barat dan RPIK Kabupaten Cirebon.

Tabel 3.3 Matriks Persandingan Visi dan Misi RIPIN, RPIP Provinsi Jawa Barat dan RPIK Kabupaten Cirebon

Kriteria	RIPIN	RPIP Jawa Barat	RPIK Kabupaten Cirebon
Visi	Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh	Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia	Industri Tangguh Menuju Kabupaten Cirebon Sejahtera
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; 2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; 3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian Jawa Barat; 2. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan daya saing industri nasional yang mandiri dan berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran industri Kabupaten Cirebon sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah; 2. Meningkatkan daya saing industri yang berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan peran industri dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan melalui

Kriteria	RIPIN	RPIP Jawa Barat	RPIK Kabupaten Cirebon
	satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan 7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.	4. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam perluasan kesempatan kerja; 5. Meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan	perluasan kesempatan kerja 4. Menjamin kepastian, kemudahan berusaha dan persaingan yang sehat

3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Dengan memperhatikan visi dan misi di atas, maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Cirebon 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan terhadap struktur perekonomian daerah;
2. Meningkatkan industri bernilai tambah tinggi melalui penguasaan teknologi dan inovasi dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan lingkungan;
3. Meningkatkan peran industri dalam penguatan dan pendalaman struktur industri provinsi dan nasional;
4. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan;
5. Meningkatkan nilai ekspor dan substitusi impor produk industri pengolahan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas selanjutnya disusun rumusan sasaran pembangunan industri. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada Bab II sebelumnya, maka rumusan sasaran dengan indikator sasaran pembangunan industri Kabupaten Cirebon, yaitu:

1. Sasaran 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, indikator sasaran yaitu (1) kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan (2) pertumbuhan sektor industri;
2. Sasaran 2: Peningkatan daya saing industri unggulan kabupaten, dengan indikator sasaran yaitu nilai ekspor produk industri;
3. Sasaran 3: Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri, dengan indikator sasaran yaitu jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri;
4. Sasaran 4: Peningkatan iklim usaha industri yang kondusif, dengan indikator sasaran yaitu nilai investasi sektor industri.

Sebelum menentukan target pembangunan industri berikut disajikan hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Matriks Persandingan Kebijakan Strategi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2045

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Industri Tangguh Menuju Kabupaten Cirebon Sejahtera	Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan terhadap struktur perekonomian daerah	Tujuan 1: Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan terhadap struktur perekonomian daerah	Sasaran 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	1. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB 2. Pertumbuhan sektor industri
	Misi 2: Meningkatkan daya saing industri yang berwawasan lingkungan	Tujuan 2: Meningkatkan industri bernilai tambah tinggi melalui penguasaan teknologi dan inovasi dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan lingkungan	Sasaran 2: Peningkatan daya saing industri unggulan kabupaten	Nilai ekspor produk industri
		Tujuan 3: Meningkatkan nilai ekspor dan substitusi impor produk industri pengolahan		
	Misi 3: Meningkatkan peran industri dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan melalui perluasan kesempatan kerja	Tujuan 4: Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan	Sasaran 3: Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri
Misi 4: Menjamin kepastian, kemudahan berusaha dan persaingan yang sehat	Tujuan 5: Meningkatkan peran industri dalam penguatan dan pendalaman struktur industri provinsi dan nasional	Sasaran 4: Peningkatan iklim usaha industri yang kondusif	Nilai investasi sektor industri	

Selanjutnya untuk menentukan target dari rumusan dan indikator sasaran di atas digunakan analisis *time series*. Analisis *time series* digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Hasil prediksi ini, selanjutnya, digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran pembangunan industri. Hasil dari analisis data *time series*, untuk melakukan proyeksi (*peramalan/forecasting*) digunakan pendekatan dengan metode statistik.

Dari lima metode statistik yang umum digunakan untuk peramalan, pada kajian ini hanya digunakan dengan metode *Arithmetic Geometric Curve Method*. Menurut Kirana, Nasution, dan Wanto (2019)¹¹, *Arithmetic Geometric Curve Method* merupakan metode proyeksi dengan menggunakan kurva geometris aritmatika, dengan formula:

$$Y_c = (Y_{i+1}) / (1+r)$$

Keterangan:

Y_{i+1} = nilai untuk tahun depan

r = tingkat kenaikan rata-rata

Pada dasarnya, indikator sasaran kuantitatif yang disepakati untuk digunakan adalah skenario moderat. Selanjutnya, pencapaian indikator sasaran kuantitatif tersebut didasarkan pada lima asumsi, yaitu:

1. Guncangan ekonomi (*shocks*) tidak bersifat fundamental;
2. Perkembangan ekonomi global yang predictable;
3. Iklim investasi dan pasar keuangan dunia yang stabil;
4. Permasalahan isu kesehatan seperti wabah/penyakit yang terkendali
5. Koordinasi yang semakin efisien dan efektif antar OPD
6. Peran dan fungsi e-government berjalan optimal;
7. Kepastian hukum dan kondusifitas keamanan daerah yang terjaga;

Mengacu pada metode perhitungan dan asumsi-asumsi di atas maka rata-rata target dari masing-masing indikator sasaran yang diharapkan tercapai pada setiap periode seperti disajikan pada tabel berikut ini:

¹¹ Ika Okta Kirana, Zulaini Masruro Nasution, Anjar Wanto. (2019). Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Menggunakan Metode Statistical Parabolic dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 16 (2): 202-212.

Tabel 3.5 Sasaran dan Target Berdasarkan Periode Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2045

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline (2023)	Satuan	Target (Periode)			
					2025–2030	2031–2035	2036–2040	2041–2045
1.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	20,31	%	22,32	24,62	26,91	29,43
		Pertumbuhan sektor industri	4,10	%	4,28	4,55	4,80	5,05
2.	Peningkatan daya saing industri unggulan kabupaten	Nilai ekspor produk industri	428,42	Juta Dollar AS	553,36	751,30	993,37	1.313,44
3.	Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri	118.773	Jiwa	132.188	164.626	201.109	245.677
4.	Peningkatan iklim usaha industri yang kondusif	Nilai investasi sektor industri (ribu rupiah)	569.008.209	Ribu rupiah	725.854.731	1.086.140.340	1.570.329.567	2.270.364.942

Setelah ditetapkan target pembangunan industri berdasarkan periode tahapan, untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi dari tiap tahapan perlu disusun target setiap tahun seperti ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tahun

Sasaran	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif		Peningkatan daya saing industri unggulan kabupaten	Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri	Peningkatan iklim usaha industri yang kondusif
	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	Pertumbuhan sektor industri (%)	Nilai ekspor produksi industri (Juta Dollar AS)	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (jiwa)	Nilai investasi sektor industri (Ribu Rupiah)
Baseline (2023)	20,31	4,10	428,42	118.773	569.008.209
2025	21,34	4,15	479,05	119.319	598.907.839
2026	21,72	4,20	506,57	124.193	644.734.589
2027	22,11	4,25	535,68	129.266	694.067.874
2028	22,51	4,30	566,45	134.546	747.176.004
2029	22,92	4,35	598,99	140.042	804.347.819
2030	23,33	4,40	633,41	145.762	865.894.262
2031	23,75	4,45	669,79	151.716	932.150.065
2032	24,18	4,50	708,27	157.913	1.003.475.578
2033	24,61	4,55	748,96	164.363	1.080.258.718
2034	25,05	4,60	791,99	171.076	1.162.917.090
2035	25,51	4,65	837,49	178.064	1.251.900.248
2036	25,96	4,70	885,60	185.338	1.347.692.149
2037	26,43	4,75	936,48	192.908	1.450.813.778
2038	26,91	4,80	990,28	200.787	1.561.825.985
2039	27,39	4,85	1.047,17	208.989	1.681.332.535
2040	27,88	4,90	1.107,33	217.525	1.809.983.391
2041	28,39	4,95	1.170,95	226.410	1.948.478.251
2042	28,9	5,00	1.238,22	235.658	2.097.570.349
2043	29,42	5,05	1.309,35	245.284	2.258.070.557
2044	29,95	5,10	1.384,57	255.303	2.430.851.792
2045	30,49	5,15	1.464,12	265.731	2.616.853.763

Untuk mencapai sasaran yang ditargetkan, pentahapan pembangunan industri perlu dilakukan. Penetapan pembangunan industri Kabupaten Cirebon disusun dengan menyelaraskan perencanaan pembangunan industri yang tercantum dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Cirebon.

1. Tahap I (2025-2030): Tahap ini pembangunan industri di Kabupaten Cirebon memiliki daya saing tinggi yang dilakukan melalui perencanaan dan implementasi strategi yang tangguh melalui penguatan bahan baku tersedia, tenaga kerja yang kualitas, peningkatan peran sentra riset dalam menciptakan ekosistem industri yang kuat dan peningkatan investasi untuk memperkuat daya saing industri.

2. Tahap II (2031-2035): Tahap ini pembangunan industri di Kabupaten Cirebon ditandai dengan penerapan prinsip industri berkelanjutan. Ditandai dengan penggunaan sumber daya yang efisien, pengolahan limbah cair industri dengan prinsip 3R, pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber energi industri.
3. Tahap III (2036-2040): Tahapan ketiga ini merupakan *leading steps* industri Kabupaten Cirebon yang menyaratkan dua tahapan sebelumnya telah tercapai. Pada tahap ini industri di Kabupaten Cirebon menerapkan strategi lanjutan dari tahapan sebelumnya yang diharapkan dapat mengoptimalkan inovasi dengan mengembangkan sistem informasi dan penggunaan teknologi informasi yaitu *Artificial Intelligence* untuk memperluas pasar industri.
4. Tahap IV (2041-2045): Tahap keempat yaitu pembangunan industri Kabupaten Cirebon diarahkan untuk industri Berdaya Saing Global. Tema ini berorientasi pada pencapaian peran strategis Kabupaten Cirebon di pasar global. Industri Kabupaten Cirebon diarahkan untuk menjadi pemain utama di pasar internasional dengan produk-produk industri unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi, memanfaatkan teknologi canggih, dan mengedepankan kualitas serta keberlanjutan.

Berikut ditampilkan pentahapan pembangunan industri Kabupaten Cirebon 2025-2045 sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2 Tahapan Perwujudan Visi RPIK Kabupaten Cirebon 2025-2045

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pada bagian ini dipaparkan strategi dan program pembangunan industri Kabupaten Cirebon sebagai wujud dari tahapan aktivitas pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya.

4.1 Strategi Pembangunan Industri

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Penyusunan strategi pembangunan industri Kabupaten Cirebon 2025-2045 menggunakan pendekatan analisis SWOT. Pada pendekatan analisis SWOT melibatkan *stakeholders* yang berkaitan dengan urusan perindustrian di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil FGD diperoleh, identifikasi matriks internal dan eksternal seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon

Aspek	Internal		Eksternal	
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Sumber daya industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercukupinya suplai bahan baku untuk mendukung industri di sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2. Tersedianya tenaga kerja terampil khususnya industri rotan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Pendidikan, seperti Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat 2. Minat tenaga kerja usia muda menjadi penganyam pada industri rotan rendah sehingga regenerasi terhambat; 3. Kualitas air laut untuk pembuatan garam rentan tercemar limbah (cair dan padat) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sumber daya investasi dan pembiayaan yang tersedia dalam beberapa tahun terakhir; 2. Kemitraan dalam penyediaan bahan baku industri dengan pemerintah daerah/instansi swasta; 3. Pengembangan vokasi industri 4. Peluang pengembangan industri rotan berbahan baku rotan sintetis 5. Peluang pemasaran produk rotan ke negara-negara Eropa yang menyukai produk <i>handmade</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pasokan bahan baku rotan; 2. Ekspor bahan baku industri keluar negeri secara ilegal; 3. Maraknya impor baju bekas yang mengancam industri pakaian jadi; 4. Peningkatan nilai ekspor produk daerah terkendala HAKI di negara tujuan 5. Stagnansi kualitas pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM), rasio ketersediaan sekolah dan guru 6. Penetapan zona persawahan berpotensi

Aspek	Internal		Eksternal	
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
				bertabrakan dengan zona industri
Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> Adanya infrastruktur transportasi yang baik, seperti jalan tol penghubung ke ibukota dan jalur kereta api <i>double track</i> Pelabuhan yang berada di Cirebon berkualitas cukup baik Jaringan seluler dan internet baik dan merata Distribusi logistik yang mudah karena kemudahan aksesibilitas Jaringan telekomunikasi yang handal 	<ol style="list-style-type: none"> Belum memadainya infrastruktur air PDAM untuk jenis pelanggan industri Kondisi dan luas jalan penghubung antar wilayah kabupaten masih perlu ditingkatkan Pasokan gas alam untuk industri masih belum memadai Kondisi dan kesesuaian infrastruktur jalan menuju KPI belum sesuai standar Ketersediaan air baku yang dapat memenuhi kebutuhan industri Penyediaan gas alam belum memenuhi kebutuhan industri Belum tersedia sentra industri kecil dan menengah 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi pelabuhan Cirebon untuk pengiriman ekspor Pengembangan wilayah Subang dan Majalengka melalui Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati berpotensi meningkatkan pasar barang hasil industri dari Kab. Cirebon Rencana pengembangan stasiun peti kemas 	<ol style="list-style-type: none"> Mudahnya impor barang industri dan barang jadi berpotensi mematikan industri lokal Persaingan menarik investasi untuk menanamkan modalnya ke daerah melalui fasilitasi kemudahan berusaha
Geografis dan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang rendah mampu menarik investor luar untuk berinvestasi di Kab. Cirebon Tingginya daya saing industri rotan yang mampu bersaing di skala internasional IKM di Kab. Cirebon mampu bersaing dan 	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat pengangguran tinggi kut menyumbang tingkat kemiskinan Beberapa wilayah masuk ke dalam kawasan rawan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya potensi pengalihan industri ke Kawasan Cirebon karena Kawasan Industri yang ada semakin kurang kompetitif Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban memberikan alternatif akses kargo udara dan laut, baik nasional maupun internasional Penetapan kawasan Rebana sebagai segitiga 	<ol style="list-style-type: none"> Persaingan dari kabupaten lain pada wilayah yang sama (Majalengka, Subang, Indramayu) maupun wilayah lain yang lebih kompetitif Industri harus memperhatikan kesesuaian tata ruang Kondisi geo politik pasar ekspor

Aspek	Internal		Eksternal	
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	menarik investor 4. Letak geografis yg strategis dan mendukung peningkatan investasi ke daerah		ekonomi Jawa Barat bagian Timur 4. Adanya pasar baru di luar negeri	
Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1. Tingginya nilai produksi dan penyerapan jumlah tenaga kerja 2. Kualitas produk IKM yang sudah dikenal baik dalam skala nasional maupun internasional 3. Tingginya dukungan pemerintah terhadap sektor IKM 4. Jumlah dan sebaran IKM yang terus tumbuh	1. Kebergantungan bahan baku dari luar Kab. Cirebon tinggi 2. Kemampuan desain produk dan teknologi produksi belum optimal 3. Belum terpadunya pengolahan limbah industri di sektor IKM 4. Terbatasnya akses Pelabuhan untuk ekspor bagi pelaku IKM	1. Adanya rencana pemindahan industri rotan dari Tiongkok ke Kab. Cirebon 2. Meningkatnya akses wisatawan ke Kab. Cirebon melalui BIJB yang membuka pasar IKM 3. Terbukanya potensi sertifikasi dan standaridisasi, seperti SLVK, Ekolabel, PIRT, dan JPH yang mampu meningkatkan daya saing produk IKM 4. Banyaknya investor asing yg berminat investasi 5. Terbukanya fasilitasi dan standardisasi produk dari pemerintah (halal, HKI, dll)	1. Adanya defisit bahan baku IKM akibat maraknya ekspor bahan baku berkedok ekspor produk setengah jadi 2. Adanya peningkatan industri rotan sintetis yang mengancam industri rotan Kab. Cirebon 3. Maraknya produk substitusi dari luar dengan harga bersaing

Penyusunan strategi pembangunan industri di Kabupaten Cirebon selain berdasarkan analisis SWOT juga memperhatikan konsep strategi pembangunan industri Jawa Barat sebagaimana disebutkan dalam Dokumen RPIP Jawa Barat. Konsep strategi pembangunan industri Jawa Barat memiliki 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Penguatan penyediaan bahan baku untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi, penyaluran secara lancar, meningkatkan substitusi impor, dan penguatan industri hulu penghasil bahan baku;
2. Penguatan proses untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan (*sustainable*), efisien, peningkatan teknologi perancangan dan teknologi pemrosesan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan peningkatan pengelolaan perusahaan;
3. Penguatan output dan distribusi (*logistik*) untuk meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dengan tingkat serapan yang tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor, penguatan

jaringan produksi dan distribusi (*Industri 4.0*), serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif;

4. Penguatan faktor pendukung, mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang baik, peningkatan pembiayaan dan penanaman modal, serta penataan kawasan industri.

Strategi pembangunan industri Kabupaten Cirebon yang diselaraskan dengan pilar strategi Jawa Barat yang selanjutnya terbagi dalam tiga pilar strategi dan 18 (delapan belas) arahan pembangunan industri Kabupaten Cirebon, yaitu:

Pertama, Pilar Peningkatan Produksi yang meliputi ketersediaan bahan baku dan teknologi dan desain produksi, terdiri dari tujuh strategi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
2. Pengembangan hilirisasi Industri Kabupaten Cirebon;
3. Peningkatan pemberdayaan industri berupa kebijakan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru, dan pemberian fasilitas;
4. peningkatan sinergitas pemerintah dan swasta dalam mewujudkan industri hijau baik pada industri baru dan eksisting;
5. Peningkatan teknologi desain dan teknologi produksi;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana industri;
7. Peningkatan kualitas produk industri melalui sertifikasi dan pemenuhan standar.

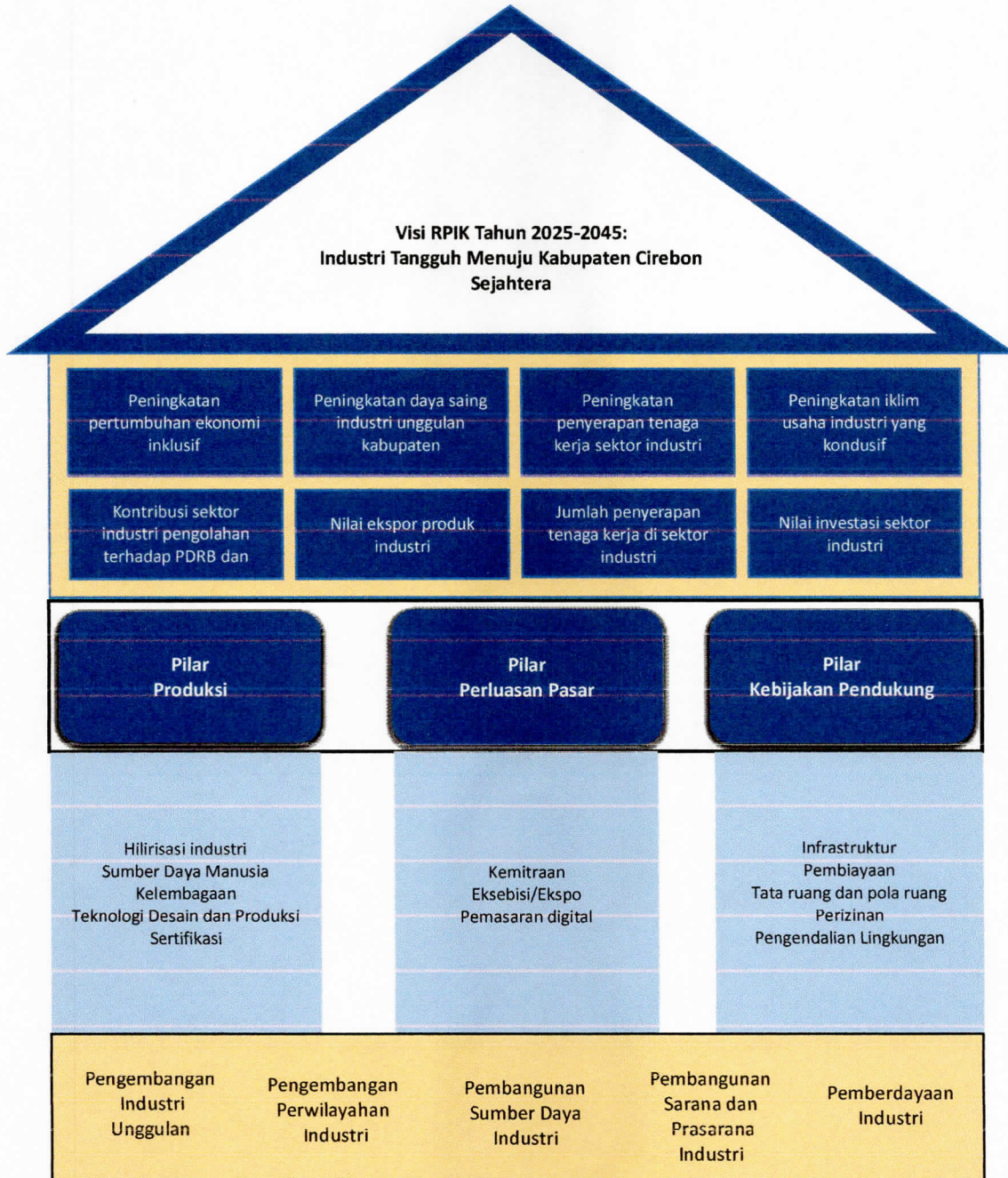
Kedua, Pilar Perluasan Pasar terdiri dari empat strategi, yaitu:

1. Pengintegrasian jejaring, baik untuk mendapatkan bahan baku, maupun perluasan pemasaran, melalui pendirian *holding* IKM atau *showroom* dan lembaga perwalian dagang;
2. Peningkatan kerjasama baik pada tingkat nasional maupun internasional pada bidang pengembangan industri;
3. Pengembangan kemitraan antar skala industri; dan
4. Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

Ketiga, Pilar Kebijakan Pendukung Pembangunan Industri terdiri dari tujuh strategi, yaitu:

1. Penataan perwilayahan industri (kawasan industri dan sentra IKM);
2. Peningkatan infrastruktur dan regulasi untuk menjamin kelancaran kegiatan industri;
3. Melakukan diversifikasi industri dengan tetap mempertahankan industri-industri unggulan daerah;
4. Memperkuat daya tarik industri untuk menarik industri-industri dari kawasan- kawasan industri lain di Jawa Barat (sekitar Karawang, Bekasi, Purwakarta);
5. Peningkatan peran dan sinergitas antar stakeholder terkait dalam penyediaan permodalan yang kompetitif;
6. Percepatan terwujudnya pembiayaan yang terintegrasi dengan digital teknologi; dan
7. Penguatan komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi.

Desain kerangka rencana pembangunan industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2045 yang memperhatikan kebijakan strategis (visi, misi, tujuan dan sasaran) dan strategi dan program pengembangan industri disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1 Kerangka Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2045

4.2 Program Pengembangan Industri

4.2.1 Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan

Penentuan industri unggulan Kabupaten Cirebon didasarkan pada pendekatan kompetensi inti daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional dan provinsi, serta tahapan dan program pengembangan industri unggulan Kabupaten Cirebon. Pada dasarnya, penetapan industri unggulan didasarkan pada analisis kondisi eksisting industri dan memperhatikan kriteria

sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, antara lain:

1. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
2. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan
3. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
4. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
5. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
6. dukungan sumber daya manusia;
7. kekhasan daerah;

Selain analisis di atas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan Kabupaten Cirebon juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu (1) daftar industri prioritas nasional berdasarkan RIPIN dan (2) daftar industri unggulan provinsi berdasarkan RPIP Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka industri unggulan Kabupaten Cirebon dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Dari penetapan industri secara *top-down* dari RPIP Jawa Barat dan komoditas-komoditas unggulan yang menjadi potensi industri *bottom-up*, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan potensi pengembangan industri, maka lima jenis industri unggulan diusulkan untuk menjadi fokus pengembangan industri Kabupaten Cirebon pada 20 tahun mendatang. Dari industri unggulan tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam jenis industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan di masa akan datang yaitu sebanyak 7 (tujuh) jenis industri seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini. Penetapan industri unggulan pada RPIP ini mengacu pula pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor 530/Kep/.404-Disperdagin/2020 tentang Penetapan Sentra Produk Unggulan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon.

Tabel 4.2 Industri Unggulan, Jenis Industri, dan Sebaran Lokasi Industri di Kabupaten Cirebon

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	KBLI	Lokasi (Kecamatan)
1.	Industri Makanan (10) dan Minuman (11)	Industri Makanan dan Minuman Olahan Berbasis Pertanian dan Perkebunan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran (103), Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim (105), Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati (106), Industri Makanan Lainnya (107), Industri Minuman (110).	Tersebar di 40 (empat puluh) kecamatan
		Industri Olahan Hasil Laut	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (102)	Jamblang, Klangeran, Plumbon, Waled, Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, Losari dan Kapetakan

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	KBLI	Lokasi (Kecamatan)
		Industri Pengolahan Garam	Industri Bumbu-Bumbuan dan Produk Masak Lainnya (1077), Industri Pengolahan Garam (10774)	Kapetakan, Losari, Gunungjati, Astanajapura, Suranenggala, Gebang, Mundu, dan Pangenan
2.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (16) dan Industri Furnitur (31)	Industri Kerajinan Berbahan Rotan, Kayu, dan Bambu	Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya (162)	Weru, Plered, Jamblang, Greged, Arjawinangun, Tengahtani, Talun, Dukupuntang, Ciwaringin, Astanajapura, Kedawung, Penganan, Depok, Mundu, Gunungjati, Palimanan, Gempol, Beber, dan Plumbon
		Industri Furnitur Berbahan Rotan dan Kayu	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya (161)	Weru, Plered, Jamblang, Arjawinangun, Tengahtani, Talun, Dukupuntang, Ciwaringin, Astanajapura, Kedawung, Penganan, Depok, Mundu, Gunungjati, Palimanan, Gempol, dan Plumbon
3.	Industri Tekstil (13) dan Industri Pakaian Jadi (14)	Industri Batik	Industri Batik (13134)	Ciwaringin, Tengahtani, Weru, dan Plered
		Industri Bahan dan Pakaian Jadi	(Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil (131), Industri Tekstil Lainnya (139), Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit	Susukan, Sumber, Weru, Pabedilan, Plumbon, Ciledug, Arjawinangun, Lemahabang, dan Talun

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	KBLI	Lokasi (Kecamatan)
			Berbulu (141), Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu (142), Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir (143), Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan (151), Industri Alas Kaki (152)	

Sumber: Keputusan Bupati Cirebon Nomor 530/Kep/.404-Disperdagin/2020

Selanjutnya, untuk mewujudkan industri Kabupaten Cirebon sesuai dengan visi RPIK yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya, disusun program yang menjadi arahan pengembangan industri dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Pendekatan untuk menyusun program didasarkan pada sinkronisasi program pengembangan industri prioritas nasional dan Jawa Barat, penahapan strategi pembangunan industri Kabupaten Cirebon, sinkronisasi tujuan dan target pencapaian industrialisasi, serta prediksi kondisi makro industri Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon. Pembangunan industri Kabupaten juga diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Secara lebih lengkap, pengembangan industri prioritas Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel di bawah ini.

Selain menyajikan program pembangunan industri, untuk meningkatkan daya saing industri unggulan daerah juga dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan baik itu internal SKPD Kabupaten Cirebon, tetapi juga *stakeholders* lain yang memiliki kesamaan visi dalam pembangunan industri.

4.2.1.1 Program Sektorl Pengembangan Industri Unggulan

Pada bagian ini akan disusun Program pengembangan industri unggulan berdasarkan jenis industri yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya. Pada setiap jenis industri unggulan diuraikan sasaran, strategi dan program yang akan dilakukan.

1. Industri Makanan dan Minuman Olahan Berbasis Pertanian dan Perkebunan

Tabel 4.3 Program Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Olahan Berbasis Pertanian dan Perkebunan

Sasaran			
2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045
1. Penguatan standardisasi dan sertifikasi produk; 2. Peningkatan kualitas penanganan bahan baku; 3. Optimalisasi penggunaan Bahan	1. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya industri; 2. Peningkatan penggunaan bahan baku ramah lingkungan; 3. Peningkatan proses produksi berbasis	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi; 2. Pengembangan dan diversifikasi produk; 3. Peningkatan akses pasar berbasis teknologi;	1. Menghasilkan berbagai produk inovatif berbasis bahan lokal dengan nilai tambah tinggi; 2. Membangun citra global produk berbasis kearifan lokal dengan

<p>Tambahan Pangan (BTP);</p> <p>4. Peningkatan pengolahan produk makanan dan minuman yang higienis dan aman untuk dikonsumsi;</p> <p>5. Peningkatan kualitas produk dan kemasan;</p> <p>6. Penguatan rantai pasok, distribusi dan pemasaran.</p>	<p>3R (<i>Reduce, Reuse, and Recycle</i>);</p> <p>4. Peningkatan penggunaan kemasan produk ramah lingkungan;</p> <p>5. Mendorong implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan.</p>		<p>standar internasional;</p> <p>3. Produk makanan dan minuman olahan berbasis pertanian dan perkebunan dari Kabupaten Cirebon menjadi pemain utama di pasar internasional</p>
Strategi			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri makanan dan minuman berbasis pertanian dan perkebunan melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan teknologi produksi dan kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan, pemasaran dan penguatan standardisasi dan sertifikasi produk. 2. Mengembangkan industri makanan dan minuman berbasis pertanian dan perkebunan melalui implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya industri. 3. Mengembangkan industri makanan dan minuman berbasis pertanian dan perkebunan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. 4. Meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan teknologi agar bahan baku berkualitas tinggi tersedia secara konsisten. 5. Membuka akses ke pasar global dengan kerja sama Perdagangan internasional, promosi digital, dan partisipasi aktif dalam pameran internasional. 			
Rencana Aksi			
2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas produk dan kemasan. 2. Meningkatkan fasilitas standardisasi dan sertifikasi produk; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya industri melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 4. Meningkatkan kemitraan ketersediaan bahan baku berkualitas dan akses pasar potensial; 5. Menyelenggarakan kompetisi Industri Kabupaten Cirebon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efisiensi sumber daya industri berorientasi ramah lingkungan; 2. Meningkatkan industri ramah lingkungan melalui pelatihan, bimtek dan <i>benchmarking</i>; 3. Meningkatkan fasilitas dan pendampingan implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan; 4. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada industri berprestasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menerapkan teknologi produksi berbasis inovasi; 2. Mengembangkan diversifikasi produk melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan produksi. 4. Meningkatkan jejaring dan kemitraan pemasaran berbasis teknologi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan strategi diversifikasi pasar internasional untuk menembus pasar Asia, Eropa, dan Amerika 2. Sertifikasi internasional untuk keamanan dan kualitas produk; 3. Meningkatkan kemitraan dengan perusahaan multinasional untuk transfer teknologi dan perluasan pasar; 4. Kampanye branding "Makanan dan Minuman Olahan Cirebon" di tingkat global, dengan penekanan pada keunikan lokal.
Stakeholders			
<p>Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat</p>			

2. Industri Olahan Hasil Laut

Tabel 4.4 Program Pengembangan Industri Olahan Hasil Laut

Sasaran			
2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan rantai nilai industri olahan hasil laut; 2. Penguatan sarana dan prasarana; 3. Penguatan standardisasi dan sertifikasi produk; 4. Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku; 5. Optimalisasi penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP); 6. Peningkatan pengolahan produk olahan hasil laut yang higienis dan aman untuk dikonsumsi; 7. Peningkatan kualitas produk dan kemasan; 8. Penguatan rantai pasok, distribusi dan pemasaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya industri; 2. Peningkatan penggunaan bahan baku ramah lingkungan; 3. Peningkatan proses produksi berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, and Recycle</i>); 4. Peningkatan penggunaan kemasan produk ramah lingkungan; 5. Mendorong implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi; 2. Pengembangan dan diversifikasi produk; 3. Peningkatan akses pasar berbasis teknologi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi produk olahan hasil laut bernilai tambah tinggi; 2. Pengembangan teknologi lokal untuk pengolahan hasil laut, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor mesin dan peralatan industri; 3. Produk olahan hasil laut Kab. Cirebon menjadi merek unggulan yang kompetitif di pasar internasional
Strategi			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri olahan hasil laut melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan teknologi produksi dan kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan, pemasaran dan penguatan standardisasi dan sertifikasi produk. 2. Mengembangkan industri olahan hasil laut melalui implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya industri. 3. Mengembangkan industri olahan hasil laut melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk; 4. Mendukung UMKM dalam memproduksi produk turunan hasil laut yang memenuhi pasar lokal dan ekspor; 5. Mengembangkan identitas produk hasil laut Cirebon sebagai merek premium di pasar global. 			
Rencana Aksi			
2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas produk dan kemasan. 2. Meningkatkan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya industri melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efisiensi sumber daya industri berorientasi ramah lingkungan; 2. Meningkatkan industri ramah lingkungan melalui pelatihan, bimtek dan <i>benchmarking</i>; 3. Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan implementasi industri hijau dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menerapkan teknologi produksi berbasis inovasi; 2. Mengembangkan diversifikasi produk melalui pelatihan, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kawasan industri olahan hasil laut dengan fasilitas modern; 2. Mengembangkan pusat riset hasil laut di Kabupaten Cirebon; 3. Menjalin kerja sama dengan lembaga internasional dalam penelitian teknologi

Sasaran			
2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045
4. Meningkatkan kemitraan ketersediaan bahan baku berkualitas dan akses pasar potensial. 5. Menyelenggarakan kompetisi Industri Kabupaten Cirebon.	sistem manajemen lingkungan; 4. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada industri berprestasi.	teknologi dan produksi. 4. Meningkatkan jejaring dan kemitraan pemasaran berbasis teknologi.	pengolahan hasil laut dan ekspansi pasar;
Stakeholders			
Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat			

3. Industri Pengolahan Garam

Tabel 4.5 Program Pengembangan Industri Pengolahan Garam

Sasaran			
2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045
1. Peningkatan ketersediaan bahan baku garam; 2. Peningkatan produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium (GKY); 3. Peningkatan kemitraan stakeholder industri pengolahan garam. 4. Penguatan standardisasi dan sertifikasi produk; 5. Peningkatan kualitas produk dan kemasan; 6. Penguatan rantai pasok, distribusi dan pemasaran.	1. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya industri; 2. Peningkatan proses produksi berbasis 3R (<i>Recycle, Reduce, Reuse</i>); 3. Peningkatan penggunaan kemasan produk ramah lingkungan; 4. Mendorong implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan.	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi berbasis inovasi untuk memenuhi kebutuhan garam industri; 2. Pengembangan dan diversifikasi produk; 3. Peningkatan akses pasar berbasis teknologi;	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk garam olahan yang memenuhi standar industri farmasi, makanan, dan kosmetik; 2. Peningkatan pendapatan petani garam melalui modernisasi teknologi produksi dan integrasi dengan industri hilir; 3. Peningkatan kontribusi industri pengolahan garam terhadap perekonomian daerah
Strategi			
1. Mengembangkan industri pengolahan garam melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan teknologi produksi dan kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan, pemasaran dan penguatan standardisasi dan sertifikasi produk. 2. Mengembangkan industri pengolahan garam melalui implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya industri. 3. Mengembangkan industri pengolahan garam melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan garam industri dan substitusi impor. 4. Membangun kawasan khusus industri garam dekat wilayah produksi utama untuk memudahkan integrasi hulu-hilir.			

Rencana Aksi			
2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan merevitalisasi tambak garam dengan teknologi terkini untuk meningkatkan produktivitas 2. Meningkatkan kualitas produk dan kemasan. 3. Meningkatkan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk; 4. Membangun sentra pengolahan garam untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk akhir; 5. Memberikan dukungan pembiayaan dan distribusi peralatan modern bagi pelaku industri garam skala kecil dan menengah 6. Meningkatkan kualitas sumber daya industri melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 7. Meningkatkan kemitraan ketersediaan bahan baku berkualitas dan akses pasar potensial; 8. Menyelenggarakan kompetisi Industri Kabupaten Cirebon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efisiensi sumber daya industri berorientasi ramah lingkungan; 2. Meningkatkan industri ramah lingkungan melalui pelatihan, bimtek dan <i>benchmarking</i>; 3. Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan; 4. Mengembangkan teknologi baru dalam pengolahan garam melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset; 5. Mempercepat proses sertifikasi dan standarisasi produk garam industri untuk memperkuat daya saing; 6. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada industri berprestasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menerapkan teknologi produksi berbasis inovasi untuk memenuhi kebutuhan garam industri dan substitusi impor; 2. Mengembangkan diversifikasi produk melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan produksi. 4. Meningkatkan jejaring dan kemitraan pemasaran berbasis teknologi; 5. Membangun kawasan industri garam yang terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan Perdagangan; 6. Mengembangkan produk garam dengan nilai tambah tinggi seperti garam beryodium tinggi, garam farmasi, dan garam elektrolit untuk industri kesehatan dan makanan fungsional 7. Mengirimkan tenaga kerja industri garam ke luar negeri untuk studi dan <i>benchmarking</i>, serta mengundang pakar internasional untuk mempercepat adopsi teknologi canggih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun fasilitas penyimpanan dan pengeringan modern di sentra garam; 2. Mengembangkan kawasan industri garam yang telah terbangun; 3. Menjalin kemitraan dengan perusahaan besar dalam pemasaran produk olahan garam lokal; 4. Memperkenalkan label "Garam Premium Cirebon" untuk memperkuat daya saing produk di pasar nasional dan internasional.
Stakeholders			
Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat			

4. Industri Kerajinan Berbahan Rotan, Kayu dan Bambu

Tabel 4.6 Program Pengembangan Industri Kerajinan Berbahan Rotan, Kayu dan Bambu

Sasaran			
2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan bahan baku, rantai pasok, distribusi dan pemasaran; 2. Penguatan legalitas bahan baku industri; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya industri; 4. Regenerasi sumber daya manusia industri; 5. Penguasaan tren pasar terkini untuk membangun akses pasar global; 6. Penguatan standardisasi, sertifikasi dan kualitas produk; 7. Peningkatan kualitas penanganan bahan baku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya industri; 2. Peningkatan penggunaan bahan baku ramah lingkungan; 3. Peningkatan proses produksi berbasis 3R (Recycle, Reduce, Reuse); 4. Peningkatan dan penciptaan produk ramah lingkungan; 5. Mendorong implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi dan inovasi; 2. Pengembangan dan diversifikasi produk; 3. Peningkatan akses pasar berbasis teknologi dan inovasi; 4. Peningkatan desain produk yang berorientasi ekspor; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan produk inovatif yang memadukan desain modern dengan warisan budaya lokal; 2. Menciptakan citra dan <i>brand</i> yang kuat untuk produk kerajinan Kab. Cirebon
Strategi			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri kerajinan berbahan rotan, kayu dan bambu melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan teknologi produksi, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan, pemasaran, penguatan desain dan standardisasi produk berorientasi ekspor; 2. Mengembangkan industri kerajinan berbahan rotan, kayu dan bambu melalui implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya industri. 3. Mengembangkan industri kerajinan berbahan rotan, kayu dan bambu melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi; 4. Mendorong kolaborasi dengan desainer lokal dan internasional untuk menciptakan produk kerajinan unik; 5. Menciptakan brand “Crafted in Cirebon” untuk membangun identitas produk. 6. Melindungi hak cipta pengrajin melalui regulasi perlindungan desain produk. 			
Rencana Aksi			
2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas produk dan desain; 2. Meningkatkan fasilitas standardisasi dan sertifikasi produk; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya industri melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efisiensi sumber daya industri berorientasi ramah lingkungan; 2. Meningkatkan industri ramah lingkungan melalui pelatihan, bimtek dan <i>benchmarking</i>; 3. Meningkatkan fasilitas dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menerapkan teknologi produksi berbasis inovasi; 2. Mengembangkan diversifikasi produk melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kemitraan antara desainer lokal dan internasional untuk menciptakan produk kerajinan baru; 2. Evaluasi tren pasar untuk terus mengembangkan desain yang sesuai kebutuhan konsumen global.

Sasaran			
2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045
magang dan <i>benchmarking</i> ; 4. Meningkatkan kemitraan ketersediaan bahan baku dan akses pasar potensial; 5. Pemetaan rantai nilai industri untuk identifikasi ketersediaan dan potensi bahan baku; 6. Fasilitasi kerja sama ketersediaan bahan baku dengan daerah penghasil bahan baku. 7. Menyelenggarakan kompetisi Industri Kabupaten Cirebon.	pendampingan implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan; 4. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada industri berprestasi;	3. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan produksi. 4. Meningkatkan jejaring dan kemitraan pemasaran berbasis teknologi dan inovasi; 5. Memfasilitasi industri untuk pengembangan desain terkini berorientasi ekspor; 6. Meningkatkan kemitraan dengan pihak terkait untuk pengembangan desain produk;	3. Pembuatan katalog digital produk kerajinan berbahan rotan, kayu, dan bambu; 4. Peluncuran brand lokal “ <i>Crafted in Cirebon</i> ” untuk memperkuat identitas produk kerajinan.
Stakeholders			
Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat			

5. Industri Furnitur Berbahan Rotan, Kayu dan Bambu

Tabel 4.7 Program Pengembangan Industri Furnitur Berbahan Rotan, Kayu dan Bambu

Sasaran			
2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045
1. Peningkatan ketersediaan bahan baku, rantai pasok, distribusi dan pemasaran; 2. Penguatan legalitas bahan baku industri; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya industri; 4. Regenerasi sumber daya manusia industri; 5. Penguasaan tren pasar terkini untuk membangun akses pasar global; 6. Penguatan standarisasi, sertifikasi dan kualitas produk;	1. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya industri; 2. Peningkatan penggunaan bahan baku ramah lingkungan; 3. Peningkatan proses produksi berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, and Recycle</i>); 4. Peningkatan dan penciptaan produk ramah lingkungan; 5. Mendorong implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan.	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi dan inovasi; 2. Pengembangan dan diversifikasi produk; 3. Peningkatan akses pasar berbasis teknologi dan inovasi;	1. Memperluas akses pasar furnitur berbahan lokal ke pasar ekspor dengan meningkatkan branding dan kualitas produk; 2. Menciptakan produk furnitur bernilai tambah dengan desain inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar global; 3. Membina UMKM furnitur untuk meningkatkan keterampilan teknis, akses modal, dan koneksi pasar.

7. Peningkatan kualitas penanganan bahan baku.			
Strategi			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri furnitur berbahan rotan, kayu dan bambu melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan teknologi produksi, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan, pemasaran, penguatan desain dan standardisasi produk berorientasi ekspor; 2. Mengembangkan industri furnitur berbahan rotan, kayu dan bambu melalui implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya industri. 3. Mengembangkan industri furnitur berbahan rotan, kayu dan bambu melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi; 4. Mengikuti pameran furnitur internasional untuk mempromosikan produk; 5. Membangun kerja sama dengan investor untuk membangun pusat produksi furnitur berskala besar. 			
Rencana Aksi			
2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas produk dan desain; 2. Meningkatkan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya industri melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 4. Meningkatkan kemitraan ketersediaan bahan baku dan akses pasar potensial; 5. Pemetaan rantai nilai industri untuk identifikasi ketersediaan dan potensi bahan baku; 6. Fasilitasi kerja sama ketersediaan bahan baku dengan daerah penghasil bahan baku. 7. Menyelenggarakan kompetisi Industri Kabupaten Cirebon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efisiensi sumber daya industri berorientasi ramah lingkungan; 2. Meningkatkan industri ramah lingkungan melalui pelatihan, bimtek dan <i>benchmarking</i>; 3. Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan; 4. Pengelolaan bahan baku berkelanjutan melalui sertifikasi ekolabel 5. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada industri berprestasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menerapkan teknologi produksi berbasis inovasi; 2. Mengembangkan diversifikasi produk melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan produksi. 4. Meningkatkan jejaring dan kemitraan pemasaran berbasis teknologi dan inovasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi lini produksi berstandar ekspor di sentra furnitur; 2. Memfasilitasi industri untuk pengembangan desain terkini berorientasi ekspor; 3. Meningkatkan kemitraan dengan pihak terkait untuk pengembangan desain produk; 4. Evaluasi produk untuk terus menyesuaikan dengan permintaan pasar global.
Stakeholders			
<p>Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat</p>			

5. Industri Batik

Tabel 4.8 Program Pengembangan Industri Batik

Sasaran			
2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan bahan baku, rantai pasok, distribusi dan pemasaran; 2. Peningkatan kapasitas sumber daya industri; 3. Regenerasi sumber daya manusia industri; 4. Penguasaan tren pasar terkini untuk membangun akses pasar global; 5. Penguatan standardisasi, sertifikasi dan kualitas produk; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya industri; 2. Peningkatan penggunaan bahan baku ramah lingkungan; 3. Peningkatan proses produksi berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, and Recycle</i>); 4. Peningkatan dan penciptaan produk ramah lingkungan; 5. Mendorong implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi dan inovasi; 2. Pengembangan dan diversifikasi produk; 3. Peningkatan akses pasar berbasis teknologi dan inovasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat branding batik Cirebon sebagai produk unggulan dengan ciri khas desain lokal yang dikenal secara internasional; 2. Peningkatan desain produk yang berorientasi pasar; 3. Memanfaatkan teknologi digital untuk desain batik, promosi, dan penjualan secara global
Strategi			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri batik melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan teknologi produksi, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan, pemasaran, penguatan desain dan standardisasi produk; 2. Mengembangkan industri batik melalui implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya industri. 3. Mengembangkan industri batik melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi; 4. Mengembangkan produk batik non-pakaian seperti home décor, aksesoris, dan kemasan premium; 5. Menciptakan identitas global untuk batik Cirebon dengan mempromosikan nilai budaya lokal. 			
Rencana Aksi			
2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas produk dan desain; 2. Meningkatkan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya industri melalui pelatihan, bimtek,, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 4. Meningkatkan kemitraan ketersediaan bahan baku dan akses pasar potensial; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efisiensi sumber daya industri berorientasi ramah lingkungan; 2. Meningkatkan industri ramah lingkungan melalui pelatihan, bimtek, <i>benchmarking</i> dan fasilitasi; 3. Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan; 4. Membcirikan apresiasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menerapkan teknologi produksi berbasis inovasi; 2. Mengembangkan diversifikasi produk melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan produksi. 4. Meningkatkan jejaring dan kemitraan pemasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan teknologi tekstil cerdas untuk batik premium; 2. Memfasilitasi industri untuk pengembangan desain terkini berorientasi pasar; 3. Meningkatkan kemitraan dengan pihak terkait untuk pengembangan desain produk; 4. Digitalisasi katalog batik Cirebon dengan informasi detail setiap motif dan filosofi.

Sasaran			
2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
5. Menyelenggarakan kompetisi Industri Kabupaten Cirebon.	penghargaan kepada industri berprestasi. 5. Mengadopsi sertifikasi keberlanjutan (<i>eco-label</i>) untuk produk batik	berbasis teknologi dan inovasi; 5. Mengembangkan pewarna alam berbasis sumber daya lokal.	
Stakeholders			
Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat			

5. Industri Bahan dan Pakaian Jadi

Tabel 4.9 Program Pengembangan Industri Bahan dan Pakaian Jadi

Sasaran			
2025 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan bahan baku, rantai pasok, distribusi dan pemasaran; 2. Peningkatan kapasitas sumber daya industri; 3. Penguatan standarisasi, sertifikasi dan kualitas produk; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya industri; 2. Peningkatan penggunaan bahan baku ramah lingkungan; 3. Peningkatan proses produksi berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, and Recycle</i>); 4. Peningkatan dan penciptaan produk ramah lingkungan; 5. Mendorong implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi dan inovasi; 2. Pengembangan dan diversifikasi produk; 3. Peningkatan akses pasar berbasis teknologi dan inovasi; 4. Peningkatan desain produk yang berorientasi pasar; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat posisi industri bahan tekstil dan pakaian jadi dari Cirebon sebagai salah satu pusat produksi unggulan di Indonesia; 2. Penguasaan tren pasar terkini untuk membangun akses pasar global;
Strategi			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri bahan dan pakaian jadi melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan teknologi produksi, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan, pemasaran, penguatan desain dan standarisasi produk; 2. Mengembangkan industri bahan dan pakaian jadi melalui implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya industri. 3. Mengembangkan industri bahan dan pakaian jadi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi; 4. Membentuk sentra industri terpadu untuk bahan dan pakaian jadi, yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti pusat pelatihan dan laboratorium inovasi 			

Rencana Aksi			
2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas produk dan desain; 2. Meningkatkan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya industri melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 4. Meningkatkan kemitraan ketersediaan bahan baku dan akses pasar potensial; 5. Menyelenggarakan kompetisi Industri Kabupaten Cirebon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efisiensi sumber daya industri berorientasi ramah lingkungan; 2. Meningkatkan industri ramah lingkungan melalui pelatihan, bimtek, <i>benchmarking</i> dan fasilitas; 3. Meningkatkan fasilitas dan pendampingan implementasi industri hijau dan sistem manajemen lingkungan; 4. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada industri berprestasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menerapkan teknologi produksi berbasis inovasi; 2. Mengembangkan diversifikasi produk melalui pelatihan, bimtek, pendampingan, magang dan <i>benchmarking</i>; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan produksi. 4. Meningkatkan jejaring dan kemitraan pemasaran berbasis teknologi dan inovasi; 5. Memfasilitasi industri untuk pengembangan desain terkini berorientasi pasar; 6. Meningkatkan kemitraan dengan pihak terkait untuk pengembangan desain produk; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun zona industri khusus untuk bahan dan pakaian jadi di Cirebon; 2. Mengintegrasikan produk pakaian jadi ke dalam pasar global melalui <i>e-commerce</i>; 3. Evaluasi produk untuk terus menyesuaikan dengan permintaan pasar global.
Stakeholders			
Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat			

4.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Penetapan indikasi program pengembangan wilayah industri di Kabupaten Cirebon perlu memperhatikan tujuan, sasaran, dan lingkup pengembangan perwilayahan industri yang direncanakan.

1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan. Lahan pada KPI digunakan untuk membangun baik Kawasan Industri maupun industri-industri yang tidak dibuat di Kawasan Industri karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi untuk KPI ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Cirebon 2024-2044 disebutkan bahwa KPI di Kabupaten Cirebon direncanakan seluas kurang lebih lebih 4.988 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar yang tersebar di 22 (dua puluh

dua) kecamatan antara lain Kecamatan Arjawinangun, Astanajapura, Babakan, Ciledug, Ciwaringin, Depok, Gebang, Gempol, Jamblang, Kedawung, Lemahabang, Losari, Mundu, Pabedilan, Pabuaran, Palimanan, Pangenan, Piered, Plumbon, Susukan, Talun, dan Weru.

Sedangkan Kawasan Industri (KI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri yang dimaksud sebagai Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Berdasarkan RIPIN, luasan kawasan industri minimal sebesar 50 Hektar. Mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, wilayah di Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu KSP Mundu-Losari. KSP Mundu-Losari merupakan kawasan industri eksisting yang terletak di perbatasan pesisir dan perbatasan provinsi, dimana dalam pengembangan wilayahnya perlu sinkronisasi penataan ruang darat dan pesisir serta dengan provinsi tetangga.

Selanjutnya untuk menyelaraskan pada visi dan tujuan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cirebon, maka perlu disusun program pengembangan KPI dan KI berdasarkan koridor dan jenis industri yang dikembangkan seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri

No.	Tema Program	Rencana Aksi				Stake-Holders
		2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045	
1.	Perencanaan pengembangan industri	1. Pemetaan rantai nilai industri dengan fokus pada pasokan bahan baku dan pemasaran 2. Perencanaan pengembangan potensi industri Kabupaten Cirebon	1. Pemetaan rantai nilai industri dengan fokus pada teknologi, SDM, energi 2. Perencanaan dan pengembangan potensi industri Kabupaten Cirebon	1. Pemetaan rantai nilai industri dengan fokus pada teknologi, SDM, energi 2. Perencanaan dan pengembangan potensi industri Kabupaten Cirebon	1. Optimalisasi rantai nilai industri dengan penerapan industri 4.0 dan keberlanjutan 2. Implementasi roadmap pengembangan industri berbasis data spasial dan ekonomi daerah	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, BKAD, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
2.	Koordinasi perwilayahan	Koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan, rencana penyediaan energi, rencana penyediaan SDM dan teknologi	Koordinasi dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan dan penyediaan bahan baku industri	Koordinasi dalam penyediaan bahan baku industri	1. Optimalisasi tata ruang industri berbasis ekonomi hijau dan rendah karbon. 2. Penguatan sinergi antar wilayah dalam penyediaan bahan baku industri.	

No.	Tema Program	Rencana Aksi				Stake-Holders
		2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045	
3.	Pembangunan Kawasan Industri	1. Pemetaan potensi pembangunan kawasan industri 2. Promosi dan sosialisasi kepada masyarakat dan investor kawasan industri	Mendukung rencana pembangunan kawasan industri	Mendukung rencana pembangunan kawasan industri	Evaluasi dan penguatan regulasi kawasan industri berbasis lingkungan dan efisiensi energi;	
4.	Pembangunan infrastruktur Kawasan Industri	Perencanaan detail pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan penanganan limbah dalam dan antar kawasan industri/kawasan peruntukan industri, pengembangan saluran utilitas terpadu menuju kawasan industri	Koordinasi pembangunan infrastruktur pendukung perindustrian dengan lembaga terkait, pengembangan saluran utilitas terpadu menuju kawasan industri	Koordinasi pembangunan infrastruktur pendukung perindustrian dengan lembaga terkait	Koordinasi pembangunan infrastruktur pendukung perindustrian dengan lembaga terkait	
5.	Pengawasan dan Pengembangan Kawasan Industri	1. Koordinasi pembuatan peraturan kawasan industri; pengawasan kesesuaian pelaksanaan peraturan kawasan industri; 2. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan terkait manajemen kawasan industri	1. Koordinasi pembuatan peraturan kawasan industri; pengawasan kesesuaian pelaksanaan peraturan kawasan industri; 2. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan terkait manajemen kawasan industri	1. Koordinasi pembuatan peraturan kawasan industri; pengawasan kesesuaian pelaksanaan peraturan kawasan industri; 2. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan terkait manajemen kawasan industri	Evaluasi dan revisi kebijakan pengelolaan kawasan industri berbasis keberlanjutan	
6.	Promosi investasi industri	1. Promosi Investasi Industri kepada penanam modal dalam negeri dan asing; 2. Pembangunan <i>brand awareness</i> produk hasil industri Kabupaten Cirebon	Promosi Investasi Industri kepada penanam modal dalam negeri dan asing,	Promosi Investasi Industri kepada penanam modal dalam negeri dan asing	1. Penerapan strategi investasi berbasis ekosistem industri hijau 2. Peningkatan kerja sama internasional dalam investasi industri strategis	

2. Sentra IKM

Salah satu sasaran pembangunan industri adalah pengembangan minimal satu Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada setiap kecamatan. Sebagian besar program pengembangan Sentra IKM akan dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait perindustrian pada Kabupaten/Kota. Program terkait pengembangan Sentra IKM ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11 Program Pengembangan Sentra IKM

No.	Tema Program	Rencana Aksi				Stakeholders
		2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045	
1.	Sentra IKM kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan potensi pembangunan 2. Pemetaan potensi IKM kecamatan 3. Penyusunan rencana 4. Pembangunan sarana pengelolaan limbah 5. Pengawasan pengelolaan limbah 6. Pembentukan kelembagaan sentra IKM harus ada di semua sentra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur 2. Pembangunan sentra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi operasional sentra 2. Pembinaan dan penguatan sentra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standardisasi produk IKM berbasis kecamatan sesuai standar internasional; 2. Menggunakan analisis data besar (<i>big data</i>) untuk memantau performa dan peluang pasar internasional 	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKAD, Bappenda, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah pusat
2.	Sentra IKM unggulan kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan sentra yang telah ada 2. Evaluasi keberjalanan sentra 3. Penetapan sentra unggulan 4. Pembentukan kelembagaan sentra IKM 5. Pengaturan kebijakan yang memberikan berbagai 6. Pembangunan sarana pengelolaan limbah 7. Pengawasan pengelolaan limbah 8. Pembentukan kelembagaan sentra IKM harus ada di semua sentra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penguatan sentra 2. Penambahan kapasitas sentra 	Perencanaan pengembangan sentra IKM unggulan menjadi sentra IKM berbasis industri 4.0 (kolaborasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan roadmap ekspor produk kecamatan ke pasar global; 2. Melakukan survei kebutuhan pasar global untuk mengarahkan pengembangan produk 	
3.	Sentra IKM rotan berbasis industri 4.0 (kolaborasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan potensi pembangunan 2. Penyusunan rencana 3. Pembentukan kelembagaan 4. Pengaturan kebijakan yang memberikan berbagai kemudahan untuk pengusahaan di dalam sentra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tanah 2. Pembangunan infrastruktur 3. Pembangunan Sentra 4. Pembinaan dan penguatan sentra 5. Pelaksanaan program inkubator untuk pengusaha muda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi keberjalanan sentra 2. Penguatan kolaborasi dengan sentra IKM berbasis industri 4.0 lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan produk rotan yang inovatif seperti furnitur multifungsi dan ramah lingkungan; 2. Memastikan semua produk rotan memiliki sertifikasi ramah lingkungan 	

No.	Tema Program	Rencana Aksi				Stakeholders
		2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045	
		5. Pembangunan sarana pengelolaan limbah 6. Pengawasan pengelolaan limbah 7. Pembentukan kelembagaan sentra IKM harus ada di semua sentra				

4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pendekatan penyusunan indikasi program pembangunan sumber daya industri berdasarkan pada empat komponen analisis, yaitu: (1) analisis kebijakan pembangunan sumber daya industri Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon; (2) analisis sinkronisasi dengan program pembangunan sumber daya industri baik skala nasional maupun provinsi; (3) analisis sinkronisasi dengan tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kabupaten Cirebon; dan (iv) analisis prediksi perkembangan makro ekonomi dan industri Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon.

Pembangunan industri perlu juga memperhatikan faktor-faktor sumber daya industri, yang mencakup sumber daya alam; sumber daya manusia industri; sumber daya teknologi, inovasi, kreativitas; serta pembiayaan. Program-program yang terkait sumber daya industri terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Program Pembangunan Sumber Daya Industri

No.	Tema Program	Rencana Aksi				Stake-holders
		2025-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	
Pengembangan Sumber Daya Alam						
1.	Penentuan lokasi tepat guna suplai bahan mentah industri	Pemetaan jenis, jumlah, serta lokasi cadangan sumber daya alam	Perencanaan penyediaan sumber daya alam dan penjalinan kerjasama dengan provinsi yang kaya akan sumber daya alam tersebut	Penetapan zona khusus sumber bahan mentah berbasis prinsip efisiensi dan keberlanjutan	Evaluasi berkala terkait rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKAD, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
2.	Perancangan teknologi transportasi bahan mentah industri	Kajian awal jaringan transportasi untuk distribusi sumber daya alam	Implementasi rancangan teknologi transportasi dan distribusi sumber daya alam	Pengembangan sistem transportasi berbasis energi terbarukan untuk bahan mentah	Evaluasi dan perbaikan teknologi transportasi dan distribusi sumber daya alam	
3.	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan	Kajian lingkungan (AMDAL) terkait sumber daya alam yang digunakan untuk	Sinkronisasi hasil kajian dengan implementasi rancangan teknologi transportasi dan	Penerapan teknologi daur ulang untuk memanfaatkan kembali limbah	Evaluasi berkala untuk menjamin terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam	

No.	Tema Program	Rencana Aksi				Stake-holders
		2025-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	
	ramah lingkungan	setiap sektor industri unggulan	penyaluran sumber daya alam	industri sebagai bahan baku	secara efisien dan ramah lingkungan	
Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri						
1.	Pelatihan Vokasi Berbasis Industri Bagi tenaga kerja lulusan SMA/SMK sederajat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelatihan vokasi berbasis industri lokal 2. Kemitraan dengan industri untuk magang 3. Sertifikasi keterampilan 4. Penyusunan modul pelatihan berbasis kebutuhan 5. Monitoring dan evaluasi lulusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspansi program ke sektor industri baru 2. Pembentukan pusat pelatihan Industri Kabupaten Cirebon 3. Integrasi AI dan otomasi dalam pelatihan 4. Kolaborasi lintas sektor 5. Pendampingan alumni pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kurikulum vokasi berbasis teknologi 2. Sertifikasi nasional dan internasional 3. Penyesuaian kurikulum dengan industri 5.0 4. Pembuatan cluster industri lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pelatihan berskala internasional 2. Kerjasama dengan perusahaan internasional untuk penyelenggaraan magang bersertifikat 	Disperdagin, Disnaker, Diskominfo, DiskUKM, Perguruan Tinggi, Disdik Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ketenagakerjaan)
2.	Pengembangan Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelatihan wirausaha berbasis komunitas 2. Pendampingan wirausaha muda 3. Pameran dan expo produk lokal 4. Program pelatihan pengelolaan keuangan 5. Program bisnis ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inkubasi bisnis skala kecil 2. Kemitraan dengan UMKM 3. Akses permodalan 4. Program branding dan pemasaran digital 5. Akselerator bisnis regional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi UMKM berbasis teknologi 2. Digitalisasi UMKM 3. Platform e-commerce lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspansi pasar global 2. Pusat UMKM berdaya saing 	
3.	Pengembangan akademi komunitas (D-1) untuk menghasilkan SDM tepat guna	Kajian antara ketersediaan dan kebutuhan kompetensi lembaga pendidikan saat ini	Penyediaan pelatih dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk lembaga pendidikan atau akademi komunitas	Sertifikasi lulusan akademi komunitas sesuai standar nasional dan internasional	Evaluasi penyerapan angkatan kerja di industri dan penyesuaian kebutuhan kompetensi secara berkala	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKPSDM, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah pusat
4.	Pemberian diklat dan pendampingan untuk pelaku industri	Penyelenggaraan diklat manajemen usaha bagi pelaku industri kecil dan menengah	<p>Pemberian pelatihan intensif tentang efisiensi produksi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan</p> <p>Pendampingan berkelanjutan melalui konsultasi bisnis dan pengelolaan keuangan</p>	Pengawasan dan survei berkala terhadap kompetensi pelaku industri dengan kebutuhan industri terkini di pasar	Evaluasi dampak program pendampingan untuk memastikan peningkatan kinerja pelaku industri	

No.	Tema Program	Rencana Aksi				Stake-holders
		2025-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	
Pengembangan Sumber Daya Teknologi, Inovasi, dan Kreativitas						
1.	Adaptasi teknologi baru melalui sinergi dan program kerjasama litbang dengan balai-balai industri dan lembaga riset	Kajian potensi teknologi baru untuk tingkatkan daya saing kompetitif industri	Melakukan implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant pada sektor industri unggulan	Implementasi pengembangan teknologi baru atau pendukung di sektor industri non- unggulan	Penyediaan insentif bagi balai industri dan lembaga riset yang menghasilkan inovasi teknologi tepat guna	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah pusat
2.	Pengembangan sentra industri virtual berbasis internet	Pendataan dan validasi pelaku industri terkait, serta pembentukan sistem sentra industri virtual	Pembangunan platform digital untuk sentra industri virtual yang mengintegrasikan pelaku usaha, konsumen, dan penyedia bahan baku	Pemberian dukungan promosi, pemasaran produk inovatif, konsultasi, serta pelatihan teknologi dan desain pada sentra industri virtual	Evaluasi berkala terhadap keberjalanan sentra industri virtual, serta penyesuaian bentuk kerja sama antara pemerintah dan sentra industri virtual	
Pengembangan Sumber Daya Pembiayaan						
1.	Pengembangan lembaga pembiayaan industri melalui cara konvensional	Penambahan akses pembiayaan murah bagi IKM dan pelaku industri unggulan, melalui kerja sama dengan penanam modal (asing maupun lokal)	Inisiasi akses pembiayaan kepada pelaku usaha Ultra- Mikro (Skema Kementerian Keuangan)	Upaya pemerataan pembiayaan industri untuk seluruh sektor, termasuk industri nonunggulan	Kolaborasi dengan perbankan nasional untuk menciptakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan industri	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKAD, Bapenda, DPMD, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah pusat
2.	Pengembangan moda pembiayaan non-konvensional berbasis <i>financial technology</i> (fintech)	Kajian regulasi pembiayaan non-konvensional dengan dinas terkait, seperti BKPM	Pembentukan konsep program pembiayaan non-konvensional untuk pelaku industri, serta inisiasi program secara bertahap	Penyediaan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor industri	Evaluasi dan pengembangan moda pembiayaan non-konvensional secara menyeluruh pada sektor industri	

4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana dapat berupa dukungan infrastruktur dan energi serta disusunnya kebijakan dan regulasi. Kebijakan atau regulasi erat kaitannya dengan perizinan dan pengendalian lokasi, perizinan dan pengendalian investasi, serta pengendalian lingkungan. Sedangkan dukungan infrastruktur dan energi meliputi perencanaan pengembangan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan sanitasi, transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang. Program-program terkait pengembangan sarana dan prasarana industri dirangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

No.	Tema Program	Rencana Aksi				Stake holders
		2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045	
Energi						
1.	Pengembangan Energi Listrik	1. Pemetaan dan perencanaan kebutuhan kelistrikan terkait industri 2. Pemeliharaan jaringan kelistrikan industri	1. Pembangunan Gardu Induk 2. Pembangunan jaringan transmisi listrik 3. Pemeliharaan jaringan kelistrikan industri	1. Pengembangan energi listrik baru dan terbarukan 2. Pembangunan gardu induk 3. Pembangunan jaringan transmisi listrik 4. Pemeliharaan jaringan kelistrikan industri	Penerapan teknologi penyimpanan energi (<i>battery storage</i>) skala besar untuk mendukung kestabilan pasokan listrik	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
2.	Pengembangan Energi Gas Alam	Pemetaan dan perencanaan kebutuhan gas alam untuk industri; Pemeliharaan jaringan gas alam industri	1. Pembangunan saluran pipa gas alam langsung kepada kawasan industri; 2. Pembangunan stasiun pompa gas alam; 3. Pemeliharaan jaringan gas alam industri	1. Pembangunan saluran pipa gas alam langsung kepada kawasan peruntukan industri; 2. Pembangunan stasiun pompa gas alam; 3. Pemeliharaan jaringan gas alam industri	Kerjasama dengan perusahaan gas nasional dan internasional untuk adopsi teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan gas alam	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
Jaringan Sumber Daya Air						
1.	Penyediaan sumber daya air dan peningkatan layanan	1. Optimalisasi pemanfaatan DAS dan bendungan 2. Optimalisasi penyediaan air bersih	1. Peningkatan layanan air untuk industri 2. Pengembangan jaringan perpipaan air minum	Rehabilitasi prasarana jaringan penyedia air dan pemeliharaan	Menyelaraskan pengelolaan sumber daya air dengan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Disperdagin, Dinas, Bapperida, DPMPSTSP, DPUTR, PDAM, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
Pengolahan Limbah Industri						
1.	Pembangunan Sarana Pengolahan Limbah	1. Pemetaan kebutuhan pengolahan limbah di dalam dan di luar kawasan industri 2. Pembangunan sarana pengolahan limbah untuk kawasan peruntukan industri;	Mengimplementasikan teknologi canggih seperti teknologi bioremediasi, insinerasi, dan pengolahan limbah berbasis energi untuk mengurangi dampak lingkungan dan memanfaatkan kembali limbah sebagai sumber daya	Mengembangkan fasilitas pengolahan limbah untuk mendukung pengolahan limbah yang lebih efisien	Pengawasan dan evaluasi pengelolaan limbah	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
2.	Regulasi Pengolahan limbah industri	1. Pemetaan kondisi lingkungan hidup; 2. Pengembangan sistem	Mengembangkan dan memperbaharui regulasi yang mengatur pengolahan limbah	Pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah industri	Memberikan insentif bagi perusahaan yang berhasil mengimplementasikan teknologi	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat

No.	Tema Program	Rencana Aksi				Stake holders
		2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045	
		pemantauan lingkungan hidup; 3. Penetapan peraturan mengenai lingkungan hidup; pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah industri	industri, termasuk standar emisi dan kadar limbah yang boleh dibuang ke lingkungan		pengolahan limbah yang efisien dan ramah lingkungan	
Transportasi						
1.	Pembangunan infrastruktur jalan	1. Pemeliharaan infrastruktur jalan; 2. Pemetaan kebutuhan infrastruktur jalan terkait pembangunan kawasan industri	1. Pemeliharaan infrastruktur jalan; 2. Pembangunan akses jalan menuju kawasan industri	1. Pemeliharaan infrastruktur jalan; 2. Perluasan akses jalan seiring bertambahnya volume kegiatan industri	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan yang menghubungkan kawasan industri utama di Kabupaten Cirebon dengan pelabuhan, stasiun kereta api, dan area distribusi lainnya untuk mempercepat proses logistik	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKAD, Bappenda, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
2.	Pembangunan Infrastruktur Kereta Api	1. Pemeliharaan infrastruktur rel kereta api; 2. Pemetaan kebutuhan infrastruktur kereta api terkait pembangunan kawasan industri; 3. Pembangunan terminal peti kemas kereta api terpadu	1. Pemeliharaan infrastruktur rel kereta api; 2. Pembangunan akses kereta api menuju kawasan industri	1. Pemeliharaan infrastruktur rel kereta api; 2. Pembangunan akses kereta api menuju kawasan industri; Perluasan dan penambahan terminal peti kemas kereta api	Membangun stasiun kereta api yang terintegrasi dengan kawasan industri utama untuk mempermudah pengangkutan barang industri, serta menyediakan fasilitas logistik yang efisien dan terjangkau bagi pelaku industri	
3.	Optimalisasi Pelabuhan Cirebon	Promosi Pelabuhan Cirebon kepada industri; pemetaan kebutuhan industri atas penggunaan pelabuhan	Pengembangan sistem logistik terintegrasi di pelabuhan Cirebon dengan menghubungkan jalur laut dengan jalur darat dan kereta api untuk mempercepat distribusi barang	Pemanfaatan teknologi untuk pelabuhan cerdas (<i>Smart Port</i>) dengan menerapkan teknologi smart port yang dilengkapi dengan sistem pemantauan berbasis sensor dan data real-time untuk mengelola arus barang dan meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan.	Memperkuat sistem keamanan pelabuhan menggunakan teknologi untuk memastikan distribusi bahan baku dan produk industri berjalan lancar tanpa gangguan, serta mencegah penyelundupan atau masalah logistik lainnya.	

No.	Tema Program	Rencana Aksi				Stake holders
		2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045	
Sistem Informasi Industri						
1.	Pengembangan Sistem Informasi Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Industri mikro, kecil, menengah dan besar; 2. Sosialisasi SIINas bagi IKM; 3. Pendampingan pelaporan industri pada SIINas bagi IKM; 4. Pengembangan sistem informasi industri internal. 	Pendataan kegiatan Industri secara lengkap (bahan baku, produksi, penjualan, sumber daya, dan lain-lain)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi industri Kabupaten Cirebon yang dapat diakses publik; 2. Pemanfaatan sistem informasi untuk pengambilan keputusan dan program pengembangan 	Mewujudkan integrasi data industri dengan data terkait dari sektor-sektor lain (seperti pendidikan, tenaga kerja, keuangan, dan lainnya) untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dalam pengembangan industri.	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
Standarisasi Industri						
1.	Pengembangan standarisasi industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung optimalisasi dan pengembangan lembaga sertifikasi 2. Memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang penerapan standar industri kepada pelaku IKM, agar mereka dapat bersaing di pasar domestik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung optimalisasi dan pengembangan lab uji 2. Menerapkan sistem inspeksi dan audit berkala untuk memastikan bahwa pelaku industri mematuhi standar yang telah ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung optimalisasi dan pengembangan lembaga penilaian 2. Mengintegrasikan standar keberlanjutan dalam setiap tahapan proses produksi industri, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses distribusi produk, guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 	Menetapkan standar internasional untuk sektor industri strategis di Kabupaten Cirebon guna mendukung ekspansi produk ke pasar global	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTSP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
Kebijakan dan Regulasi						
1.	Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi OSS pada IKM 2. Pendampingan pembuatan NIB pada IKM 3. Verifikasi teknis dalam rangka pemenuhan komitmen perizinan berusaha berbasis risiko dari IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peraturan daerah yang berkaitan dengan perizinan berusaha untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha 2. Insentif dan kemudahan berusaha bagi IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha industri untuk meningkatkan investasi 2. Menetapkan sistem pemantauan secara berkala terhadap perkembangan investasi yang ada, termasuk pencapaian target investasi dan dampaknya terhadap ekonomi daerah, serta melakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal kebijakan penanaman modal dan perizinan industri, guna memastikan sinergi antara kebijakan lokal dan kebijakan nasional. 2. Menjalin kerjasama dengan lembaga 	Disperdagin, DPMPSTSP Daerah dan Provinsi, perguruan tinggi, Pemerintah Pusat.

No.	Tema Program	Rencana Aksi				Stake holders
		2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045	
				evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.	pembiayaan, baik nasional maupun internasional, untuk memberikan dukungan pendanaan dalam rangka memperkuat investasi di sektor industri	

4.2.5 Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri mencakup dalam rencana pembangunan industri Kabupaten Cirebon tahun 2025-2045 difokuskan pada Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pemberdayaan IKM. P3DN merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan sdm dari dalam negeri. Program-program yang spesifik terkait dengan pemberdayaan industri dirangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14 Program Pemberdayaan Industri

No.	Tema Program	Fokus Pentahapan				Stake holders
		2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045	
1.	Peningkatan Produk Dalam Negeri	Mendorong peningkatan penggunaan produk Kabupaten Cirebon pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon	Melakukan pemetaan potensi barang impor yang dapat disubstitusi oleh PDN	Peningkatan produksi PDN substitusi barang impor	Penguatan Kemitraan antara Industri Besar dan Kecil melalui pembinaan dan kemitraan antara industri besar dan industri kecil/mikro untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana industri besar dapat menjadi pembeli produk-produk kecil dan memberikan pelatihan atau teknologi.	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
2.	Kerjasama International dalam Bidang Industri	Peningkatan akses pasar internasional produk industri	Mendorong lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Kab.	Memetakan dan meningkatkan kemampuan (<i>quality, cost</i> ,	Membentuk kemitraan dengan lembaga riset, universitas,	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP,

No.	Tema Program	Fokus Pentahapan				Stake holders
		2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045	
		Kabupaten Cirebon melalui keikutsertaan dalam promosi internasional dan membangun jaringan kerjasama Mendukung promosi investasi global untuk pengembangan industri di Kabupaten Cirebon	Cirebon untuk ikut aktif mengembangkan konsep kolaborasi industri global (Industri 4.0)	delivery) industri komponen dan jasa industri di Kab. Cirebon agar mampu berkontribusi pada jaringan rantai pasok global	dan perusahaan internasional untuk meningkatkan inovasi dan riset dalam bidang industri, termasuk kolaborasi dalam pengembangan produk baru, peningkatan proses produksi, dan teknologi	Bapperida, DPMPSTP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
3.	Pemberdayaan Industri Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung peningkatan kompetensi auditor SIH di Kabupaten Cirebon 2. Penyiapan dan pelaksanaan program 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada industri 3. Pembinaan industri hijau pada IKM 4. Pendataan limbah industri dari setiap IKM yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh industri-industri di Kabupaten Cirebon 2. Pembuatan kebijakan pemberian berbagai kemudahan bagi industri yang telah memenuhi standar hijau 	Pelaksanaan program 3R dan pelaksanaan kebijakan industri hijau pemetaan pemenuhan Standar Industri Hijau oleh industri-industri di Kabupaten Cirebon	Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan dan program yang mendukung pengembangan industri hijau, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya beralih ke industri yang lebih ramah lingkungan.	

Kebijakan pemberdayaan IKM tidak bisa dipisahkan dari kebijakan afirmatif IKM nasional yang dirumuskan dalam RIPIN yang berbunyi sebagai berikut:

1. Keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. Penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
3. Upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Adapun strategi-strategi afirmatif pemberdayaan dan pengembangan IKM Kabupaten Cirebon, meliputi:

1. Pengembangan dan penataan Sentra IKM unggulan;
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru;
4. Peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang terstandarisasi;
5. Penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global;
6. Peningkatan skala IKM;
7. Penjaminan pembiayaan yang kompetitif;
8. Pengembangan kemitraan dengan industri besar; dan
9. Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi

Berikut ditampilkan program pemberdayaan IKM dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan di Kabupaten Cirebon seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15 Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

No.	Tema Program	Fokus Pentahapan				Stake holders
		2025 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2040	2041 – 2045	
1.	IKM dalam sentra	Penguatan akses bahan baku, kompetensi kerja, permodalan	Penguatan teknologi tepat guna, pemasaran, dan peralatan produksi bersama Mendorong kerjasama kemitraan antara IKM dengan industri besar	Pemenuhan sertifikasi, peningkatan kualitas, desain, pemasaran, dan tanggung jawab lingkungan untuk memenuhi pasar ekspor	Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan besar atau industri yang lebih maju untuk memberikan akses IKM sentra kepada pasar yang lebih luas dan untuk pembelajaran mengenai standar produksi dan pemasaran global.	Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disperdagin, Dinas Kesehatan, Dinkop UKM, Distan, DKPP, Bapperida, DPMPSTP, Disbudpar, Diskominfo, DPUTR, DPKPP, Disdik, Dishub, Disnaker, DLH, BKC, Perguruan Tinggi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat
2.	IKM unggulan di luar sentra	1. Sosialisasi berbagai kemudahan yang didapatkan di dalam sentra 2. Mendorong IKM untuk bergabung dalam sentra IKM Unggulan	1. Penguatan akses bahan baku 2. Membantu IKM unggulan di luar sentra untuk mengakses pasar yang lebih luas dengan memfasilitasi pemasaran di platform digital, memperkenalkan produk ke pasar internasional, serta mendukung pemasaran produk melalui kerjasama dengan distributor dan pengecer.	1. Mengembangkan program pembiayaan yang khusus untuk IKM unggulan yang berada di luar sentra, termasuk akses ke kredit mikro, modal ventura, dan dana hibah. 2. Membangun kemitraan antara IKM unggulan dengan universitas atau lembaga riset untuk mendukung inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produk,	Menyediakan fasilitas riset dan pengembangan (R&D) untuk IKM unggulan di luar sentra, sehingga mereka dapat melakukan inovasi produk dan proses.	

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi di Kabupaten Cirebon



BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) Kabupaten Cirebon 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dalam proses penyusunannya mengacu pada RIPIN dan RPIP Provinsi Jawa Barat. Visi RPIK Kabupaten Cirebon 2025-2045 adalah Industri Tangguh Menuju Kabupaten Cirebon Sejahtera. Dari visi tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 4 (empat) sasaran. RPIK Kabupaten Cirebon 2025-2045 dibagi menjadi 4 (empat) tahapan periode yaitu Tahap I (2025-2030) yang difokuskan pada penguatan dan daya saing Industri Kabupaten Cirebon, Tahap II (2031-2035) diarahkan pada pengembangan inovasi dan teknologi industri, Tahap III (2036-2040) diarahkan pada pematapan industri berkelanjutan, dan Tahap IV (2041-2045) diarahkan untuk industri Kabupaten Cirebon dapat berdaya saing global.

RPIK akan menjadi pedoman dalam pembangunan industri di Kabupaten Cirebon bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dan merupakan rencana jangka panjang yang berisi rekomendasi-rekomendasi yang bersifat makro. Untuk itu, penjabaran lebih lanjut secara detail perlu dilakukan pada perencanaan-perencanaan pembangunan dengan jangka yang lebih pendek.

Pelaksanaan pembangunan industri perlu melibatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan: sumber daya manusia industri, pemerintah, investor, akademisi, dan masyarakat secara umum. Kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di Kabupaten Cirebon, terutama yang terkait dengan sektor industri.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON